

MODUL OPEN DATA PEMILU

**Verrianto Madjowa, Diah Setiawaty,
Yuandra Ismiraldi, Ramda Yanurzha**

PROLOG

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota KPU RI

EPILOG

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem

MODUL OPEN DATA PEMILU

Oleh:

Verrianto Madjowa, Diah Setiawaty,
Yuandra Ismiraldi, Ramda Yanurzha

Copyright © Perludem

Editor:

Harun Husein

Diterbitkan oleh :

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Jalan Tebet Timur IV A No.1
Tebet, Jakarta Selatan
Telp: 021-8300004, Fax: 021-83795697
Email: perludem@gmail.com
Website: <http://perludem.org>

Cetakan pertama:

Maret 2015
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

UCAPAN TERIMA KASIH

KAMI mengucapkan terima kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi, sehingga buku ini bisa terbit dan sampai ke tangan pembaca.

Terima kasih kepada anggota KPU RI, Bapak Ferry Kurnia Rizkiyansyah, yang menulis prolog, dan Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Titi Anggraini, yang menulis epilog, serta di tengah kesibukannya masih menyempatkan memberikan ulasan dan menjadi narasumber pelatihan data. Terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber dan fasilitator pelatihan data: Mas Didik Supriyanto (Ketua Perludem), Mbak Elisa Sutanudjaya (kawalpemilu.org), dan Sebastian Vishnu (Perludem). Pelatihan data oleh Perludem telah dilaksanakan kurang lebih enam kali sepanjang tahun 2014-2015, bertempat di Jakarta, Gorontalo, Bali, dan Surabaya.

Tak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman KPU provinsi: Robby Syah Putra (Aceh), Heny Susantih (Sumatera Selatan), Nuraida Fitri Habi (Jambi), Diana Ariyanti (Jawa Tengah), Choirul Anam (Jawa Timur), Betty Epsilon Idroos (DKI Jakarta), Kadek Wirati (Bali), Viryan (Kalimantan Barat), Mardiana Rusli (Sulawesi Selatan), dan Syamsul Rifan Kubangun (Maluku). Selain itu, kepada teman-teman KPU kabupaten/kota: Purnomo Pringgodigdo (Kota Surabaya), Agus Salam (Mandailing Natal), serta teman-teman di KPU kabupaten/kota: Kota Tangerang, Kota Jakarta Barat, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Kota Denpasar, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sitaro, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Kota Bitung, Kota Manado, Minahasa, Minahasa Tenggara, Kota Tomohon. Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pohuwato, Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga dan teman-teman masyarakat sipil yang menghadiri pelatihan data kami: Indonesia Parliamentary Center, Public Virtue, Selasar.com, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Kontras, Air Putih, Jariungu.com, Satu Dunia, Change.org, Kawal Pemilu, Publish What You Pay, Open Data Lab, Pulse Lab, I-Lab, HIVOS, Art for Woman, Gorontalo Survey Institute, Wire-G, Japesda, RRI Gorontalo, The Asia Foundation, dan organisasi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Ketua KPU RI Bapak Husni Kamil Manik, anggota KPU Bapak Hadar Nafis Gumay, Bapak Juri Ardiantoro, Bapak Sigit Pamungkas, Ibu Ida Budhiati, dan Bapak Arief Budiman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Emil Satria Tarigan, Bapak Raden Santoso, Mas Andre Putra Hermawan, Mas Adhi Putra dan tim Data Informasi (Datin) KPU, tim IT KPU, serta tim pendukung dari Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom UI).

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada editor kami, Mas Harun Husein, yang membantu memoles tulisan di buku ini, sehingga siap untuk diterbitkan.

Buku ini penting dibaca penyelenggara pemilu, pegiat demokrasi dan pemilu, politisi, dan lembaga/badan publik. Buku ini menyajikan cerita dan panduan terkait keterbukaan informasi dan data terbuka, khususnya di bidang pemilu, bagi para peminat data, perancang dan pengembang komputer, jurnalis, aktivis, dan masyarakat pada umumnya. Semoga dibuatnya manual keterbukaan informasi data pemilu ini dapat mempermudah kerja-kerja dokumentasi data dibidang kepemiluan.

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
PROLOG Demokrasi Butuh Keterbukaan dan Kejujuran	1
1. Data dan Informasi Publik.....	5
2. Data Terbuka	9
3. Manajemen Data	11
4. Mencari dan Mengambil Data.....	17
5. Membersihkan Data.....	27
6. Analisis, Visualisasi, dan Publikasi.....	31
7. Regulasi Keterbukaan Informasi di Indonesia	43
8. Informasi Publik dan Data Terbuka KPU	45
9. Pengembangan API Pemilu oleh Perludem.....	59
10. Partisipasi Masyarakat dan Generasi Digital	75
EPILOG Bukan Sekadar Jargon Keterbukaan	89
Daftar Istilah	93
Daftar Pustaka.....	99
Profil Penulis.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Karangan Bunga.....	7
Tabel 3.1	Tingkat Partisipasi Pemilih Pilpres 2014 per Desa di Kabupaten Pohuwato	13
Tabel 3.2	Analisis Perbandingan Partisipasi Pemilih Pileg dan Pilpres 2014	14
Tabel 5.1	Tabular Data yang Sudah Dikonversi.....	30
Tabel 6.1	Petunjuk Visualisasi Data	33
Tabel 8.10	Informasi Publik dan Data Terbuka KPU RI Melalui Link www.kpu.go.id dan Alamat (URL)	55
Tabel 10.1	Partisipasi Pemilih Pileg dan Pilpres 2014 di Provinsi Gorontalo.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analogi Data	7
Gambar 2.1	Prinsip Data Terbuka (Open Data).....	9
Gambar 3.1	Alur Kerja Pipa Data (Data Pipeline)	11
Gambar 3.2	Infografis Data Pemilu 2014 Dalam Angka (Selasar.com)	14
Gambar 3.3	Situs GovTrack.us	15
Gambar 3.4	Situs WhereDoesMyMoneyGo.org.....	16
Gambar 4.1	Simulasi Pencarian via Google	17
Gambar 4.2	Advanced Search.....	18
Gambar 4.3	Simulasi Pencarian Tingkat Tinggi (Advanced Search).....	19
Gambar 4.4	Detail Pencarian Tingkat Tinggi (Advanced Search).....	19
Gambar 4.5	Situs WaybackMachine	20
Gambar 4.6	Portal Data Indonesia	21
Gambar 4.7	Pencarian dengan Kata Kunci "Pemilu" di Portal Data Indonesia	21
Gambar 4.8	Pencarian Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu Legislatif di DKI Jakarta	22
Gambar 4.9	Tampilan Google Forms	23
Gambar 4.10	Tampilan Pertanyaan Dalam Google Forms	24
Gambar 4.11	Aplikasi "DPR Kita"	25
Gambar 5.1	Mengunduh File ke Tabula.....	28
Gambar 5.2	Tabel Jenis Pendapatan Daerah dan Persentase Sumber Pendapatan Daerah	29
Gambar 5.3	Tabel Jenis Pendapatan Daerah dan Persentase Sumber Pendapatan Daerah	29
Gambar 5.4	Tampilan Open Refine	30
Gambar 6.1	Diagram Peta Pikiran Visualisasi Data	33
Gambar 6.2	Infografis Menghadapi Bencana Alam	34
Gambar 6.3	Tampilan Infogr.am	35
Gambar 6.4	Tampilan Registrasi Infogr.am.....	35
Gambar 6.5	Pembuatan Diagram Infogr.am	36
Gambar 6.6	Desain Infogr.am	36
Gambar 6.7	Modifikasi Diagram Infogr.am.....	37
Gambar 6.8	Pembuatan Diagram Melalui Infogr.am.....	37
Gambar 6.9	Pengeditan Data.....	38
Gambar 6.10	Data Dapat Diubah	38
Gambar 6.11	Data yang Sudah Dibuat Dapat Diganti Warnanya	39
Gambar 6.12	Data Siap Dipublikasi ke Media Sosial	39
Gambar 6.13	Data Siap Dipublikasi ke Media Sosial	40
Gambar 6.14	Data Siap Dipublikasi ke Media Sosial	40
Gambar 6.15	Mendaftar di Situs Piktochart	41
Gambar 6.16	Memilih Template.....	41
Gambar 6.17	Publikasi Data	42

Gambar 8.1	Menu Pencarian Data Pemilih.....	47
Gambar 8.2	Situs Web KPU Provinsi Bali.....	48
Gambar 8.3	Dashboard Silog.....	49
Gambar 8.4	Portal Dapil.....	50
Gambar 8.5	Portal Caleg.....	51
Gambar 8.6	Portal Daftar Partai.....	52
Gambar 8.7	Portal TPS.....	53
Gambar 8.8	Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu 2014.	54
Gambar 8.9	Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu 2014.	54
Gambar 8.10	Portal untuk Hasil Pindai C1 Pemilu Legislatif.....	56
Gambar 8.11	Publikasi Hasil Pindai Formulir Model C1 Melalui Portal http://pilpres2014.kpu.go.id/	56
Gambar 8.12	Kelompok Relawan Pilpres.....	58
Gambar 9.1.	Lomba Hackathon di Bandung.	62
Gambar 9.2	Lomba Hackathon di Jakarta.....	63
Gambar 9.3	Berita Peluncuran Aplikasi “DPR Kita”.....	66
Gambar 9.4	Aplikasi “DPR Kita”.....	67
Gambar 9.5	Mengunduh Aplikasi “DPR Kita”.....	71
Gambar 9.6	Pelatihan Data di Jakarta.....	73
Gambar 10.1	Analisis Partisipasi Pemilih Berbasis Sistem Informasi Geografis.....	78
Gambar 10.2	Analisis Partisipasi Pemilih Berbasis Sistem Informasi Geografis.....	78
Gambar 10.3	Grafik Partisipasi Pemilih 2013 dan 2014 di Kabupaten Gorontalo Utara.....	79
Gambar 10.4	Hasil Pemantauan MataMassa pada Pemilu 2014.	83
Gambar 10.5	Statistik Laporan MataMassa.....	83
Gambar 10.6	Hasil Survei Akses dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika 2014.....	84
Gambar 10.7	Hasil Survei Akses dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika 2014.....	86

PROLOG

Demokrasi Butuh Keterbukaan dan Kejujuran

MEMBANGUN demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Untuk itu, lembaga-lembaga demokrasi harus mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, akuntabel dan partisipatif. Demokrasi tidak dapat tumbuh dan berkembang dalam ruang hampa. Demokrasi butuh interaksi dengan lingkungannya, butuh ‘udara segar’ dan ‘cahaya terang’ untuk melakukan kegiatan ‘fotosintesis’ dalam rangka menjaga mata rantai kehidupan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.

Dalam perspektif pengembangan masyarakat demokratis dan informatif, praktik komunikasi pemerintah—termasuk lembaga-lembaga demokrasi—setidaknya mengacu pada tiga proposisi utama. Pertama; dalam struktur politik demokrasi harus menekankan aspek kebebasan transaksi ide dan informasi akurat, agar masyarakat dan pemerintah mendapat variasi referensi pilihan informasi. Kedua; pemerintah yang demokratis harus melaporkan dan mendorong akuntabilitas badan publik kepada masyarakat yang dilayani. Ketiga; masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki hak konstitusional atas informasi pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi telah membantu kita untuk membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik. Lembaga-lembaga demokrasi dari waktu ke waktu juga makin adaptif dan familiar dengan beragam jenis teknologi informasi. Hampir semua infrastruktur dan suprastruktur politik dan demokrasi kini memiliki media komunikasi yang bersifat konvergen (menggabungkan media *online*, cetak dan visual) untuk membangun interaksi dengan publik.

Institusi pemerintahan juga makin menyadari bahwa pengembangan keterlibatan warga (*citizen engagement*) dalam penyelenggaraan negara merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Namun, kontribusi warga akan signifikan jika mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi. Keterbukaan informasi dan penyediaan ruang komunikasi merupakan salah satu sarana untuk mengedukasi masyarakat dalam

meningkatkan intensitas dan kualitas keterlibatannya dalam penyelenggaraan Negara.

KPU sebagai penyelenggara pemilu yang membutuhkan kepercayaan dan dukungan publik, juga memberikan respons terhadap perkembangan teknologi informasi tersebut dalam rangka memberikan pelayanan informasi pemilu kepada publik. Untuk itulah, pada setiap tahapan pemilu pada tahun 2014 lalu, KPU menggunakan aplikasi sistem informasi untuk membantu kecepatan, akurasi, dan penyebaran informasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu.

Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU dengan publik telah memicu partisipasi publik pada setiap tahapan. Sebagai contoh, ketika KPU memublikasikan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR secara *online*, lengkap dengan biodata masing-masing kandidat, masyarakat meresponnya dengan antusias. Setidaknya terdapat 273 masukan dan tanggapan masyarakat yang ditujukan kepada calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika DCS diumumkan.

Respons publik, baik secara individual maupun kelompok, yang sangat besar muncul ketika aplikasi sistem penghitungan suara (Situng) digunakan sebagai media untuk merekam, mendokumentasikan, dan memublikasikan hasil pemilu. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya sejumlah *crowdsourcing* yang menghitung sendiri hasil perolehan suara setiap peserta pemilu dan kandidat berdasarkan hasil *scanning* formulir C1 dan lampirannya, yang diunggah KPU di *website*.

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu telah ikut membantu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil atau *free and fair election*. Potensi kecurangan semakin kecil karena penyelenggara merasa terawasi. Kepercayaan publik terhadap kredibilitas Pemilu 2014 meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Selain itu, hubungan timbal balik antara penyelenggara pemilu dengan publik makin dinamis.

Penyelenggara pemilu juga semakin menyadari bahwa penyediaan data dan informasi oleh penyelenggara pemilu kepada publik tidak lagi sebatas untuk memenuhi prinsip *obligation to tell* (kewajiban menyampaikan informasi) dan *right to know* (pemenuhan hak tahu publik), tetapi secara perlahan beranjak menuju prinsip *freedom of information*. Di mana penyelenggara pemilu sadar bahwa dirinya adalah penerima amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemilu. Untuk itu, semua informasi miliknya bebas diketahui publik.

Interaksi penyelenggara pemilu dan masyarakat harus senantiasa dibangun

dalam konteks saling mendewasakan melalui pendidikan terus-menerus. Tanya jawab antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dikembangkan dalam budaya dialog dan dalam konteks kejujuran, bukan kecurangan.

Buku yang ditulis oleh saudara Verrianto Madjowa, Diah Setiawaty, Yuandra Ismiraldi, dan Ramda Yanurzha dengan judul “**Modul Open Data Pemilu**” sangat berharga sebagai referensi bagi institusi publik, terutama penyelenggara pemilu di semua tingkatan, untuk bekerja dengan data dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi yang semakin baik kepada masyarakat. Buku ini juga memberikan gambaran bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilu telah bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, dan akuntabel pada Pemilu 2014 lalu. Selamat membaca.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Anggota KPU RI

BAGIAN SATU

Data dan Informasi Publik

“... Sah!”

“... Sah!”

DENGAN suara jelas, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menghitung suara, sambil memperlihatkan satu per satu surat suara bertanda coblos kepada saksi peserta pemilu, petugas pengawas lapangan, dan warga yang hadir di tempat pemungutan suara (TPS). Petugas KPPS yang lain terus membuka surat suara untuk dihitung. Ada pula petugas KPPS yang mencatat perolehan suara tersebut dengan cara turus (*tally*) pada kertas plano ukuran besar yang ditempel di papan. Petugas lainnya menyusun surat suara sah dan tidak sah yang telah diumumkan.

Setelah selesai diumumkan dan dicatat pada kertas plano ukuran besar, petugas KPPS menghitung dan menjumlahkan suara sah yang diperoleh peserta pemilu, serta suara tidak sah. Surat suara yang ada, kemudian dipadankan dengan dengan hasil penghitungan di kertas plano.

Inilah data hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Warga yang hadir saat penghitungan suara, para saksi, dan petugas lapangan mencatat angka-angka tersebut. Ada yang memotret dan mengambil gambar bergerak hasil perolehan suara, juga merekam proses tersebut.

Angka-angka dan gambar penghitungan suara di TPS merupakan wujud nyata yang menjadi bahan dasar perolehan suara. Ketika data tersebut dicatat, direkam, dan disebar, maka dia menjadi informasi bagi yang lain. Informasi ini kemudian dikemas lagi dalam bentuk tulisan dan gambar yang memiliki nilai dan makna.

Banyak yang tidak menyadari bahwa data-data pemilu memegang peranan penting bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya untuk kepentingan dokumentasi sejarah, tapi juga berguna untuk banyak hal. Daftar pemilih, misalnya, dapat digunakan sebagai salah satu referensi oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk memperbaiki data kependudukan. Data pemilu juga dapat dianalisis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, baik di bidang pemilu maupun di luar

bidang tersebut.

Sayangnya, saat ini data pemilu tersebar di berbagai tempat. Banyak yang bahkan sudah sulit dilacak dan ditemukan kembali. Kalaupun ditemukan, kondisinya biasanya bukan dalam bentuk digital atau *scan portable document format (PDF)*. Inilah yang membuat data-data tersebut tidak bisa dibaca oleh mesin (komputer), dan menyulitkan untuk publikasi maupun analisis lebih lanjut. Butuh usaha ekstra dan biaya besar untuk mulai mengumpulkan lagi data-data pemilu di Indonesia.

Hal ini merupakan sebuah paradoks bagi Indonesia yang dianggap sebuah laboratorium pemilu dan politik dunia. Karena kurangnya data dan informasi, misalnya, banyak yang tidak mengetahui bahwa sebelum pelaksanaan Pemilu 1955, telah digelar pemilihan anggota DPRD secara langsung di Minahasa, Makassar, dan Yogyakarta pada 1951 dan 1952 (Madjowa, 2015:9)

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan data dan apa pula urgensinya? Data adalah keadaan nyata yang dijadikan dasar informasi kepada pengguna maupun khalayak/publik. Dalam keseharian, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data bisa berdiri sendiri dan dalam beragam kombinasi. Data berbeda dengan gosip maupun desas-desus. Gosip dan desas-desus dipercakapkan tanpa diketahui jelas sumbernya, atau biasa disebut kabar angin. Sementara data adalah catatan atas kumpulan fakta.

Data berasal dari kata *datum*, dari bahasa Latin, yang artinya “sesuatu yang diberikan”. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra (Perludem, 2014). Data merupakan kumpulan nilai yang diberikan untuk mendeskripsikan suatu benda. Pengertian “benda” ini dapat berupa material fisik, seperti sekolah, puskesmas, dan jalan raya, atau konsep abstrak seperti nilai inflasi, anggaran belanja, dan populasi penduduk.

Tentu, dalam keseharian kita sering mendengar kata data. Dan, kita sadari atau tidak, kita pun sering berhadapan dengan data. Namun, apa sebenarnya arti data?

Berikut adalah ilustrasi sederhana terkait definisi data. Coba kita bayangkan dalam pikiran tentang sebuah gambaran yang berisi kumpulan bunga. Dari gambaran tersebut kita dapat melihat ada beberapa bunga, dan pada setiap bunga ada sesuatu yang dapat kita observasi serta kita beri nilai. Nilai-nilai yang kita berikan/tempelkan pada gambar itulah yang disebut sebagai data. Sebagai contoh, beberapa data dari gambaran berikut:

- Ada lebih dari lima bunga.
- Bunga tersebut berwarna warni: merah tua, merah muda, dan putih.
- Bunga tersebut berukuran kecil dan berukuran besar.

Data dalam bentuk narasi seperti ini jarang ditemui. Seringkali, yang dijumpai adalah data dalam bentuk tabular seperti pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.1: DATA KARANGAN BUNGA

JENIS	WARNA	UKURAN
Bunga	Merah muda	Kecil
Bunga	Merah tua	Besar
Bunga	Putih	Besar

Undang-undang (UU) No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Baik itu berupa data, fakta, maupun penjelasannya; yang dapat dilihat, didengar dan dibaca; yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, secara elektronik ataupun non-elektronik.

Sedangkan, informasi publik, menurut UU tersebut adalah: “...informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

GAMBAR 1.1: ANALOGI DATA



Tidak semua data harus diinformasikan kepada publik. Lembaga maupun organisasi dapat memilah mana data yang akan diumumkan, mana data yang

seharusnya dirahasiakan. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin sejumlah informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan dari akses publik. Dalam administrasi kependudukan juga terdapat data pribadi yang dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya. Bagi penyelenggara pemilu, sesuatu yang dirahasiakan menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip dasar etika (Kode Etik Penyelenggara Pemilu).

Dengan demikian, setiap data dapat dikelompokkan sebelum diinformasikan kepada publik. Data ini dapat dikategorikan dalam tiga bagian.

Pertama, data yang masih menjadi rahasia. Penyelenggara pemilu, misalnya, berkewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang merupakan data perseorangan juga harus dijaga kerahasiaannya. Pemegang hak akses data pribadi penduduk, misalnya, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Data-data yang sifatnya dirahasiakan hanya dapat dibuka atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Data bersifat rahasia ini telah dituangkan pasal per pasal dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya mengenai informasi yang dikecualikan.

Kedua, data tertutup. Data tertutup dapat diolah dan diumumkan sebagai informasi publik. Namun, data ini dalam format yang tidak dapat diubah. Data tertutup yang menjadi konsumsi publik ini, sesuai kegunaannya, juga dapat diakses dengan mudah dan memiliki kriteria seperti data terbuka. Format terkunci untuk data tertutup bertujuan agar tidak disalahgunakan.

Ketiga, data terbuka (*open data*). Data terbuka adalah data yang memiliki kriteria dapat diakses dengan bebas oleh publik, dapat digunakan kembali, dan dapat digunakan oleh siapa saja. Penjelasan lebih lanjut tentang data terbuka akan disampaikan pada bab berikutnya.

BAGIAN DUA

Data Terbuka

APA itu data terbuka (*open data*)? Inti dari data terbuka adalah data tersebut dapat diakses oleh publik, dapat digunakan kembali, dan dapat digunakan oleh siapa saja. Teknologi yang berkembang saat ini memungkinkan data yang terbuka disalurkan dan disebarluaskan melalui berbagai perangkat aplikasi.

GAMBAR 2.1: PRINSIP DATA TERBUKA (OPEN DATA)



Terdapat beberapa prinsip data terbuka, antara lain:

BEBAS DIAKSES

Data bebas diakses oleh semua orang, dari mana saja, tanpa dihalangi hal-hal seperti permintaan izin. Contohnya data yang dapat diakses dan diunduh dari internet tanpa memerlukan *login*.

BEBAS DIGUNAKAN KEMBALI

Data tersebut bebas dipergunakan sesuai tujuan pengambil data. Bagaimana data itu digunakan, diatur oleh lisensi data tersebut. Lisensi dapat berupa *creative commons*, yaitu sebuah standard lisensi untuk penggunaan data. Contoh lisensi yang dapat dipergunakan adalah *Creative Commons Attribution v.4*. Lisensi ini memperbolehkan penggunaan, pendistribusian, serta pengolahan data oleh penggunanya, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial. Contoh penggunaan lisensi ini adalah pada portal data Indonesia, yaitu *data.go.id*.

BEBAS DIGUNAKAN OLEH SIAPAPUN

Bebas untuk digunakan oleh siapapun memiliki dua pengertian, yaitu :

A. MENGGUNAKAN FORMAT YANG TERBUKA (TIDAK PROPEITARY)

Menggunakan format terbuka artinya data tersebut disimpan dalam bentuk yang bisa dibuka oleh semua aplikasi, dan tidak dibutuhkan aplikasi khusus untuk membacanya. Contohnya format standar terbuka seperti format TXT atau format CSV (comma separated value). Format CSV adalah format penyimpanan data di mana antara nilai pada data dipisahkan oleh tanda pemisah tanda koma (.). Contoh bentuk data CSV adalah sebagai berikut:

- jenis, warna, ukuran
- bola, biru, kecil
- bola, merah, besar
- bola, hijau, kecil

Mirip dengan bentuk data tabular, baris pertama menunjukkan penanda kolom, sedangkan baris berikutnya adalah isi dari data.

B. DALAM FORMAT YANG BISA DIBACA MESIN.

Data tersebut harus dapat dibaca mesin, dalam hal ini komputer. Data yang ada sekarang, banyak berupa laporan yang hanya dapat dibaca oleh manusia atau bersifat *human readable*. Data seperti ini tidak bisa dibaca oleh program komputer. Agar dapat dibaca oleh mesin, kita harus mengubah formatnya, antara lain menjadi CSV. Inilah mengapa agar data tersebut benar-benar terbuka dan mudah digunakan orang lain, data harus dalam bentuk yang bisa dibaca oleh mesin, sehingga mudah diolah.

BAGIAN TIGA Manajemen Data

A. KONSEP BEKERJA DENGAN DATA

Ada banyak masalah yang dapat dipecahkan dengan data, namun tidak selalu diketahui bagaimana memanfaatkan data untuk memecahkan masalah. Namun, ada konsep untuk bekerja dengan data yang bernama pipa data (*data pipeline*). Konsep ini berasal dari School of Data, organisasi nonpemerintah yang berbasis di Inggris, yang melakukan advokasi mengenai kemampuan bekerja dengan data.

GAMBAR 3.1: ALUR KERJA PIPA DATA (DATA PIPELINE)



Alur *data pipeline* adalah sebagai berikut :

1. CARI SEBUAH PERTANYAAN

Sebelum bekerja dengan data, tentu harus dimulai dengan mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan. Cara paling mudah mendefinisikan masalah adalah dengan mengajukan pertanyaan dengan prinsip 5W+1H:

what, where, when, who, why, dan how (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana). Kemudian, menjadikan pertanyaan tersebut sebagai dasar dari langkah-langkah selanjutnya.

2. Mencari dan Menemukan Data

Setelah mendefinisikan pertanyaan, langkah kedua adalah mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut, yang kita harapkan nantinya dapat menghasilkan jawaban. Untuk memperoleh data, kita dapat melakukan pencarian pada data yang sudah tersedia seperti di portal KPU dan kantor/lembaga, atau mengumpulkan data sendiri, misalnya melalui survei.

3. Membersihkan Data

Setelah itu, menyiapkan proses pengolahan data. Sebelum data diproses untuk dianalisis, terlebih dahulu harus dipastikan apakah data tersebut sudah bersih atau belum. Bersih berarti tidak ada lagi data yang rusak, seperti ganda atau memiliki keterangan kosong, serta sudah dalam format yang dapat dibaca oleh mesin (*machine readable*), sehingga mudah diproses.

4. Melakukan Analisis Data

Setelah data dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan analisis, menggunakan data yang telah dibersihkan. Dalam tahap ini, data dianalisis menggunakan *tools* seperti *excel*, sehingga diharapkan akan ditemukan jawaban atas pertanyaan.

5. Melakukan Presentasi Data

Setelah jawaban ditemukan, langkah berikutnya adalah menyiapkan jawaban tersebut agar mudah dikonsumsi orang lain. Caranya dengan menyajikan jawaban dan data tersebut dalam format yang indah dan menarik, menggunakan teknik-teknik visualisasi data.

B. Contoh Penggunaan Data

Banyak sekali contoh kegunaan aplikasi data, baik berbasis data terbuka maupun tidak. Beberapa kegunaannya antara lain:

1. UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN

Dengan melakukan analisis, bisa dibuat rancangan kebijakan berbasis data, yang diharapkan sesuai kenyataan di lapangan. Dari data tersebut, dibuat analisis yang mampu menghasilkan sebuah pola pemodelan. Sehingga, dapat diprediksi tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

Salah satu contoh penggunaan data untuk membuat keputusan adalah pemanfaatan peta pemilu yang dibuat Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dengan peta pemilu tersebut, KPU Pohuwato dapat memilih kawasan dengan *voters turnout* rendah, yaitu perkotaan. Dari situ dapat dilihat mata pencaharian penduduknya, yang ternyata kebanyakan adalah pegawai negeri sipil. Dari data tersebut dan pengalaman di pemilu legislatif, maka KPU Pohuwato kemudian mengambil inisiatif mendekati pemerintah daerah untuk melakukan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu.

Berdasarkan analisis partisipasi pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 di Kabupaten Pohuwato, menurut anggota KPU Pohuwato, Jimmy Mangempis, ditemukan sebuah pola, yaitu pemilih di perkotaan atau ibu kota kecamatan mempunyai tingkat partisipasi cenderung rendah, dibandingkan kawasan pinggiran. “Contoh paling jelas di Kecamatan Marisa. Di Desa Pohuwato Timur dan Desa Pohuwato yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai nelayan, dan Desa Bulangita yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, tingkat partisipasi pemilihnya tinggi. Berbanding terbalik dengan Desa Palopo dan Desa Marisa Utara yang terletak di pusat kota,” kata Jimmy.

TABEL 3.1: TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PILPRES 2014 PER DESA DI KABUPATEN POHUWATO

Kecamatan	Kelurahan	Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Prosentasi Partisipasi
		L	P	L+P	L	P	L+P	
LEMITO	BABALONGE	147	137	284	126	121	247	86,97%
RANDANGAN	SARI MURNI	381	393	774	326	326	652	84,24%
PAGUAT	MALEO	477	460	937	392	396	788	84,10%
POPAYATO BARAT	BUTUNGALE	317	299	616	224	182	406	65,91%
POPAYATO BARAT	DUDEWULO	631	585	1216	365	376	741	60,94%
MARISA	MARISA UTARA	1282	1393	2675	741	858	1599	59,78%
MARISA	PALOPO	675	734	1409	396	397	793	56,28%

TABEL 3.2: ANALISIS PERBANDINGAN PARTISIPASI PEMILIH PILEG DAN PILPRES 2014

DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	PILEG 2014			PILPRES 2014			SELISIH (Penurunan)
		JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PROSENTASE	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PROSENTASE	
PUNCAK JAYA	KEC. TALUDITI	736	563	76,49%	701	534	76,18%	-0,32%
BANUROJA	KEC. RANDANGAN	878	712	81,09%	854	675	79,04%	-2,05%
MALEO	KEC. PAGUAT	910	802	88,13%	937	788	84,10%	-4,03%
BULANGITA	KEC. MARISA	407	357	87,71%	410	343	83,66%	-4,06%
PALOPO	KEC. MARISA	1486	904	60,83%	1409	793	56,28%	-4,55%
PATUHU	KEC. RANDANGAN	902	684	75,83%	910	584	64,18%	-11,66%
PELAMBANE	KEC. RANDANGAN	802	621	77,43%	813	512	62,98%	-14,45%
DUHIADAA	KEC. DUHIADAA	1124	970	86,30%	1115	785	70,40%	-15,90%
SIPATANA	KEC. BUNTULIA	937	815	86,98%	936	656	70,09%	-16,89%
MARISA	KEC. POPTIM	864	774	89,58%	867	618	71,28%	-18,30%
WONGGARASI BARAT	KEC. LEMITO	992	844	85,08%	999	649	64,96%	-20,12%
BUTUNGALÉ	KEC. POPBAR	615	545	88,62%	616	406	65,91%	-22,71%

2. UNTUK KEPENTINGAN JURNALISME

Di bidang media dan jurnalisme, data dipergunakan untuk kepentingan pemberitaan. Data disajikan sebagai basis pemberitaan atau diolah menggunakan elemen visual agar pembaca lebih mengerti alur cerita dimaksud. Contohnya, penggunaan grafis sebagai ilustrasi data atau menggambarkan alur cerita. Ada pula beberapa media *online* yang telah mengimplementasikan visualisasi data secara interaktif untuk menampilkan cerita jurnalistik. Tampilan-tampilan ini juga bisa berupa infografis-infografis menarik untuk menjangking minat pembaca.



GAMBAR 3.2: INFOGRAFIS DATA PEMILU 2014 DALAM ANGKA (SELASAR.COM)

3. UNTUK KEPENTINGAN ADVOKASI

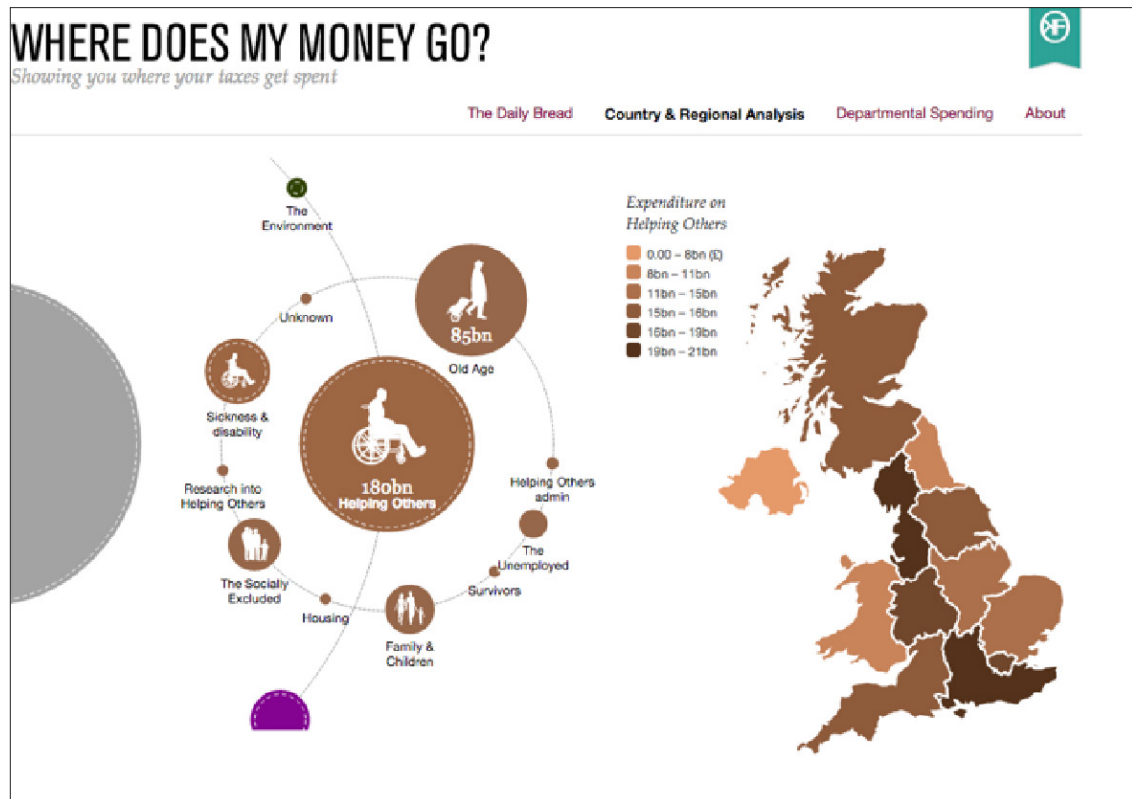
Advokasi berbasis data digunakan sebagai sarana pendukung. Selain itu, elemen visualisasi memegang peranan penting untuk menampilkan sebuah cerita yang berkaitan dengan advokasi. Dengan basis data ini, lebih mudah melakukan edukasi. Penggunaan data seperti ini antara lain ditampilkan oleh situs *govtrack.us*, sebuah program dari Civic Impulse, LLC, yang kini sudah berumur 10 tahun. Dalam situs ini dapat ditemukan status undang-undang federal Amerika Serikat, catatan *voting*, peta distrik kongres, dan lain-lain. Situs ini juga membuat konten menjadi Application Programming Interface (API) dan membuatnya lebih mudah dipahami. Situs *govtrack.us* juga terbuka untuk berbagi data, menyatukan data, sehingga situs-situs lain dapat membangun aplikasi lain untuk membantu warga terlibat dengan pemerintah.

Kini, situs *govtrack.us* adalah situs terkait transparansi pemerintah yang paling banyak dikunjungi di dunia. Situs ini membantu warga biasa mencari dan melacak tagihan di Kongres AS dan memahami catatan legislatif wakil mereka. Pada 2014 lalu, *govtrack.us* sudah digunakan oleh tujuh juta orang.

GAMBAR 3.3: SITUS GOVTRACK.US



GAMBAR 3.4: SITUS WHEREDOESMYMONEYGO.ORG



Selain *govtrack*, ada situs transparansi pemerintahan serupa, tapi fokus pada anggaran pemerintah, yaitu *wheredoesmymoneygo.org*. Situs buatan Open Knowledge Foundation ini merupakan *project* dari Open Spending, sebuah gerakan transparansi *budget* pemerintahan. Di situs ini, data-data terkait anggaran divisualisasikan dalam bentuk interaktif, sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi dan mengetahui detail *budget* yang dialokasikan pemerintah untuk bidang tertentu.

BAGIAN EMPAT

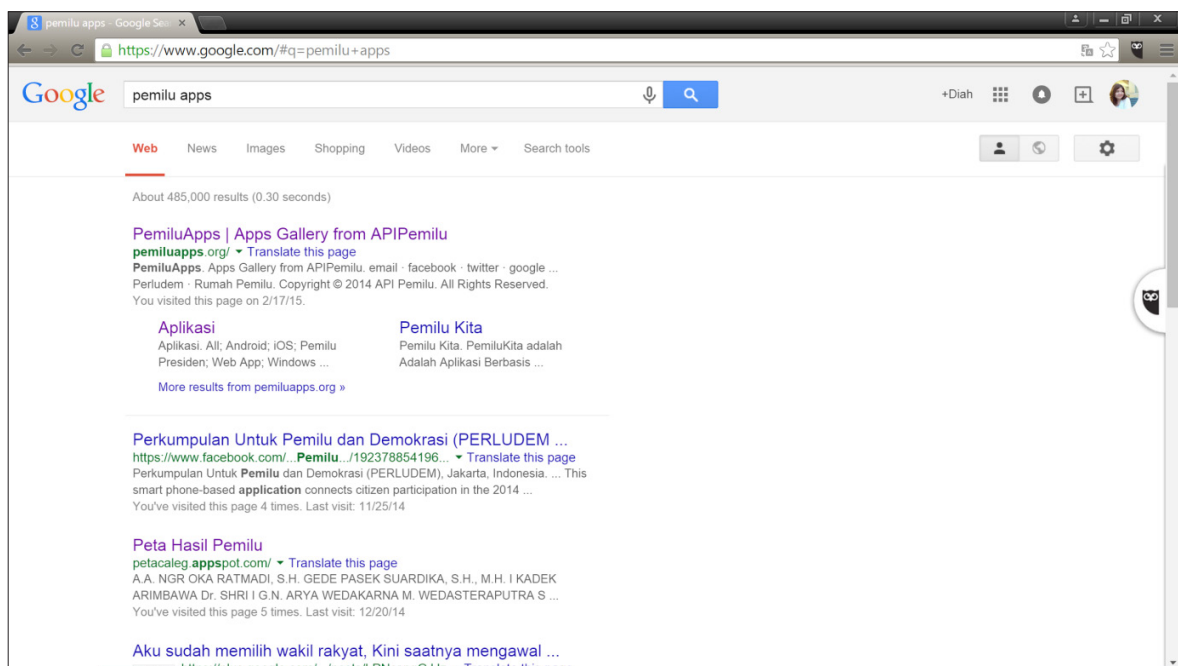
Mencari dan Mengambil Data

SETELAH mendefinisikan pertanyaan dan masalah, langkah berikutnya adalah mencari dan mengambil data-data yang bisa membantu menjawab pertanyaan. Ada beberapa teknik untuk mengambilnya:

1. Mencari Data Menggunakan Mesin Pencari

Langkah pertama yang biasa dilakukan untuk mendapatkan data di internet adalah menggunakan mesin pencari. Tapi, yang mungkin hanya diketahui segelintir orang, ada teknik pencarian tingkat tinggi (*advanced search*), yang mampu melakukan pencarian lebih detail.

GAMBAR 4.1: SIMULASI PENCARIAN VIA GOOGLE



Biasanya, jika ingin melakukan pencarian, seseorang mengetikkan kata kunci di kotak pencarian Google. Jika ingin mendapatkan hasil pencarian yang detail dan terperinci, kita antara lain dapat melakukannya dengan memasukkan operator pencarian (*search operator*). Contohnya kalimat pencarian berikut:

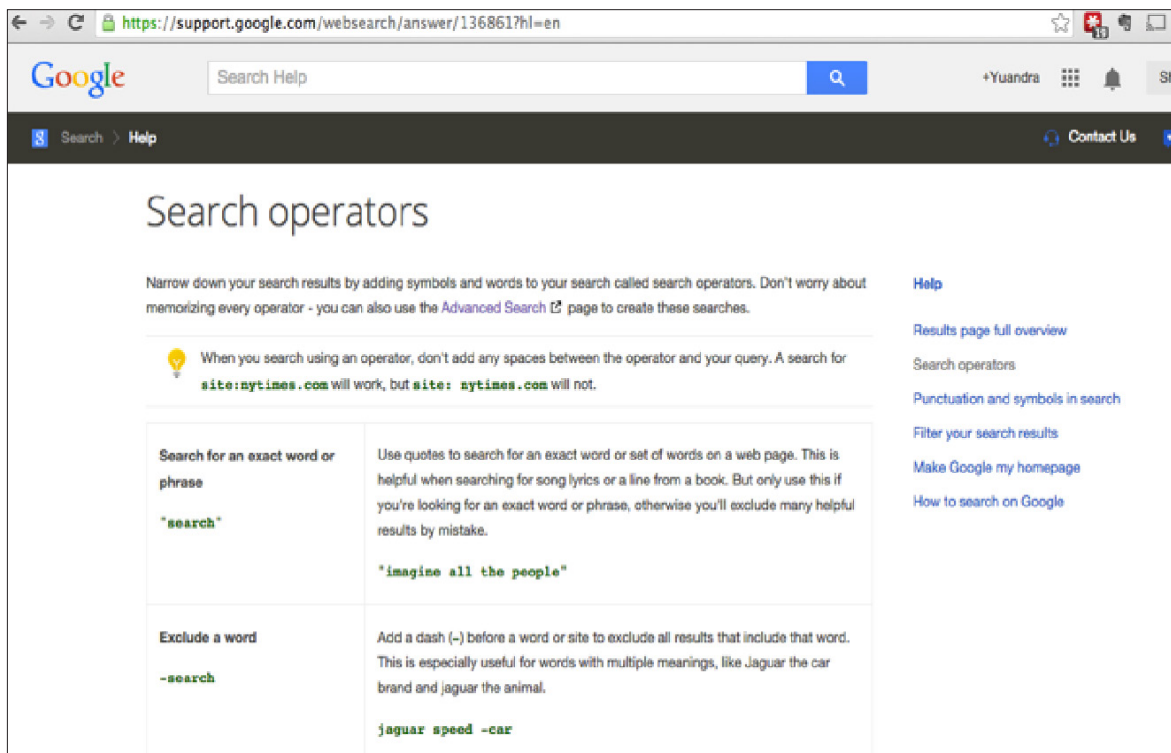
Filetype: pdf site:http://kpu.go.id intitle:"hasil pemilu"

Pada kalimat tersebut, kata kuncinya adalah *filetype* (menemukan jenis file tertentu), *site* (mencari hanya khusus di situs dengan alamat tertentu), dan *intitle* (mencari di dokumen dengan judul tertentu). Pencarian di atas berarti ingin mendapatkan semua file bertipe pdf di situs KPU, dengan judul yang mengandung kata-kata "hasil pemilu". Dapat dilihat bahwa hasil pencarian menjadi lebih spesifik dibandingkan pencarian 'konvensional' seperti terlihat pada gambar sebelumnya.

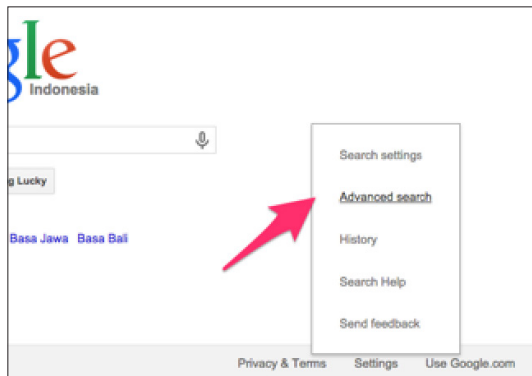
Untuk melakukan pengecekan *search operator* yang dimiliki Google, bisa dilakukan dengan membuka halaman Google yang memiliki penjelasan tentang *search operator*. Halaman tersebut berada di Google Help dan dapat diakses melalui link ini:

<http://support.google.com/websearch/answer/136861>

GAMBAR 4.2: ADVANCED SEARCH



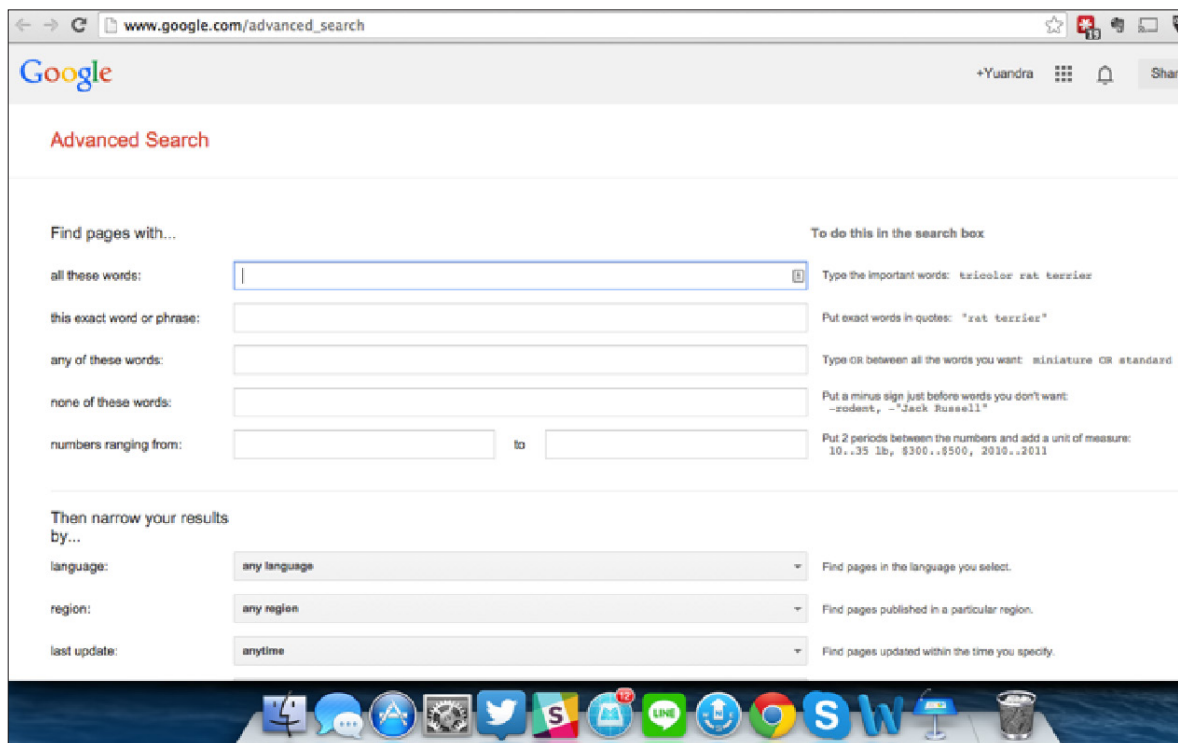
Tapi, sebenarnya Google memberi kemudahan bagi pengguna untuk tidak perlu menghafal kata-kata kunci spesifik. Sebab, pencarian untuk mendapatkan hasil yang detail dan terperinci, dapat dilakukan dengan mengakses Google Advanced Search. Cara mengaksesnya adalah dengan membuka halaman utama Google, lalu klik *settings* di bagian bawah, kemudian pilih *advanced search*, seperti pada gambar berikut ini:



GAMBAR 4.3: SIMULASI PENCARIAN TINGKAT TINGGI (ADVANCED SEARCH)

Setelah mengeklik *advanced search*, maka kita akan membuka halaman khusus untuk Google Advanced Search. Di situ disediakan *form* khusus untuk melakukan *search*. Setelah mengisi *form* tersebut dengan keterangan-keterangan spesifik yang diinginkan, Google akan mengubahnya menjadi bentuk *advanced search*.

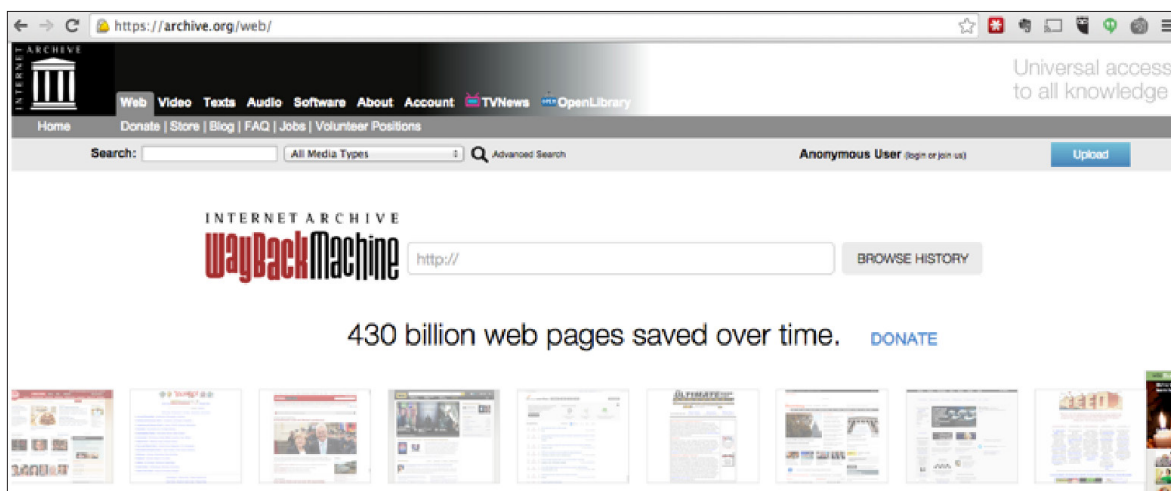
GAMBAR 4.4: DETAIL PENCARIAN TINGKAT TINGGI (ADVANCED SEARCH)



2. Mencari Data di Internet yang Sudah Dihapus Sebelumnya

Berikut ini sebuah tips yang bisa digunakan untuk mencari data yang dulu ada di sebuah situs internet, namun kini tidak bisa lagi ditemukan. Manfaat lain menggunakan tips ini, seseorang dapat membandingkan kondisi *website* sekarang dengan dulu. Untuk melakukan langkah ini, kita dapat menggunakan situs *web* bernama *wayback machine*. Situs ini secara otomatis menyimpan keadaan suatu *website*, jika *web* tersebut pernah populer dan dikunjungi banyak orang. *Wayback machine* telah menyimpan sekitar 435 miliar halaman *web* sejak tahun 1996 hingga saat ini. Kita dapat mengakses situs *wayback machine* di alamat <http://archive.org/web>.

GAMBAR 4.5: SITUS WAYBACKMACHINE



3. Mencari Data Menggunakan Portal Data

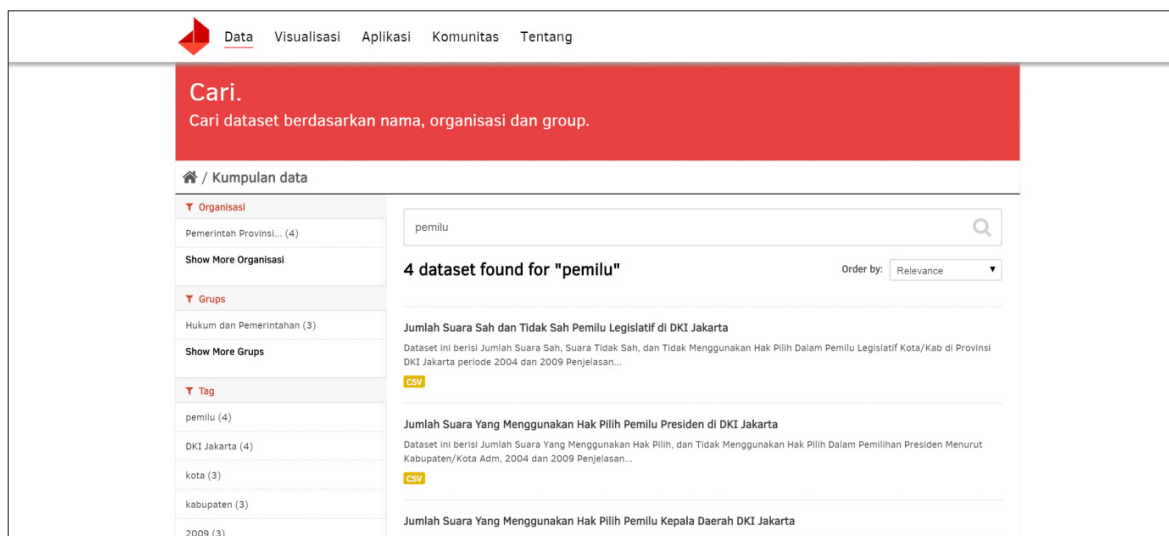
Cara lain mendapatkan data di internet, selain menggunakan mesin pencari, adalah melalui portal data. Portal data adalah sebuah situs internet yang menyediakan berbagai macam sumber secara terpusat. Saat ini, Indonesia pun sudah mempunyai sebuah portal data, yang bernama *data.go.id*. Portal ini dapat diakses di alamat <http://data.go.id>.

Untuk menggunakan portal data, mirip dengan Google. Cukup memasukkan kata kunci ke kotak pencari di tengah halaman *web*. Meski demikian, hingga saat ini, *data.go.id* belum ada fitur pencarian seperti Google Advanced Search.

GAMBAR 4.6: PORTAL DATA INDONESIA

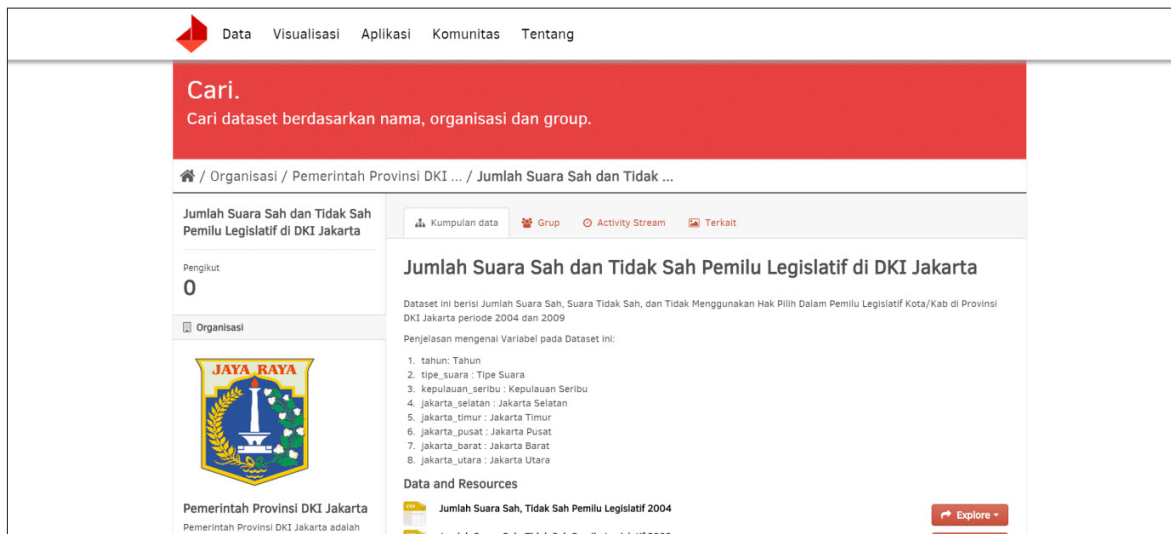


GAMBAR 4.7: PENCARIAN DENGAN KATA KUNCI "PEMILU" DI PORTAL DATA INDONESIA



Di portal *data.go.id*, kita bisa dengan mudah melihat langsung detail data. Semua yang ada di *data.go.id* dapat dipergunakan secara bebas. Namun, *data.go.id* telah dilengkapi lisensi *creative commons by attribution*. Itu berarti, boleh menggunakan data tersebut, asalkan menyebutkan *data.go.id* sebagai sumber data.

GAMBAR 4.8: PENCARIAN DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PEMILU LEGISLATIF DI DKI JAKARTA



Selain portal data Indonesia, ada beberapa portal serupa yang bisa dikunjungi:

- Untuk data pembangunan, bisa melihat portal data Bappenas di <http://datamart.bappenas.go.id>.
- Untuk data finansial, bisa melihat portal data Kemenkeu di <http://www.kemenkeu.go.id/katalogdata>.
- Untuk data pemilu, bisa melihat data KPU di <http://data.kpu.go.id> atau API Pemilu di <http://github.com/pemiluAPI/pemilu-data>.
- Untuk data sensus, bisa melihat data dari BPS <http://bps.go.id> atau data BNPB http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/data_profil_wilayah.jsp.

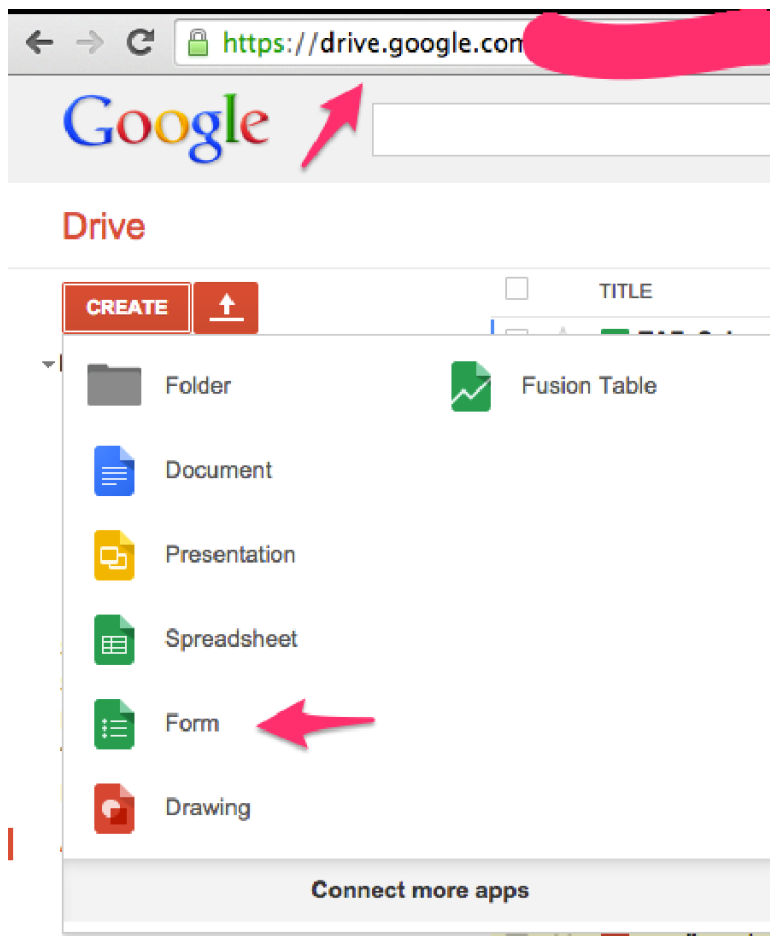
Sementara itu, untuk data luar negeri, situs yang bisa dikunjungi antara lain:

- Untuk indikator pembangunan, ada pusat data yang sangat lengkap yang dimiliki oleh Bank Dunia di <http://data.worldbank.org> dan ada satu pusat data terbuka yaitu di <http://datahub.io>.
- Data finansial, bisa dilihat di <http://openspending.org> dan <http://opencorporates.com>.
- Untuk data peta bisa dilihat di situs OpenStreetMap di <http://openstreetmap.org>.
- Untuk data pertanian bisa dilihat di situs FAO, <http://data.fao.org>.

4. MENGUMPULKAN DATA DENGAN SURVEI VIA GOOGLE FORMS

Cara lain memperoleh data adalah dengan mengumpulkan data sendiri. Salah satunya dengan membuat survei. Untuk membuat survei, selain dengan melakukan survei manual, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan survei melalui Google Forms.

GAMBAR 4.9: TAMPILAN GOOGLE FORMS



Google Forms dapat dibuat dengan membuka Google Drive di alamat <http://drive.google.com>. Setelah membuka Google Drive, klik tombol *create* di kiri atas, lalu pilih *form*. Setelah memilih *form*, akan muncul tampilan pembuatan Google Forms seperti pada gambar 4.10.

Pada tampilan seperti di gambar tersebut, kita dapat membuat *form* dengan mudah. Dapat ditambahkan pertanyaan baru seperti *multiple choice*, juga pertanyaan bebas dengan jawaban panjang dan pendek. Jika telah selesai, hanya perlu mengklik tombol *done* di bagian bawah, setelah itu akan muncul *form* yang bisa dibagi secara *online*. Form ini bisa diakses melalui komputer maupun *smartphone*.

GAMBAR 4.10: TAMPILAN PERTANYAAN DALAM GOOGLE FORMS

Form Feedback Pelatihan "Data Skills Fundamentals"

*** Required**

Nama Anda
Silahkan diisi jika Anda ingin dihubungi oleh kami kembali

Email Anda
Silahkan diisi jika Anda ingin dihubungi oleh kami kembali

No kontak Anda
Silahkan diisi jika Anda ingin dihubungi oleh kami kembali

Seberapa berguna pelatihan ini untuk Anda ? *

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju

Pelatihan ini berharga untuk saya

5. MENGUMPULKAN DATA DENGAN APLIKASI

Selain membuat survei *online via* Google Forms, kian berkembang penggunaan perangkat *smartphone* di masyarakat, membuka kesempatan dan sarana pengumpulan data, yakni melalui aplikasi Android/iOS. Kelebihan aplikasi-aplikasi jenis ini dibanding Google Forms adalah dapat mendeteksi lokasi pengguna *smartphone* secara otomatis, serta dapat menambahkan *flow* tersendiri dan pengecekan kesalahan saat pengambilan data. Contoh model aplikasi yang bisa mengambil data adalah “DPR Kita”, seperti pada gambar.

“DPR Kita” adalah aplikasi yang memiliki semangat dan tujuan untuk semakin mendekatkan hubungan antara anggota DPR dengan masyarakat di daerah pemilihannya, melalui komunikasi dua arah. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan para wakilnya di parlemen. Anggota DPR dapat menanggapi aspirasi masyarakat dan menyampaikan perkembangan terbaru dari aktivitasnya. Selain melalui Google Play Store, aplikasi ini dapat diakses melalui situs *dprkita.org*

GAMBAR 4.11: APLIKASI “DPR KITA”

AYO LEBIH DEKAT DENGAN WAKIL RAKYAT

DPR KITA

BERITA

INFOGRAFIK

ANDROID APP ON Google play

Sampaikan Aspirasimu Melalui DPR KITA

Download Aplikasi **DPR KITA**, Ikuti Perkembangan Informasi Para Wakil Rakyat dalam mewujudkan **Indonesia yang lebih Baik**

Download Apps: dprkita.org

- Developed and Collaborated With -

Lentera GATEWAY fraksiSelatan SELASAR BERSAMA SAMA PPS ICT API PERBU gits Indonesia

BAGIAN LIMA

Membersihkan Data

SETELAH data ditemukan, langkah selanjutnya adalah membersihkan dan menyiapkannya dalam bentuk yang bisa dibaca dan diproses komputer (*machine readable*). Proses ini harus memerhatikan konsep data yang bersifat manual, yaitu harus dilakukan pengecekan pada data, agar mampu menghasilkan format CSV yang sesuai dan dapat digunakan.

Ada beberapa jenis kesalahan pada data yang biasa muncul dan harus diperhatikan saat melakukan pembersihan data, yaitu:

- Salah ketik, semisal huruf m menjadi n, serta adanya versi berbeda dari data akibat perubahan kapital seperti pada kata “biru” dan “Biru”.
- Adanya *field* data yang kosong.
- Tiap baris dalam CSV hanya berisi satu set data.
- Adanya tipe yang tidak sama dalam satu kolom data, semisal “tujuh” dan “7”.
- Untuk mata uang, ada tipe mata uang yang tidak sama dalam satu kolom, semisal tipe Rupiah dan tipe Dolar Amerika.

1. KONVERSI DATA DARI FILE PDF MENJADI CSV DENGAN TABULA

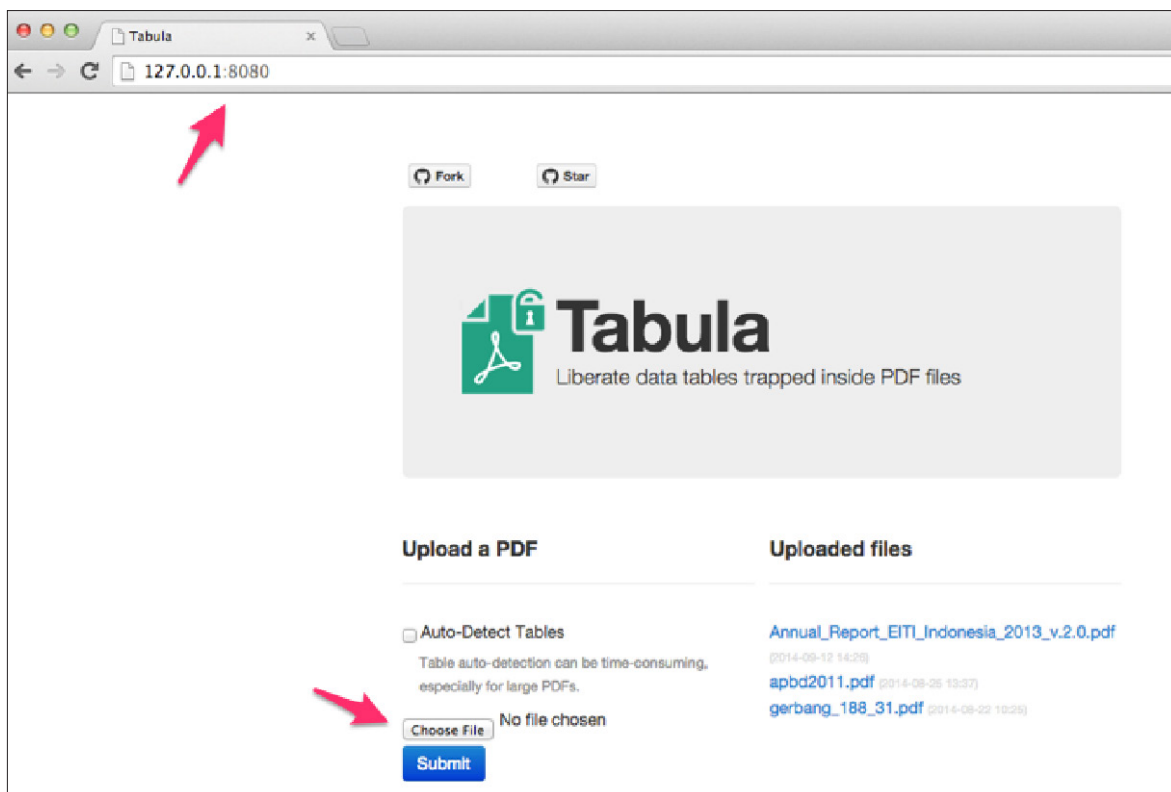
Dalam mencari data, sering ditemukan tipe tabel dalam bentuk PDF. Tabel berbentuk PDF dapat dikonversi langsung menjadi format CSV. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan *tools open source*, yaitu Tabula. Tabula adalah *tool* untuk mengonversi data tabular dari PDF yang tidak dikunci dan tidak ditulis tangan, kemudian mengubahnya menjadi CSV. Tabula bisa diunduh di alamat <http://tabula.technology>.

Tabula tersedia dalam dua sistem operasi, yakni, Windows dan Mac. Dapat diunduh dan digunakan gratis. Setelah mengunduh file instalasi Tabula dari situs di atas, selanjutnya lakukan penginstalan Tabula dengan melakukan klik terhadap file yang telah diunduh. Setelah file tersebut diunduh dan diinstal,

akan muncul aplikasi Tabula di komputer Anda. Untuk menjalankannya, cukup klik lagi aplikasi Tabula yang telah diinstal.

Aplikasi Tabula akan membuat *server* internet lokal di computer kita dan dapat kita akses menggunakan *browser* internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer. Bila browser tidak terbuka secara otomatis, silakan buka *browser* dan buka alamat *http://127.0.0.1:8080*.

GAMBAR 5.1: MENGUNDUH FILE KE TABULA



Setelah tampilan Tabula terbuka di *browser*, masuk ke *choose file* dan pilih file yang akan digunakan. File tersebut akan terbuka di Tabula. Setelah file terbuka, pilih bagian berisi tabel yang ingin dikonversi menjadi CSV dengan melakukan *drag mouse* pada tabel yang tersebut, seperti pada gambar berikut:

GAMBAR 5.2 DAN 5.3: TABEL JENIS PENDAPATAN DAERAH DAN PERSENTASE SUMBER PENDAPATAN DAERAH

RINGKASAN

I. PENDAPATAN DAERAH

Untuk tahun 2007-2011, rata-rata jumlah PAD hanya sekitar 17% dan Lain-lain pendapatan hanya 10% (Tabel 1) dari total pendapatan, sementara Dana Perimbangan (Daper) mencapai 73%. Persentase dan tren dari ketiga sumber pendapatan ini ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Chart 1.

Tabel 1. Jenis Pendapatan Daerah

Jenis Pendapatan	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata	%
Dalam milyar rupiah	267,869	364,875	393,089	403,041	442,235	374,222	100
PAD	35,546	64,746	67,457	71,852	87,674	65,455	17
DAPER	208,674	276,101	281,285	292,281	302,264	272,121	73
Lain-lain pendapatan	23,649	24,028	44,347	38,908	52,297	36,646	10

Tabel 2. Persentase Sumber Pendapatan Daerah

Jenis Pendapatan	2007	2008	2009	2010	2011
Persentase	100	100	100	100	100
PAD	13	18	17	18	20
DAPER	78	76	72	73	68
Lain-lain Pendapatan	9	7	11	10	12

Chart 1 memperlihatkan bahwa meskipun DAPER mempunyai proporsi paling besar, akan tetapi kecenderungannya semakin menurun dari tahun ke tahun. Jika di TA 2007 nilainya mencapai 78%, maka pada tahun-tahun sesudahnya semakin menurun hingga menjadi 68% di TA 2011. Kondisi sebaliknya terjadi untuk PAD, di mana nilai proporsinya cenderung mengalami kenaikan, dari 13% di TA 2007 menjadi 20% di TA 2011. Adapun untuk lain-lain pendapatan nilai proporsinya cenderung lebih berfluktuasi sepanjang TA 2007 hingga TA 2011, dengan nilai terendah sebesar 7% di TA 2008 dan nilai tertinggi sebesar 12% di TA 2011.

Selanjutnya, Tabula secara otomatis akan mengonversi tabel tersebut menjadi format CSV. Tapi, harus diingat bahwa Tabula masih dalam pengembangan, sehingga ada tabel yang bisa dikonversi, namun mungkin pula ada tabel yang tidak dapat dikonversi.

TABEL 5.1: TABULAR DATA YANG SUDAH DIKONVERSI

Extracted tabular data					
Jenis Pendapatan	2007	2008	2009	2010	2011
Persentase	100	100	100	100	100
PAD	13	18	17	18	20
DAPER	78	76	72	73	68
Lain-lain Pendapatan	9	7	11	10	12

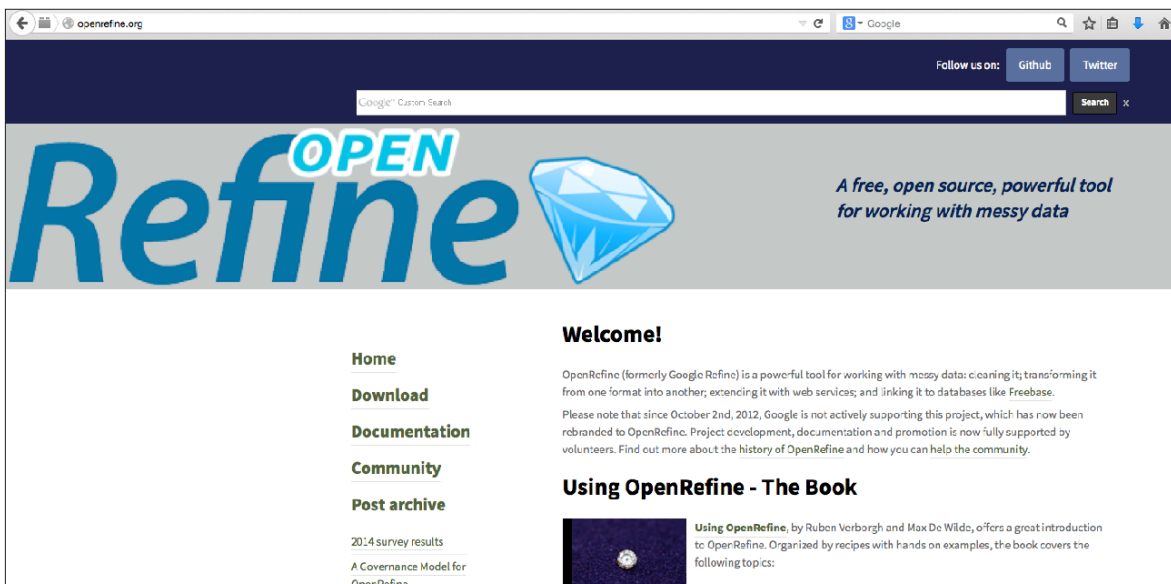
Extraction Method: Original Spreadsheet Close Copy to clipboard as CSV Download data

Tabel 2. Persentase Sumber Pendapatan Daerah

2.MEMBERSIHKAN DATA DENGAN TOOLS

Ada beberapa *tools* yang dapat digunakan untuk membersihkan data, yakni dengan melakukan pengolahan file CSV yang dapat dianggap sebagai sebuah *spreadsheet* seperti pada Excel atau Open Office dan Libre Office. Selain itu, ada *tools* gratis yang dapat digunakan, yakni Open Refine. Open Refine adalah *tools* yang dapat mencari baris/kolom apa saja yang kosong pada data, serta mampu mencari isian dalam baris/kolom yang salah ketik. *Tools* ini dapat diunduh secara gratis di <http://openrefine.org>.

GAMBAR 5.4: TAMPILAN OPEN REFINE



Open Refine tersedia untuk platform Windows, Mac, dan Linux.

BAGIAN ENAM

Analisis, Visualisasi, dan Publikasi

SETELAH membersihkan data, maka kegiatan lebih lanjut yang cukup krusial adalah melakukan proses analisis. Analisis penting dilakukan untuk mengetahui apakah data yang ada sudah mampu memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita miliki. Berikut ini beberapa tips dalam melakukan analisis data:

- Cek maksimum dan minimum untuk melihat data mana yang tertinggi dan terendah.
- Visualisasikan data tersebut dalam diagram agar dapat melihat perbandingannya dengan lebih mudah.
- Cek kemungkinan adanya korelasi dan hubungan yang saling memengaruhi di antara variabel-variabel yang ada dalam data.
- Perhatikan *outlier*, yaitu data yang suka muncul di luar distribusi normal. Kadang-kadang, dari data ini bisa muncul suatu sudut pandang yang menarik.
- Bila memiliki data *time-series*, coba dibuat diagramnya dan cek apakah ada waktu di mana data tersebut tiba-tiba bertindak di luar pola yang terjadi (seperti pola naik dan kemudian ada suatu waktu nilai data menjadi turun tiba-tiba).

A. MELAKUKAN VISUALISASI DATA

Setelah melakukan analisis data, diharapkan kita sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang kita miliki. Langkah selanjutnya, melakukan visualisasi terhadap jawaban tersebut, untuk membuatnya lebih menarik dan mudah dimengerti oleh orang lain.

B. KONSEP VISUALISASI DATA

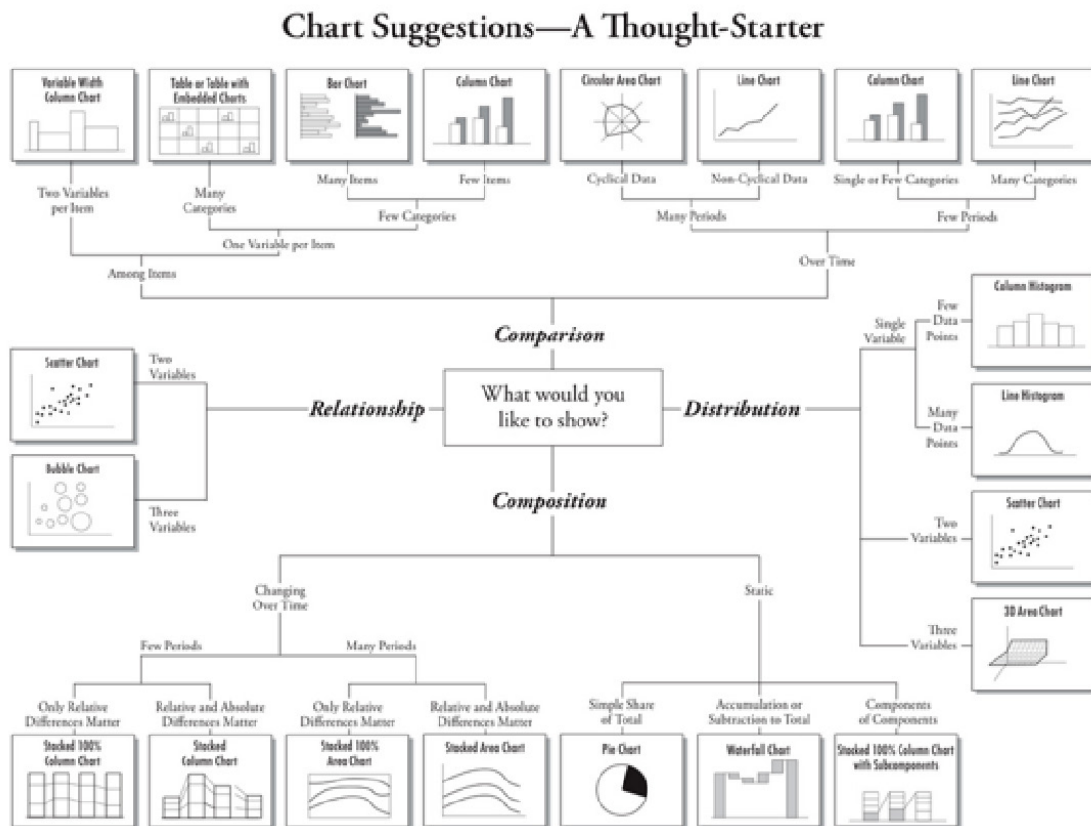
Dalam membuat visualisasi data, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- Tentukan tujuan visualisasi sebelum memulai pengerjaan. Yang termasuk dalam tujuan ini adalah target sasaran pengguna visualisasi, pesan yang ingin disampaikan, dan harapan apa yang diinginkan.
- Gunakan data yang tepat, yakni data yang tepat guna dan benar-benar dapat mencapai target sasaran visualisasi. Hindari menggunakan terlalu banyak data, dan hendaknya fokus kepada data yang benar-benar penting.
- Gunakan diagram yang tepat. Setiap diagram memiliki kegunaan dan kecocokan masing-masing dalam menampilkan data. Suatu data mungkin tidak cocok untuk dipresentasikan dalam diagram batang, namun cocok dipresentasikan dalam bentuk peta.
- Perhatikan estetika. Menambahkan elemen keindahan dalam membuat visualisasi itu sangat penting, agar lebih mudah dimengerti, lebih enak dilihat, dan menarik untuk penggunaannya. Elemen warna, bentuk, dan urutan dapat ditambahkan dalam visualisasi.
- Jangan lupakan evaluasi. Visualisasi tidak hanya sekali dilakukan, serta bersifat iteratif. Setelah selesai membuat visualisasi, sebaiknya lakukan evaluasi dan cek apakah telah mencapai tujuan atau tidak. Jika belum, maka hendaknya visualisasi direvisi dengan mengambil *feedback* dari pengguna.

C. JENIS-JENIS VISUALISASI DATA

Dalam pembuatan visualisasi data, ada beberapa jenis diagram yang bisa digunakan. Setiap jenis diagram memiliki kecocokannya sendiri dalam menggambarkan hubungan antardata. Sebagai contoh, diagram batang cocok untuk menunjukkan keterhubungan komparasi nilai data dan diagram *pie* cocok untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Diagram-diagram tersebut adalah:

GAMBAR 6.1: DIAGRAM PETA PIKIRAN VISUALISASI DATA



TABEL 6.1: PETUNJUK VISUALISASI DATA

Kita ingin menunjukkan..	Jenis diagram
Untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan	Diagram pie
Untuk komparasi nilai dari bagian yang berbeda-beda	Diagram batang
Untuk mengikuti perubahan nilai terhadap waktu (time series)	Diagram garis
Untuk menunjukkan interaksi di antara 2 titik	Scatterplot
Untuk menunjukkan data yang berkaitan dengan lokasi	Peta

Visualisasi data dengan infografis sudah banyak dibuat. Infografis menggabungkan informasi dengan grafis, sehingga dalam infografis tidak hanya disediakan grafis saja, namun disertai informasi (penjelasan) mengenai grafis tersebut. Informasi-informasi tambahan menjadi satu kesatuan cerita yang lengkap. Contoh dari infografis adalah sebagai berikut:

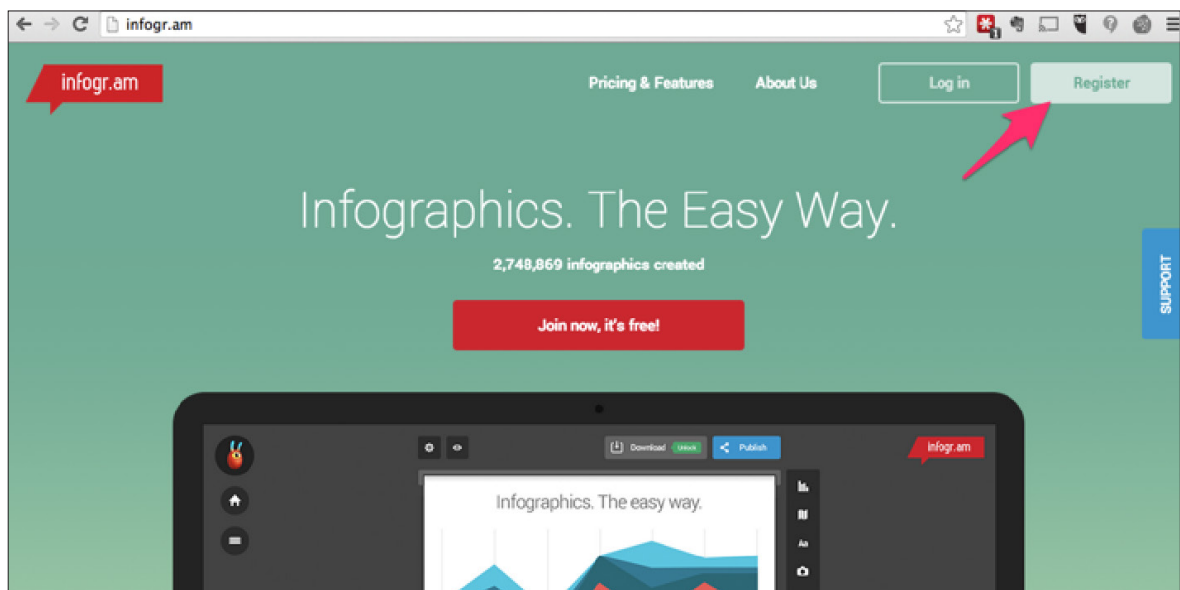
GAMBAR 6.2: INFOGRAFIS MENGHADAPI BENCANA ALAM



D. VISUALISASI DATA MENGGUNAKAN INFOGR.AM

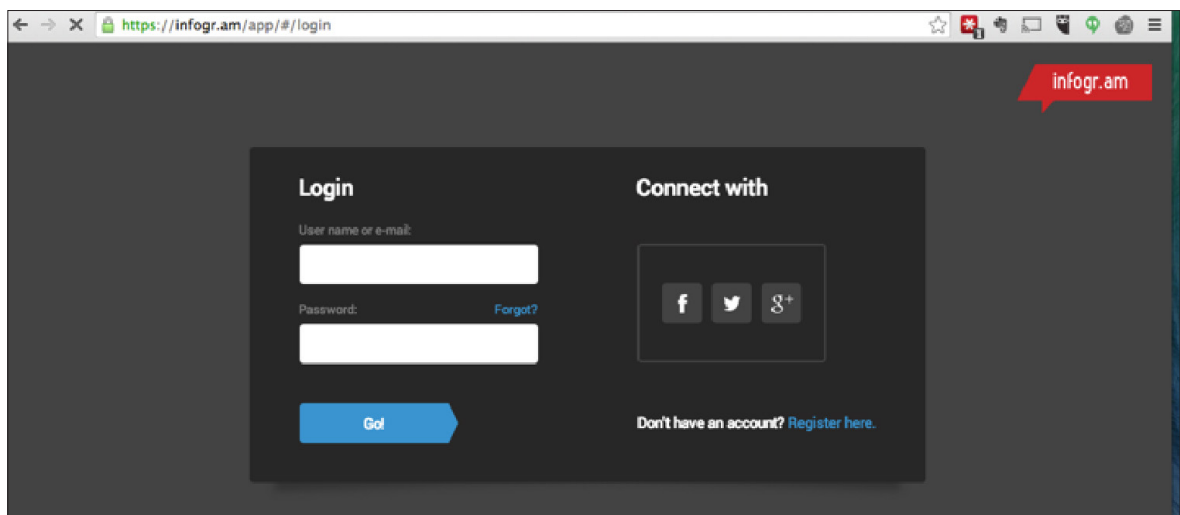
Infogr.am merupakan salah satu situs *web* penyedia layanan pembuatan yang bersifat *freemium*. Layanannya dapat dinikmati secara gratis, namun untuk beberapa fitur tambahan harus membayar dan menjadi anggota premium. Layanan yang disediakan oleh Infogr.am berfokus pada pembuatan diagram dan infografis *online* yang bisa diunduh dan dimasukkan ke dalam dokumen maupun dicetak. Infogr.am dapat diakses melalui alamat <http://infogr.am>.

GAMBAR 6.3: TAMPILAN INFOGR.AM



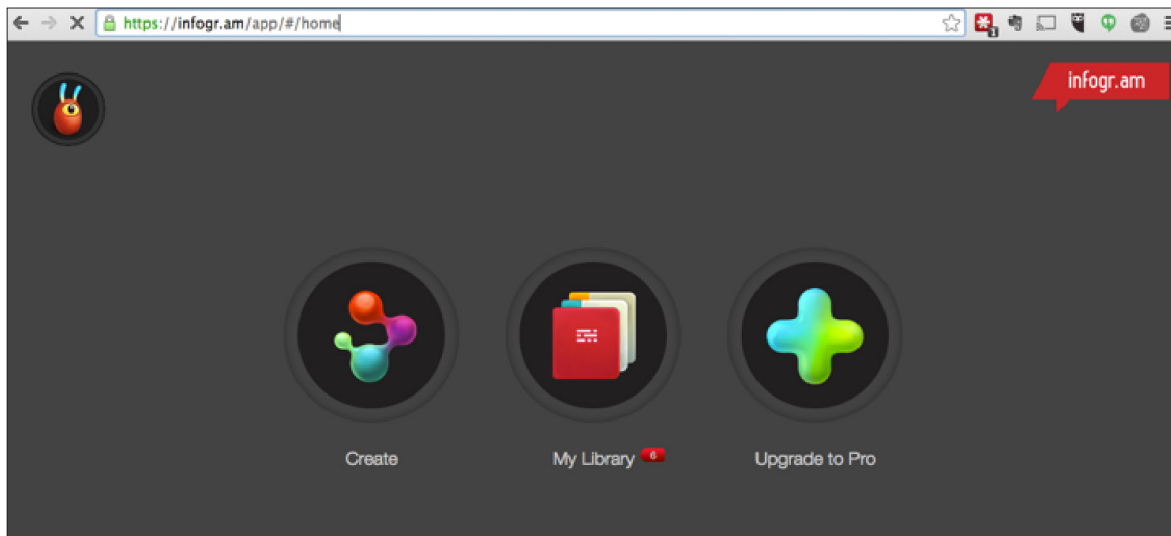
Setelah membuka halaman *web*, yang pertama harus dilakukan adalah mendaftarkan menggunakan *email* atau akun sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Google+.

GAMBAR 6.4: TAMPILAN REGISTRASI INFOGR.AM



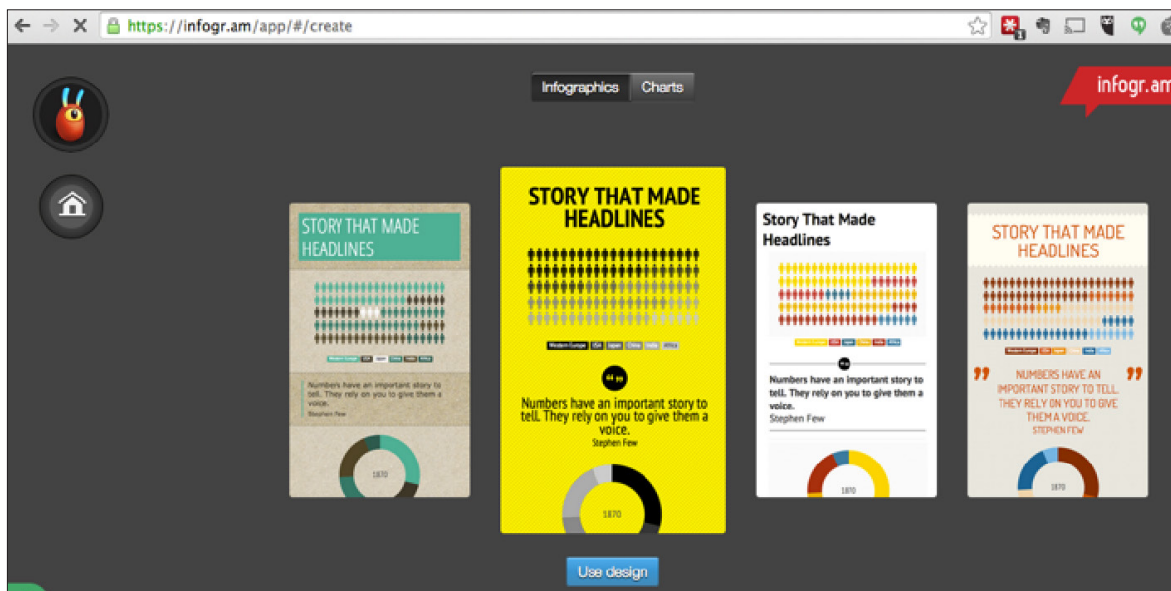
Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman utama Infogr.am. Akan tersedia pilihan membuat desain baru atau melihat desain yang telah ada, serta pilihan melakukan peningkatan ke versi berbayar. Pilih *create* untuk membuat sebuah diagram baru.

GAMBAR 6.5: PEMBUATAN DIAGRAM INFOGR.AM



Setelah memilih *create*, selanjutnya pilih *template* desain yang akan digunakan. Infogr.am memiliki banyak sekali *template*, tapi variasinya sedikit dan lebih terfokus ke perbedaan desain warna.

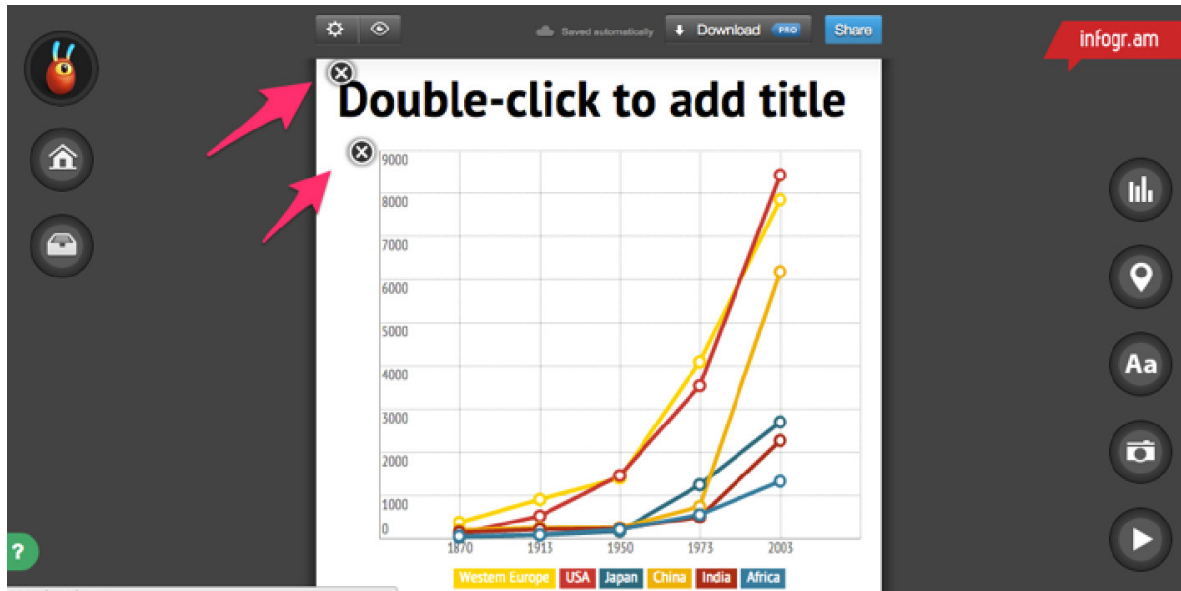
GAMBAR 6.6: DESAIN INFOGR.AM



Setelah memilih desain, akan muncul tampilan yang dipilih berikut grafik, sebagai langkah awal pada desain yang akan diedit. Pengeditan dapat dilakukan pada grafik, baik judul maupun pada grafik itu sendiri. Klik pada gambar

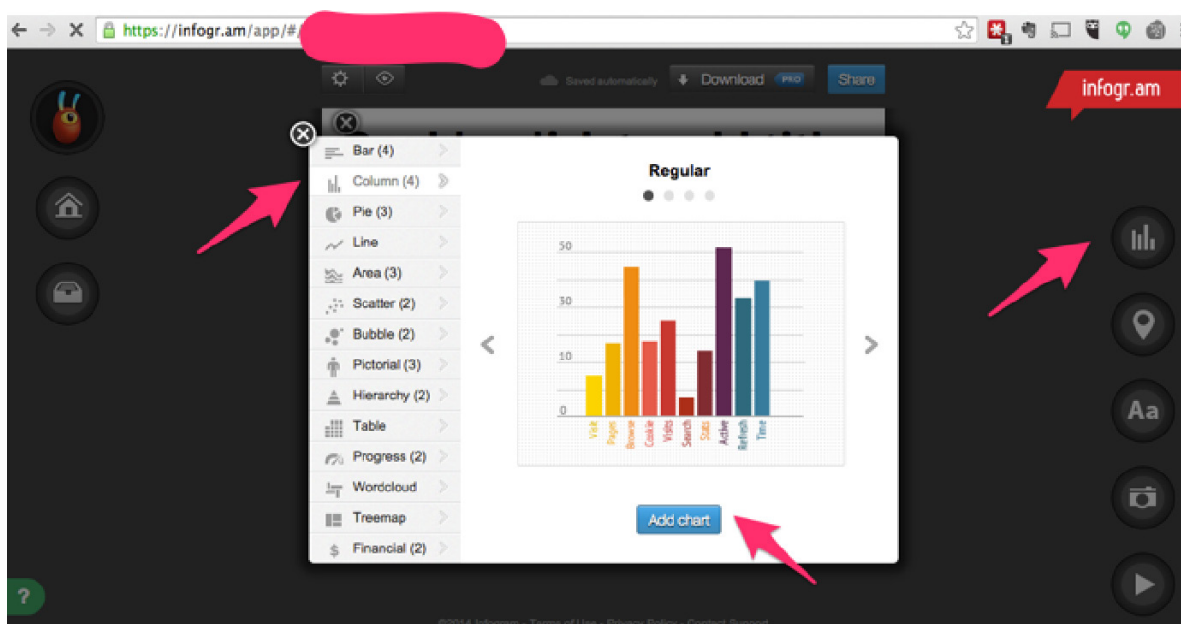
diagram di samping kanan untuk menambahkan diagram baru.

GAMBAR 6.7: MODIFIKASI DIAGRAM INFOGR.AM



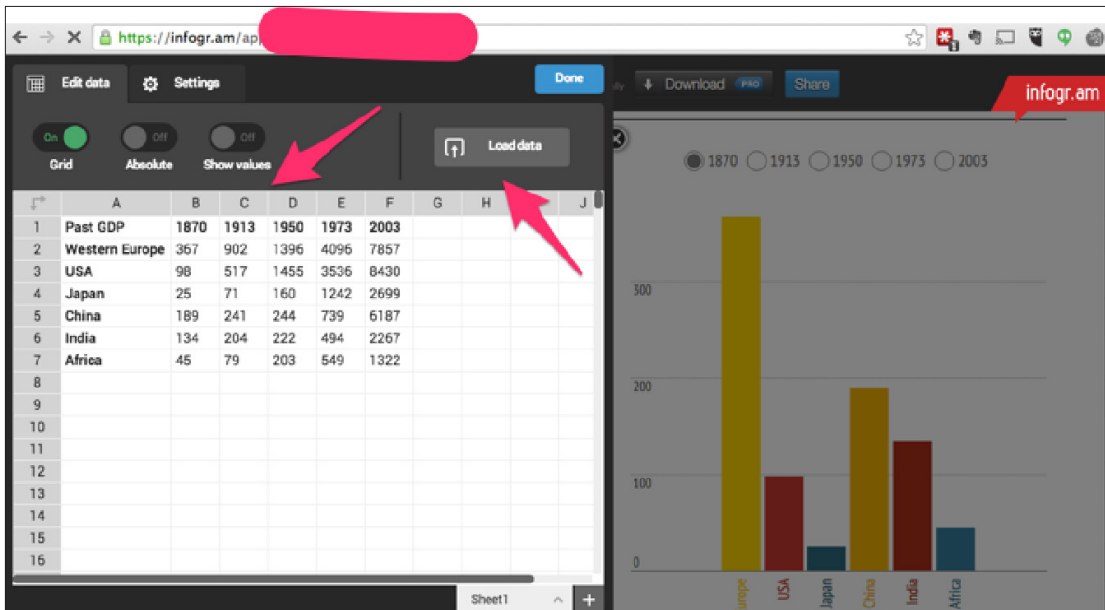
Setelah mengeklik, akan muncul tampilan berbagai jenis diagram yang dapat dibuat dalam Infogr.am. Untuk menambahkan suatu diagram, hanya perlu mengeklik tombol *add chart* yang ada di bawah diagram yang diinginkan.

GAMBAR 6.8: PEMBUATAN DIAGRAM MELALUI INFOGR.AM



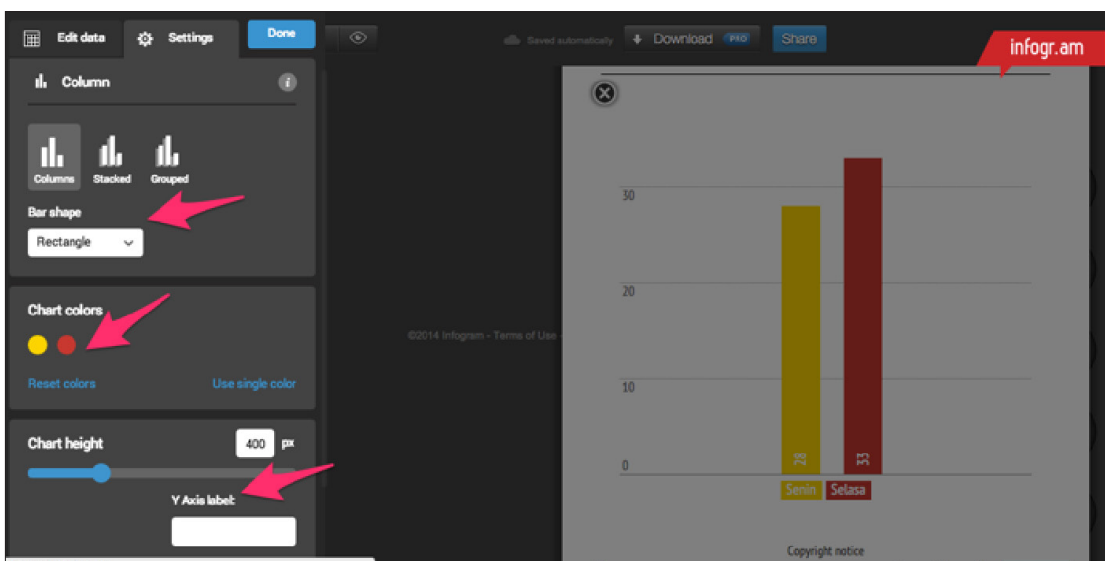
Untuk melakukan pengeditan terhadap data yang divisualisasi dengan diagram, hanya perlu melakukan double klik. Selanjutnya, akan ada pilihan pengeditan data.

GAMBAR 6.9: PENGEDITAN DATA



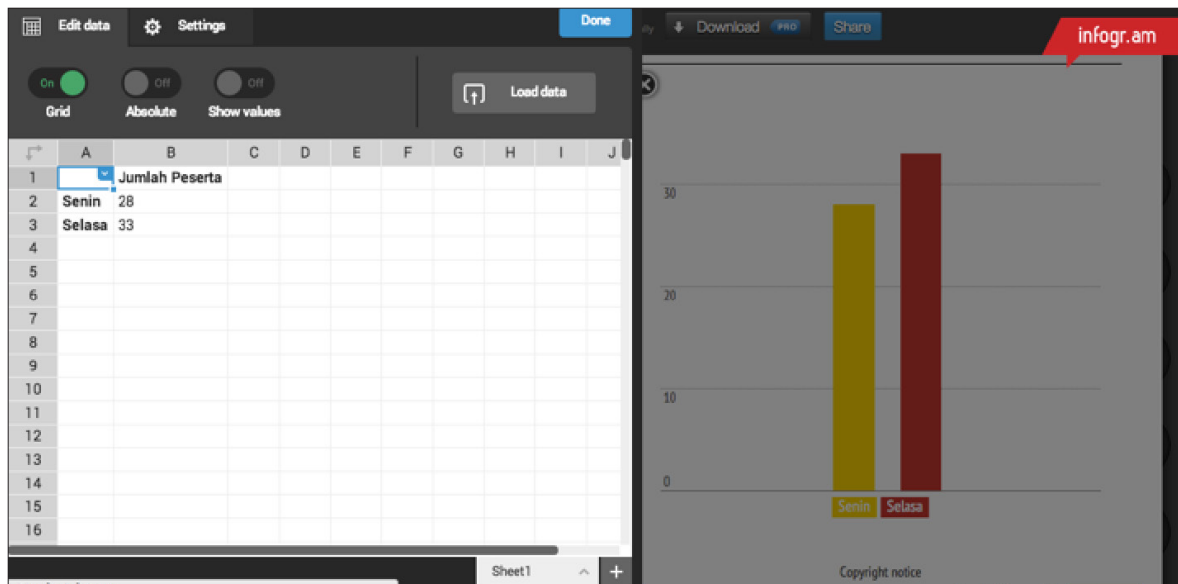
Data dapat diubah sesuai keinginan, atau membuka yang sudah disimpan sebelumnya dalam format Excel maupun CSV. Selain itu, dapat dikoneksikan dengan Google Spreadsheet sebagai sumber data.

GAMBAR 6.10: DATA DAPAT DIUBAH



Semua data yang diubah, langsung dimunculkan dalam tampilan diagram secara cepat, sehingga dapat langsung dilihat hasilnya. Selain itu, dapat pula dilakukan pengubahan warna diagram.

GAMBAR 6.11: DATA YANG SUDAH DIBUAT DAPAT DIGANTI WARNANYA

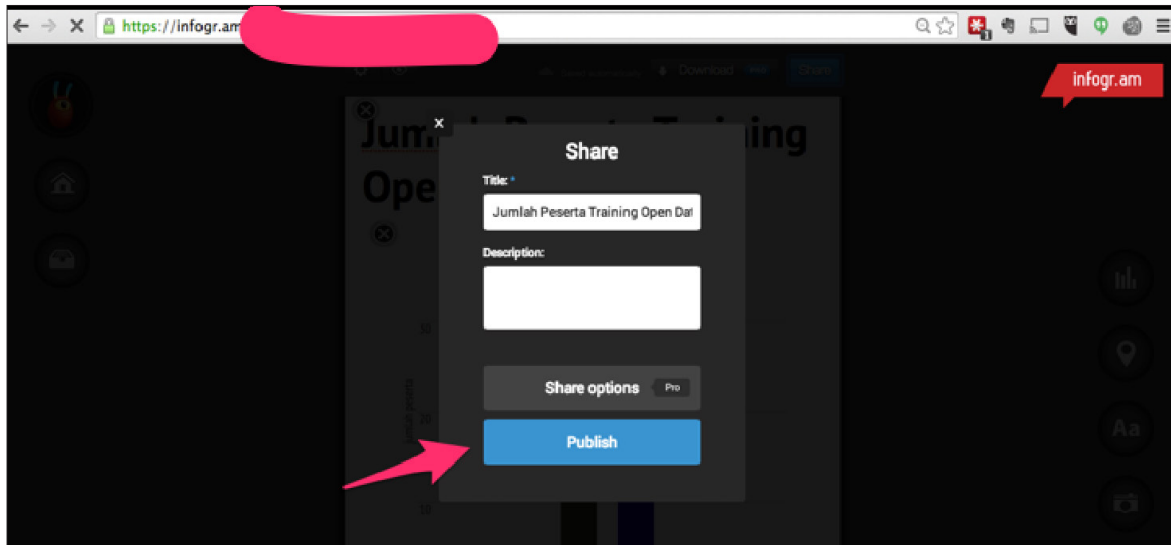


Setelah melihat hasilnya dan puas dengan perubahan yang ada, selanjutnya diagram tersebut dipublikasikan. Tujuannya agar bisa diakses via *web* maupun diletakkan di situs *web* yang kita miliki, atau dibagikan ke media sosial seperti Facebook atau Twitter.

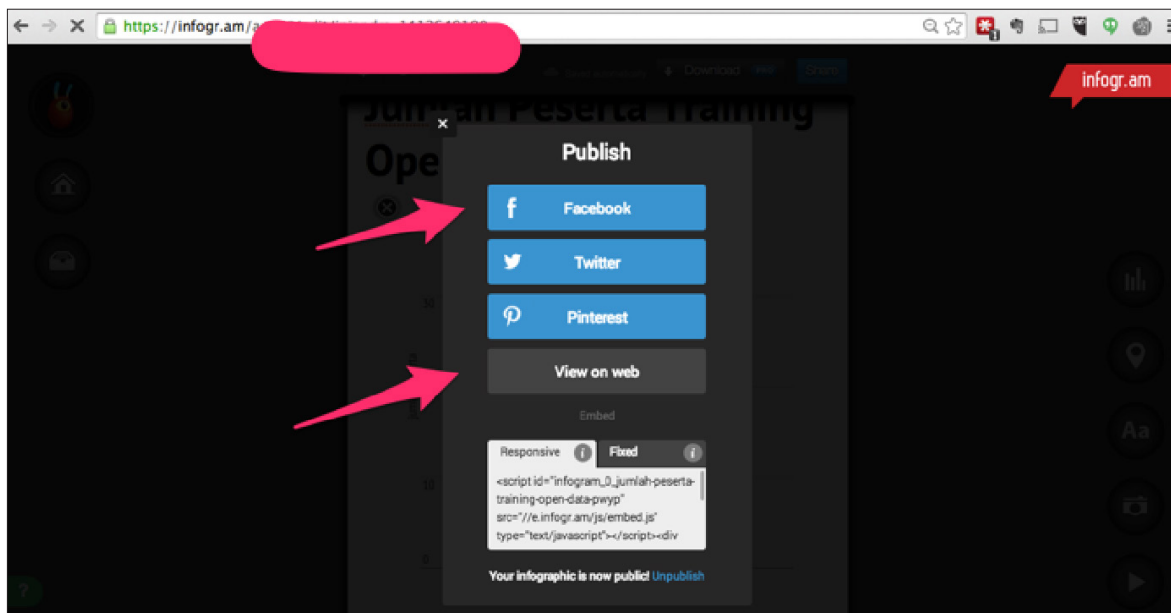
GAMBAR 6.12: DATA SIAP DIPUBLIKASI KE MEDIA SOSIAL



GAMBAR 6.13: DATA SIAP DIPUBLIKASI KE MEDIA SOSIAL



GAMBAR 6.14: DATA SIAP DIPUBLIKASI KE MEDIA SOSIAL



E. VISUALISASI DATA MENGGUNAKAN PIKTOCHART

Mirip dengan Infogr.am, Piktochart adalah situs *web* yang bersifat *freemium*, dengan beberapa layanan gratis dan berbayar. Tapi, berbeda dengan Infogr.am, layanan Piktochart lebih fokus pada pembuatan infografis yang panjang, untuk menceritakan suatu hal. Berbeda dengan Infogr.am yang hanya menyediakan *template* untuk diagram dan infografis pendek dan sederhana. Piktochart menyediakan lebih banyak *template* infografis yang mungkin lebih cocok untuk

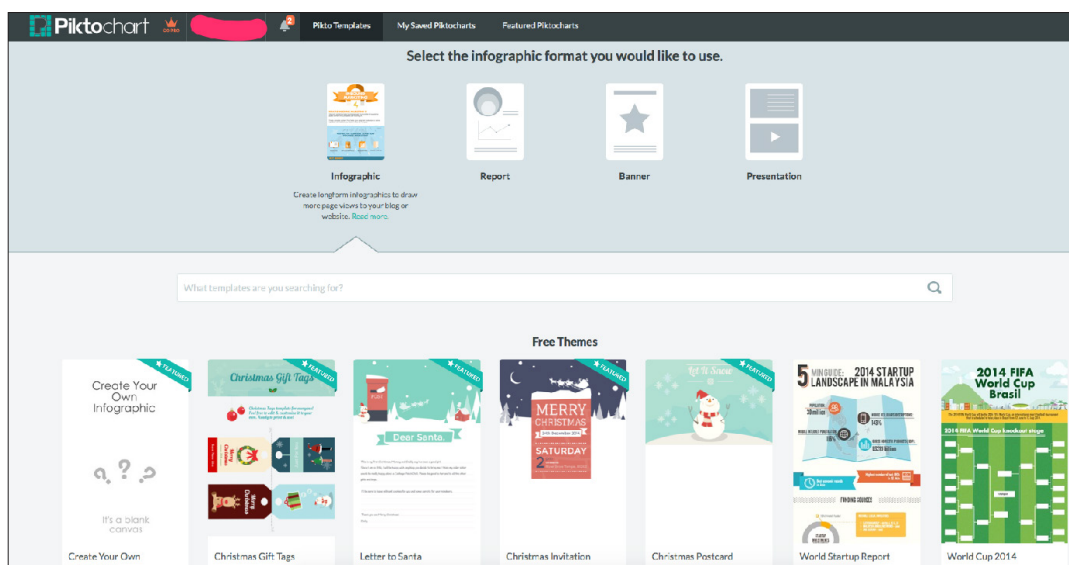
poster maupun infografis panjang. Kita dapat mengakses Piktochart melalui alamat <http://www.piktochart.com>.

GAMBAR 6.15: MENDAFTAR DI SITUS PIKTOCHART



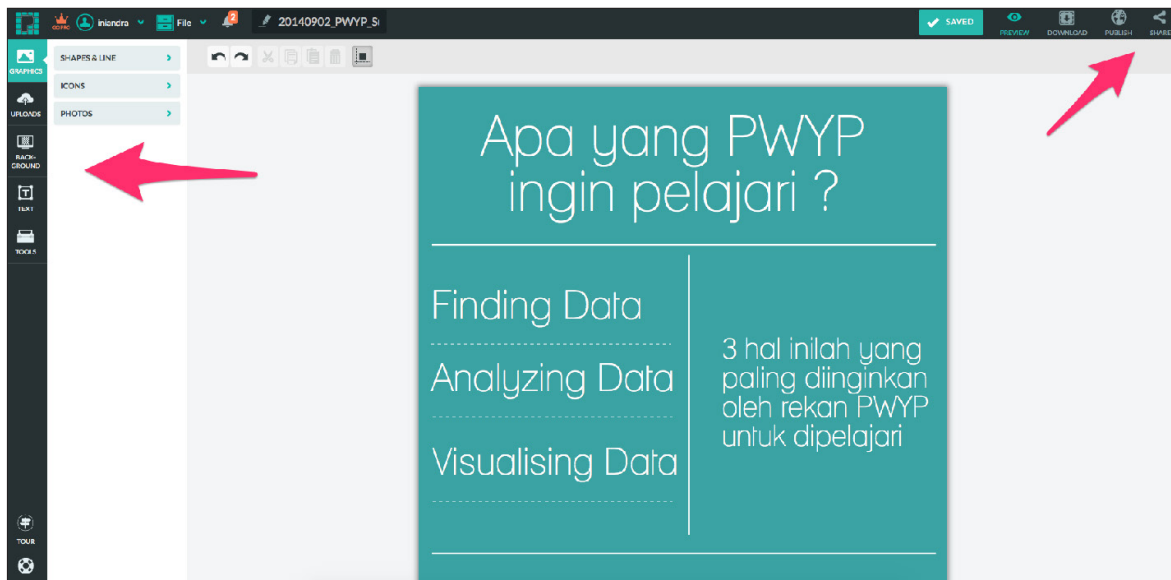
Untuk membuka halaman Piktochart, perlu lebih dulu melakukan *sign up*. Untuk mendaftar, caranya mirip dengan infogr.am, yaitu bisa menggunakan *email* maupun akun sosial media. Setelah mendaftar, kita akan langsung disambut dengan tampilan-tampilan *template* dari Piktochart.

GAMBAR 6.16: MEMILIH TEMPLATE



Setelah memilih *template*, selanjutnya akan masuk ke tampilan detail. Sebuah desain dapat dibagi menjadi banyak blok, dan kita bisa melakukan perubahan pada blok-blok itu.

GAMBAR 6.17: PUBLIKASI DATA



Mirip dengan Infogr.am, setelah pengeditan, infografis dapat dipublikasikan secara *online* di *web* dan bisa pula dibagikan di media sosial seperti Facebook dan Twitter.

BAGIAN TUJUH

Regulasi Keterbukaan Informasi di Indonesia

KETERBUKAAN informasi di Indonesia bermula dari keinginan berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, akan adanya sebuah peraturan perundangan yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mudah. Dalam perjalanannya, sebuah *milestone* tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada 30 April 2008, oleh presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang yang berlaku dua tahun sejak diundangkan tersebut menganut prinsip bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana bagi publik untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan negara. Bersamaan dengan itu, turut dibentuk Komisi Informasi yang bertugas menjalankan undang-undang tersebut, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi melalui jalur mediasi.

Sesuai dengan isi undang-undang tersebut, pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang dengan cepat, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana. Badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, sepanjang bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Jika terdapat hambatan dalam memperoleh informasi publik yang diminta, setiap orang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan keberadaan undang-undang ini, peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, penyelenggaraan negara, dan pengelolaan badan publik, dapat ditingkatkan.

Terdapat tiga jenis informasi publik yang harus disediakan:

1. Informasi yang “wajib disediakan dan diumumkan secara berkala”, meliputi kegiatan, kinerja, dan keuangan badan public, yang diumumkan minimal enam bulan sekali.
2. Informasi yang “wajib diumumkan secara sertamerta”, meliputi informasi

yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

3. Informasi yang “wajib tersedia setiap saat”, meliputi daftar informasi publik, kebijakan, rencana kerja, dan perjanjian yang dilaksanakan oleh badan publik.

Prinsip *open data* atau data terbuka pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Informasi yang sudah dinyatakan sebagai informasi publik dapat digunakan dan disebarluaskan kembali sepanjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu, dan partai politik termasuk dalam badan publik. Sebab fungsi dan tugas pokok lembaga-lembaga ini berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut, badan publik wajib memiliki standar layanan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) selaku penanggung jawab.

Mengingat cakupan informasi publik sesuai peraturan-peraturan tersebut masih bersifat luas, dialog antara Komisi Informasi Pusat dengan KPU telah menghasilkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum. Informasi pemilu didefinisikan sebagai informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diterima, dan dikirim oleh penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Tahapan dimaksud mencakup pileg, pilpres, dan pilkada. Peraturan tersebut ditegaskan lebih lanjut melalui Surat Ketua KPU No 44/ 2015 yang meminta setiap KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota merkapitulasi permohonan informasi publik sepanjang tahun 2014 dan memublikasikannya melalui *website* resmi masing-masing.

BAGIAN DELAPAN

Informasi Publik dan Data Terbuka KPU

KPU tak pernah membuat lomba *Hackathon* atau sejenisnya. Begitu pula dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Tapi, dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Ruli Manurung, menilai lain. “Sepertinya, tanpa disadari, KPU telah membantu menyelenggarakan *Hackathon* 12 hari yang paling dahsyat sepanjang sejarah!” tulis Ruli, yang intensif memonitor pergerakan teknologi informasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014. Tentang *Hackathon* ditulis di bab berikutnya.

Gagasan data terbuka (*open data*) melalui publikasi hasil pindai formulir model C1, DA1, dan DB1, telah memicu banyak orang terlibat aktif mengawal proses penghitungan suara. Formulir C1 berisi data hasil penghitungan suara tingkat TPS; formulir DA1 berisi data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan; formulir DB1 berisi data hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

Data terbuka di KPU tidak muncul begitu saja. Sejak dilantik pada 2012, komisioner KPU telah menyiapkan seperangkat sarana dan prasarana untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menyatakan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu, akan membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

Layanan *open data* KPU menggunakan pencarian informasi berdasarkan nomor ID:

1. *Open Data* Pemilih: <http://data.kpu.go.id>.
2. *Open Data* Dapil: <http://dapil.kpu.go.id>.
3. *Open Data* Caleg: <http://caleg.kpu.go.id>.
4. *Open Data* TPS: <http://tps.kpu.go.id>.
5. *Open Data* Partai: <http://partai.kpu.go.id>.
6. *Open Data* C1: <http://pemilu2014.kpu.go.id> dan <http://pilpres2014.kpu.go.id/>.

A. SIDALIH

KPU memberikan pembekalan pelatihan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) pada akhir 2012. Awalnya diberikan kepada komisioner KPU provinsi dan stafnya, setelah itu KPU provinsi memberikan pembekalan dan pelatihan yang sama kepada KPU kabupaten/kota.

Sidalih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data pemilih. Basis data pemilih ini berada di KPU kabupaten/kota. Proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dari bawah, dari rumah ke rumah, oleh petugas pemutakhiran data. Dari tingkat bawah, pemutakhiran berlanjut hingga saat operator memasukkan data itu ke aplikasi Sidalih.

Pada pemilu sebelumnya, proses pemutakhiran daftar pemilih sering tidak berjalan baik. Pada setiap tahapan pemutakhiran, tidak ada perubahan signifikan pada jumlah pemilih. Padahal, seperti diketahui, selalu ada yang tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pemilih karena telah meninggal, tercatat ganda, pindah domisili, atau telah alih status sebagai anggota TNI/Polri. Masih bercokolnya pemilih yang tidak memenuhi syarat ini di dalam daftar pemilih, kelak akan berpengaruh pada jumlah/tingkat partisipasi. Sebab, pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut akan tetap dihitung sebagai orang yang tidak datang ke TPS, sehingga memengaruhi perbandingan jumlah pemilih terdaftar yang datang ke TPS dengan yang tidak datang ke TPS.

Nah, dengan adanya Sidalih, setiap perkembangan data pemilih dapat diketahui secara *online*. Memang banyak tantangan menyelesaikan pekerjaan dengan sistem *online*, saat hampir semua petugas operator Sidalih bekerja di seluruh Indonesia. Jaringan internet yang kurang memadai, tentunya akan sangat berpengaruh pada hasil yang ingin dicapai. Namun, semua itu dapat dilalui, sehingga setiap perubahan yang diinput maupun diubah oleh petugas operator, terekam dalam jaringan.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, terlibat aktif dan terus melakukan monitoring, serta merespons secara *online* setiap ada permasalahan terkait dengan sistem ini. “Sidalih adalah sistem resmi yang kita gunakan dalam menyusun dan mengolah data pemilih Pemilu 2014. KPU seluruh Indonesia wajib menggunakan sistem ini,” demikian Hadar Nafis Gumay, saat menjelaskan tentang Sidalih.

Dalam menjalankan Sidalih, peran KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berbeda-beda, sesuai tingkatannya. Aplikasi ini diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri. Semua tahapan pemutakhiran menggunakan sistem ini, mulai saat menyusun daftar pemilih, daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), DPSHP akhir, daftar pemilih tetap (DPT), maupun daftar pemilih khusus (DPK).

Setiap proses ini dijalankan melalui rapat pleno terbuka di setiap tingkatan. Rapat ini mengundang peserta pemilu, pengawas, dan instansi terkait. Selanjutnya, peserta pemilu dan pengawas mendapatkan salinan *softcopy* dalam cakram padat dengan format PDF, yang tidak bisa diubah. Inilah data tertutup/terkunci yang diberikan KPU, agar peserta pemilu dan pengawas mencermati, serta memberikan masukan serta saran tentang daftar pemilih yang telah disusun. Daftar pemilih ini juga diumumkan di ruang publik yang mudah dijangkau, di setiap desa/kelurahan.

Inovasi Sidalih untuk keterbukaan informasi telah memberikan akses kepada publik untuk mengecek namanya secara *online*, apakah sudah terdaftar atau belum. Publik dapat mengeceknya melalui menu pencarian, seperti di <http://data.kpu.go.id/ss8.php>. Di jendela kiri alamat tersebut terdapat menu “Pencarian Nasional” dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

GAMBAR 8.1: MENU PENCARIAN DATA PEMILIH

Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Pilpres

Provinsi	Jml. TPS	Jumlah Pemilih			Total	Tanggal Lahir Nihil (%)	Status Kawin Nihil (%)	Di Bawah Umur /Belum Kawin (%)
		L	P	Nihil (%)				
1. ACEH	9.508	1.642.352	1.688.367	0	3.330.719	0	0	0
2. BALI	5.939	1.460.080	1.482.202	0	2.942.282	0	0	0
3. BANTEN	17.693	4.057.530	3.928.069	0	7.985.599	0	0	0
4. BENGKULU	4.220	702.759	676.308	0	1.379.067	0	0	1 (0,00)
5. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	8.354	1.333.925	1.418.350	0	2.752.275	1 (0,00)	6 (0,00)	0
6. DKI JAKARTA	12.408	3.581.723	3.488.752	0	7.070.475	0	0	0
7. GORONTALO	1.932	395.853	398.597	0	794.450	0	0	0

Setelah memasukkan NIK dengan benar, selanjutnya akan muncul kolom lokasi TPS, nomor TPS, NIK, nama, jenis kelamin, kelurahan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Dengan adanya data pemilih dalam aplikasi Sidalih, KPU Pohnuato kemudian mengembangkan Short Message Service (SMS) Center untuk pengecekan nama pemilih dan lokasi TPS di Provinsi Gorontalo. Layanan pesan singkat ini menggunakan basis data pemilih CSV yang ada di portal Sidalih kabupaten/kota.

GAMBAR 8.2: SITUS WEB KPU PROVINSI BALI.



SMS Center menggunakan satu komputer sebagai server, satu modem, dan sim card. Data CSV dimasukkan ke server SMS Center, dan mesin akan

menjawab sesuai format, dengan menggunakan NIK. SMS Center untuk keperluan penyebaran informasi cocok untuk lokasi-lokasi dengan jaringan internet belum memadai. Informasi setiap tahapan pemilu pun bisa disebar melalui SMS Center.

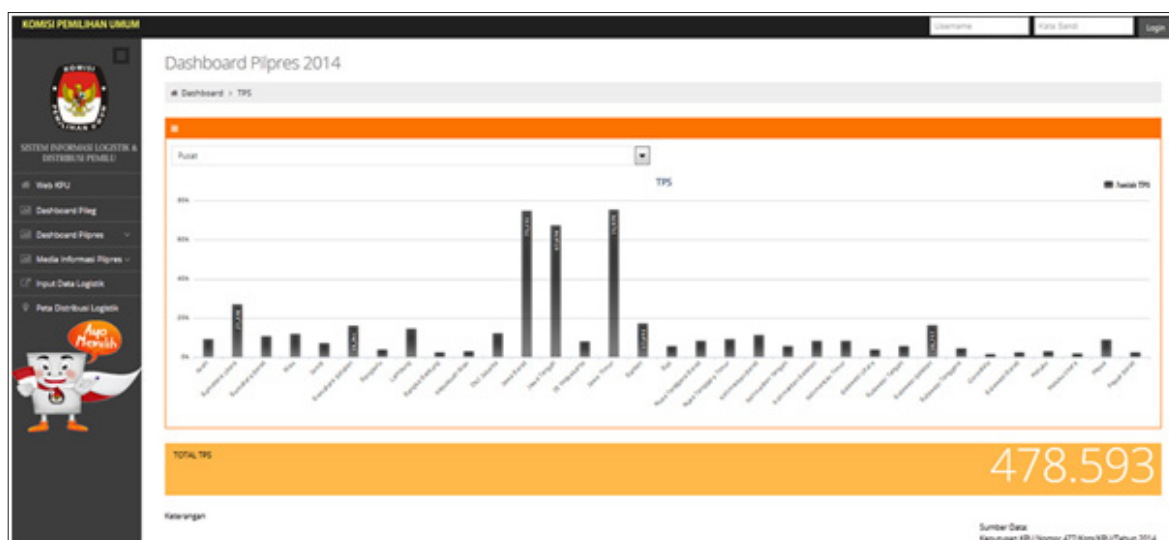
Selain di Gorontalo, KPU Provinsi Bali juga mengembangkan aplikasi SMS Center untuk informasi data pemilih. Selain itu, KPU Provinsi Bali juga mengembangkan fasilitas pencarian secara *online*. Informasi yang sering dicari di situs KPU Bali, <http://www.kpud-baliprov.go.id>, antara lain adalah data pemilih, jumlah TPS, dan alamat TPS.

Sidalih (dan Sistem Penghitungan Suara [Situng]) dikembangkan KPU bekerja sama dengan Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom UI).

B. SILOG

Sistem Informasi Logistik (Silog) pada Pemilu 2014 sangat membantu menekan tertukarnya surat suara. Melalui sistem ini, pengadaan dan distribusi logistik pemilu menjadi tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan menghemat anggaran. Pengadaan dan distribusi logistik dijalankan secara terbuka, sehingga publik dapat melakukan pengawasan lebih efektif. Silog dikembangkan KPU bekerja sama dengan ITB dan BIGs.

GAMBAR 8.3: DASHBOARD SILOG



Pada Pemilu 2004 lalu, kasus surat suara tertukar cukup massif. Surat suara tertukar tidak hanya antarprovinsi, tapi juga antarpulau. Pada Pemilu 2009,

surat suara tertukar antarpulau berkurang, tapi surat suara tertukar di tingkat regional masih cukup banyak. Pada Pemilu 2014, surat suara tertukar lebih banyak terjadi antardaerah pemilihan (dapil) di kabupaten/kota yang sama. Namun, kasus surat suara tertukar antardapil di tingkat provinsi dan pusat, jumlahnya sangat kecil.

C. SIDAPIL

Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil) dibuat untuk memberikan informasi tentang daerah pemilihan Pemilu 2014. Mulai dapil anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota.

GAMBAR 8.4: PORTAL DAPIL



D. SILON

Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dapat dilihat melalui portal <http://caleg.kpu.go.id>. *Open data* ini menyajikan daftar nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan daerah pemilihan. Dengan membuka alamat ini, akan diketahui siapa saja caleg pada Pemilu 2014.

GAMBAR 8.5: PORTAL CALEG



E. ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 2014-2019

Untuk mengetahui siapa saja calon terpilih anggota DPR dan DPD pada Pemilu 2014, KPU menyajikan datanya di alamat <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/387>.

Daftar nama 10 partai politik yang menjadi kendaraan anggota DPR adalah:

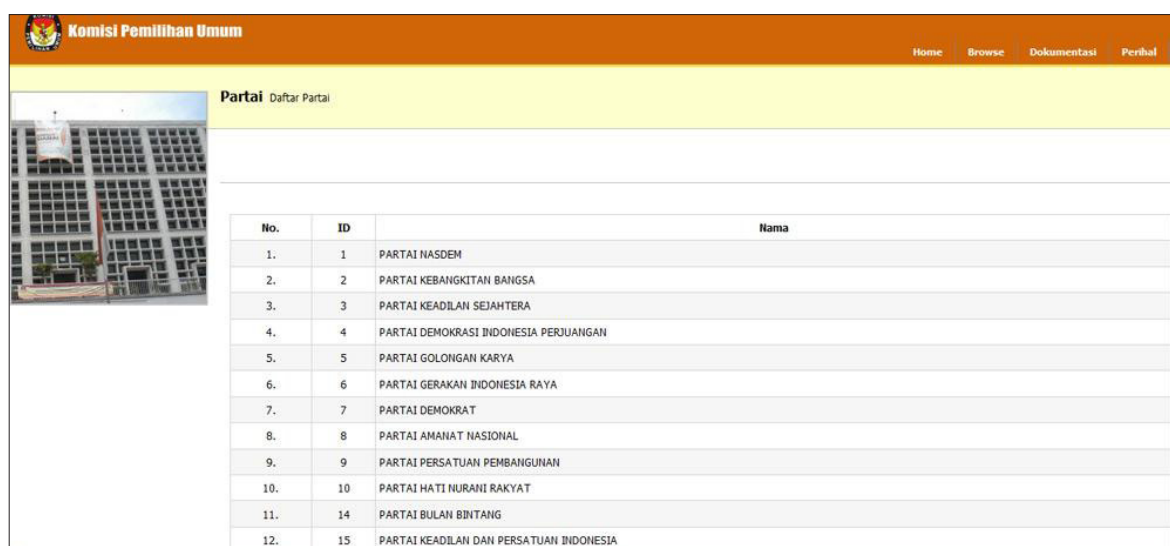
1. Partai NasDem
2. Partai Kebangkitan Bangsa
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Partai Golkar
6. Partai Gerakan Indonesia Raya
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Hati Nurani Rakyat

Adapun daftar anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat dilihat melalui alamat <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/349>.

F. SIPOL

Undang-undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa untuk menguatkan demokrasi dan menciptakan sistem kepartaian yang efektif—sesuai amanat UUD 1945— diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Salah satu sarana untuk mewujudkannya dalam proses verifikasi partai politik oleh KPU adalah dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hanya saja, Sipol ini mendapat tentangan saat KPU melakukan verifikasi partai politik pada 2012 lalu.

GAMBAR 8.6: PORTAL DAFTAR PARTAI



No.	ID	Nama
1.	1	PARTAI NASDEM
2.	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.	3	PARTAI Keadilan Sejahtera
4.	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5.	5	PARTAI GOLONGAN KARYA
6.	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7.	7	PARTAI DEMOKRAT
8.	8	PARTAI AMANAH NASIONAL
9.	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11.	14	PARTAI BULAN BINTANG
12.	15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia

Sistem ini dapat mendeteksi rangkap kepengurusan dan keanggotaan yang ganda partai politik. Namun, Sipol tidak maksimal dijalankan, karena yang berperan aktif di Sipol adalah pengurus partai.

Penggunaan aplikasi Sipol yang disediakan KPU untuk pendaftaran partai politik juga belum berjalan efektif, karena masih terdapat kendala-kendala teknis, baik di jajaran personel maupun perangkat teknologinya. Ini terjadi karena penyiapan aplikasi tersebut sangat terbatas. Selain itu, bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas dan sosialisasi kepada penyelenggara juga belum maksimal.

G. SEBARAN TPS

Untuk mengetahui berapa banyak jumlah TPS pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, dapat ditelusuri melalui portal *open data* milik KPU yaitu <http://tps.kpu.go.id/>.

GAMBAR 8.7: PORTAL TPS



H. JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menyajikan berbagai kegiatan, antara lain diskusi, rancangan dan pembahasan peraturan KPU, dan materi undang-undang. Misalnya, pendalaman Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Berbagai perkembangan mengenai hukum juga dapat dibaca melalui JDIH.

I. ANGGARAN TAHAPAN PEMILU 2014

Situs *kpu.go.id* tidak hanya menyajikan proses dan hasil pemilu, tapi juga membuka akses kepada publik untuk melihat berapa besar anggaran Pemilu 2014, melalui URL <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/383>. Di alamat tersebut tercatat bahwa pagu anggaran tahapan Pemilu 2014 adalah Rp 12.877.434.291.000, sedangkan realisasinya Rp 10.148.353.335.461 (78,81 persen). Sisa anggaran tahapan Pemilu 2014 adalah Rp 2.729.080.955.539.

Aplikasi lainnya yang ditata dan dikelola KPU adalah Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, Sistem Informasi Manajemen tentang Arsip dan Barang atau Simak BMN. Berbagai informasi publik dan data terbuka KPU ini telah berkontribusi untuk kelancaran berbagai aktivitas tahapan Pemilu 2014 dan kegiatan lainnya. Terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, KPU bekerja sama dengan BPPT dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, dalam pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut, KPU juga bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung.

GAMBAR 8.8 DAN 8.9: REALISASI ANGGARAN TAHAPAN PEMILU 2014.

KETERANGAN	PAGU 2014	REALISASI	SISA	PERSENTASE
PUSAT				
KPU PUSAT	1.608.545.705.000	844.142.178.629	764.403.526.371	52,48%
DAERAH				
ACEH	403.519.561.000	366.559.394.504	36.960.166.496	90,84%
SUMATERA BARAT	262.278.089.000	214.805.362.195	47.472.726.805	81,90%
RIAU	266.669.959.000	207.353.155.769	59.316.803.231	77,76%
SUMATERA SELATAN	377.874.274.000	321.898.291.067	55.975.982.933	85,19%
LAMPUNG	337.934.101.000	281.571.265.070	56.362.835.930	83,32%
SUMATERA UTARA	670.139.299.000	554.815.209.879	115.324.089.121	82,79%
JAMBI	187.642.902.000	156.059.211.708	31.583.690.292	83,17%
BENGKULU	138.056.335.000	118.720.492.947	19.335.842.053	85,99%
KEPULAUAN RIAU	95.681.513.000	69.431.217.766	26.250.295.234	72,56%
BANGKA BELITUNG	71.009.935.000	58.666.448.706	12.343.486.294	82,62%
JAWA BARAT	1.335.467.059.000	1.053.439.405.309	282.027.653.691	78,88%
DKI JAKARTA	239.444.827.000	190.568.533.479	48.876.293.521	79,59%
DI YOGYAKARTA	139.203.389.000	102.732.301.647	36.471.087.353	73,80%
BANTEN	310.970.783.000	264.508.730.982	46.462.052.018	85,06%
JAWA TENGAH	1.271.882.454.000	998.636.252.642	273.246.201.358	78,52%
BAJU	152.669.764.000	115.891.013.084	36.778.750.916	75,91%
JAWA TIMUR	1.372.868.899.000	1.135.645.141.201	237.223.757.799	82,72%
KALIMANTAN TENGAH	175.107.588.000	152.142.021.302	22.965.566.698	86,88%
KALIMANTAN TIMUR	220.654.554.000	180.916.283.058	39.738.270.942	81,99%
KALIMANTAN BARAT	257.000.404.000	228.009.994.686	28.990.409.314	88,72%
KALIMANTAN SELATAN	216.732.240.000	169.982.725.147	46.749.514.853	78,43%
SULAWESI TENGAH	187.254.839.000	161.244.559.956	26.010.279.044	86,11%
SULAWESI UTARA	199.830.332.000	162.194.108.683	37.636.223.317	81,17%
SULAWESI SELATAN	398.469.576.000	331.483.091.049	66.986.484.951	83,19%
SULAWESI TENGGARA	178.928.097.000	162.548.085.519	16.380.011.481	90,85%
SULAWESI BARAT	79.686.642.000	72.400.812.797	7.285.829.203	90,86%
MALUKU	146.839.324.000	115.103.418.648	31.735.905.352	78,39%
NUSA TENGGARA BARAT	226.178.814.000	170.111.152.069	56.067.661.931	75,21%
NUSA TENGGARA TIMUR	316.901.377.000	266.338.670.487	50.562.706.513	84,04%
PAPUA	633.357.345.000	563.831.399.883	69.525.945.117	89,02%
MALUKU UTARA	122.793.563.000	106.750.915.085	16.042.647.915	86,94%
GORONTALO	78.343.790.000	69.187.601.949	9.156.188.051	88,31%
PAPUA BARAT	197.496.958.000	180.664.888.559	16.832.069.441	91,48%
Grand Total	12.877.434.291.000	10.148.353.335.461	2.729.080.955.539	78,81%

The screenshot shows the website interface for the KPU RI. At the top, there is a navigation menu with links like 'Informasi Audio Visual', 'KPU TV', and 'Anggota DPR dan DPD 2014-2019'. Below the menu is a search bar with the text 'Cari Sesuatu'. On the left side, there is a sidebar with orange buttons for 'Tentang KPU', 'Berita', 'Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih', 'Produk Hukum', and 'Data Calon Tetap'. The main content area features the title 'LAPORAN REALISASI ANGGARAN' in large letters. Below the title, there is a date and author information: 'Tanggal : 09 Jan 2015 14:24:30 • Penulis : admin • Dibaca : 1800 x'. The main text reads 'Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2014' with a blue link 'klik disini'. To the right of the main content, there is a 'Statistik Pengunjung' section with a red bar chart and a 'Jejak Pendapat' section with a question: 'Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini?'. At the bottom left, there is a logo for 'PUSAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU RI'.

TABEL 8.10: INFORMASI PUBLIK DAN DATA TERBUKA KPU RI MELALUI LINK WWW.KPU.GO.ID DAN ALAMAT (URL)

DATA DAN INFORMASI	ALAMAT
Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014	http://data.kpu.go.id/
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU	http://jdih.kpu.go.id
Hasil Pemilu 2014	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/347 http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/316
Hasil Pindai C1 Pileg 2014	https://pemilu2014.kpu.go.id/
Hasil Pindai C1 Pilpres	http://pilpres2014.kpu.go.id/
Daftar Calon Anggota DPD	http://caleg.kpu.go.id/browse_dpd.php
Daftar Calon Anggota DPR	http://caleg.kpu.go.id/browse_dpr.php
Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi	http://caleg.kpu.go.id/browse_dprd1.php
Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	http://caleg.kpu.go.id/browse_dprd2.php
Anggota DPR dan DPD periode 2014–2019	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/387
Anggota DPRD periode 2014-2019	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/349
Daftar TPS Pileg 2014	http://tps.kpu.go.id/pileg2014.php
Daftar TPS Pilpres 2014	http://tps.kpu.go.id/pilpres2014.php
Daftar Partai Peserta Pemilu 2014	http://partai.kpu.go.id/browse.php
DIPA KPU 2014 dan Realisasi Anggaran Pemilu 2014	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/383
Daerah Pemekaran 2014	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/384
Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2015	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/341
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2013/135
RUP Barang/Jasa di Sekretariat Jenderal KPU tahun 2015	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/388
Struktur Komisioner KPU	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/344
Pusat Layanan Informasi KPU	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/328
Laporan Dana Kampanye	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/267 http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/314
Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/284
Visi Misi Capres - Cawapres	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/304
Lembaga Survei/Hitung Cepat	http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/324

J. SITUNG

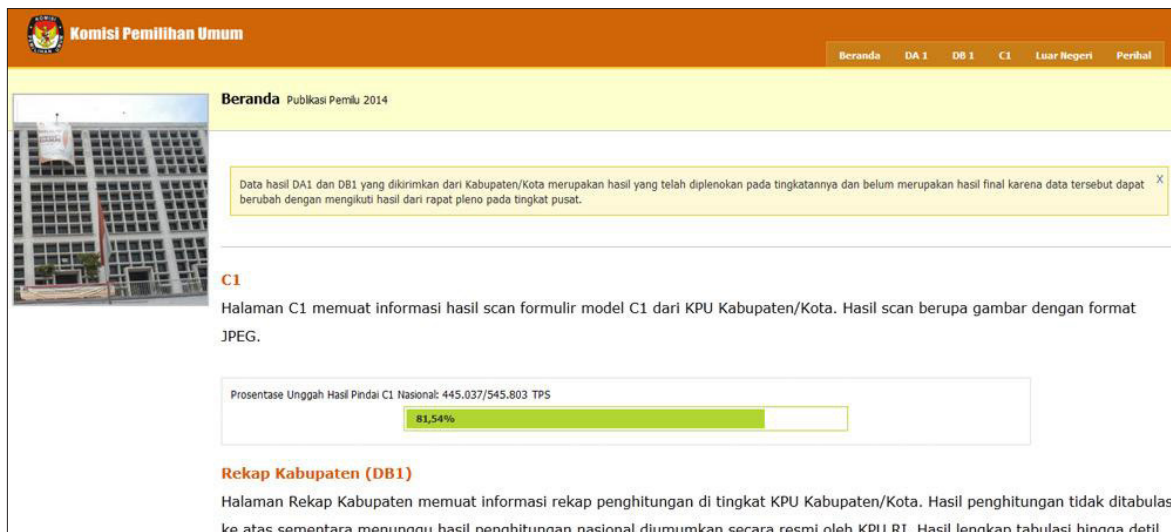
Hanya dengan biaya awal sekitar Rp 420 ribu (US\$ 35), situs *kawalpemilu.org* digerakkan sekelompok orang muda, setelah usainya pemungutan suara Pilpres 2014. Bergulirnya gerakan ini membuat penggunaan istilah *crowdsourcing* yang sepadan dengan gotong royong mulai akrab, dan menjadi perbendaharaan istilah baru di masyarakat, padahal tadinya hanya dipakai pegiat komputer.

Kawalpemilu.org tidak sendirian. Selain *kawalpemilu.org*, ada *kawal-suara.appspot.com*, *kawalpilpres.appspot.com*, *realcount.herokuapp.com*, *j.mp/hitungpilpres2014*, *rekapda1.herokuapp.com*, *caturan.com*, *bowoharja.biz*, dan *cross-check.herokuapp.com*.

Dengan berbagai kreativitas, mereka dan berbagai kalangan lainnya

memanfaatkan data terbuka Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU. Data penghitungan suara tingkat TPS yang ada di formulir model C1 yang dipindai dan diunggah di *website* KPU, kemudian direkap. Untuk mengoreksi hasil pindai formulir C1 yang diunggah KPU, ada *ciyanganeh.tumblr.com* dan *helpdesk* KPU. Pemilu 2014 memang tampak lain dibanding pemilu- sebelumnya.

GAMBAR 8.10: PORTAL UNTUK HASIL PINDAI C1 PEMILU LEGISLATIF



Sebenarnya, hasil pindai formulir model C1 sudah diunggah di alamat <http://pemilu2014.kpu.go.id> saat pemilu legislatif. Namun, hasilnya lebih banyak dimanfaatkan oleh tim dari calon anggota Dewan dan peserta pemilu. Ini berbeda dengan saat pilpres, karena hasil pindai formulir C1 itu dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas, serta memunculkan banyak inisiatif dan relawan dadakan, yang bergotong-royong mengembangkan transparansi data KPU.

GAMBAR 8.11: PUBLIKASI HASIL PINDAI FORMULIR MODEL C1 MELALUI PORTAL [HTTP://PILPRES2014.KPU.GO.ID/](http://pilpres2014.kpu.go.id/).



Menurut Elisa Sutanudjaja dari *kawalpemilu.org*, KPU sudah membuka dan mengunggah data pemilu dengan cepat, serta responsif memperbaiki kesalahan yang ada. “Infrastrukturnya *reliable* dan menerima masukan publik,” katanya.

Kawalpemilu.org, menggambarkan *open data* Pilpres KPU dengan ungkapan sebagai berikut:

- Infrastruktur *open data*-nya matang.
- Tampilannya efisien dan memudahkan untuk diakses.
- Adanya peluang untuk *hotlink* dan data *crawling*.
- Ada *helpdesk* dari KPU.

Data terbuka KPU telah membuka akses dan mengundang perhatian publik untuk terlibat aktif. Data terbuka memudahkan terbentuknya kolaborasi serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap KPU. Relawan dadakan bermunculan untuk menyukseskan Pemilu 2014. Jaringan internet yang makin luas dan sarana di media sosial, seperti *facebook*, memfasilitasi para relawan ini memberikan kontribusi yang jelas. Mereka ini bekerja sporadis, atas dasar kepercayaan.

Basis relawan *kawalpemilu.org* berjumlah 700 orang. Selain berdomisili di berbagai daerah di Indonesia, mereka juga tersebar di 27 negara, yaitu orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri.

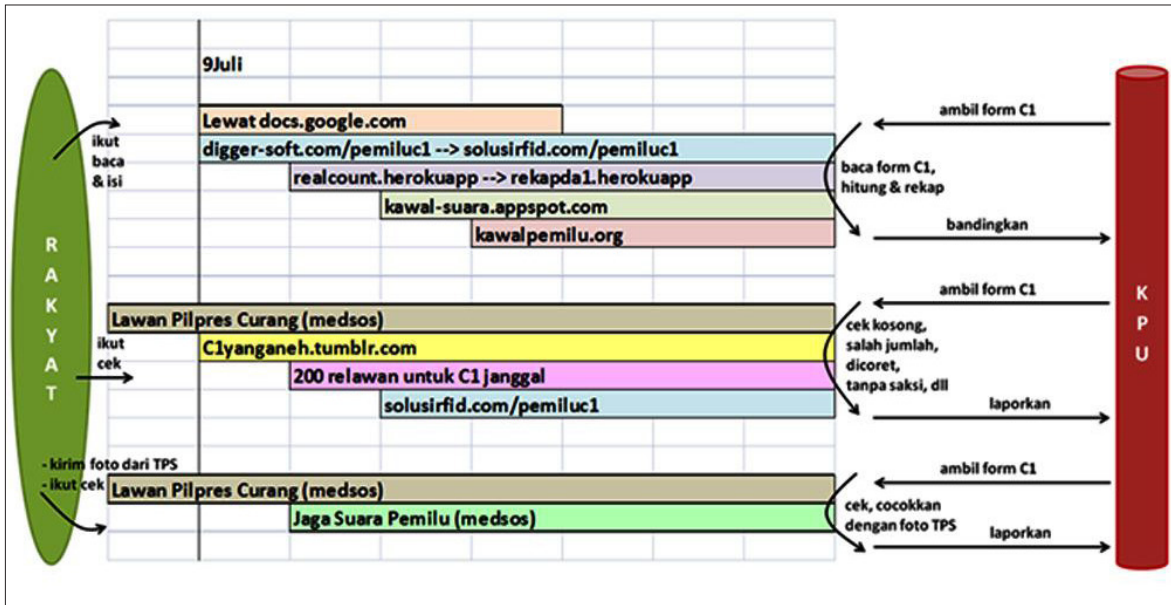
Jan Peter Alexander Rajagukguk dari Universitas Indonesia mengatakan geliat demokrasi di Indonesia tiba-tiba berlangkah-langkah lebih maju setelah KPU membuka data hasil pindai formulir C1 secara daring. “Ada yang panik dan ada yang memuji. Tetapi, saya tak tertarik dengan politik. Saya tertarik dengan ranah keilmuan saya, data terbuka (*open data*). Omong-omong, saya mulai saat ini akan menggunakan istilah *crowdsourcing* dengan istilah gotong royong. Saya lihat cara kerja keduanya sama.”

Gotong royong dan *crowdsourcing*, kata dia, pada dasarnya menghimpun banyak pihak untuk mengerjakan sesuatu. Mereka juga sama-sama membentuk sebuah komunitas.

Kebijakan KPU menerapkan *open data* telah membuka jalan bagi para relawan mendapatkan akses langsung terhadap hasil pindai formulir model C1, formulir DA1, dan DB1. Bahkan, beberapa pengembang sistem saling berbagi *source code* di Github, berbagi data melalui Application Programming Interface (API), dan informasi lainnya terkait dengan *open data* hasil penghitungan suara.

“Sungguh mengharukan melihat daftar inisiatif yang muncul dengan spontanitas,” kata Ruli Manurung.

GAMBAR 8.12: KELOMPOK RELAWAN PILPRES



BAGIAN SEMBILAN

Pengembangan API Pemilu oleh Perludem

TAHUN 2014 adalah tahun yang menentukan bagi Indonesia. Meski demikian, Indonesia masih saja menghadapi masalah berulang, seperti kurangnya informasi sederhana tentang calon anggota legislatif.

Pada saat yang sama, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa pemilu di Indonesia adalah yang paling rumit di dunia. Ada empat juta pekerja pemilu di sekitar 550 ribu lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia, yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau. Para pekerja ini menangani sekitar 775 juta surat suara dengan 2.450 versi berbeda, untuk mengakomodasi hampir 200 ribu kandidat, sebagai konsekuensi penerapan sistem proporsional terbuka. Hampir dua ratus juta pemilih mempunyai hak suara pada perhelatan kolosal yang hanya berlangsung satu hari ini.

Permasalahan tersebut memotivasi Perludem untuk membuat sebuah *database* pemilu yang mudah diakses masyarakat dan dapat digunakan kembali. Sebab, selama ini, data-data pemilu tidak pernah terkumpul dan terdokumentasi dengan baik dan menyeluruh. Sebagian besar informasi tentang pemilu tersebar di antara dokumen dan berkas di berbagai instansi pemerintahan maupun nonpemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil.

Kebanyakan data-data pemilu tersebut tidak jarang teronggok di dalam gudang-gudang, tanpa pernah tersentuh kembali. Memang ada yang sudah dalam bentuk digital, tapi kebanyakan masih dalam bentuk *scan* PDF atau dokumen yang dipindai sehingga berbentuk imaji (*image*), termasuk informasi tentang kandidat. Alhasil, data-data tersebut pun tidak dalam format yang dapat dibaca mesin.

Selain itu, sampai saat ini di Indonesia belum ada media independen yang memberikan informasi menyeluruh mengenai proses pemilu. Karena itu, diperlukan sumber informasi dan data yang kredibel, serta upaya untuk menyeimbangkan informasi yang tersebar di berbagai media dari lembaga yang sah dan kredibel. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Perludem

mengembangkan Application Programming Interface (API) Pemilu.

API Pemilu adalah sebuah *platform* data terbuka tentang informasi kepemiluan di Indonesia. API Pemilu menyajikan berbagai informasi seperti biodata calon anggota DPR, DPD, dan DPRD; akses ke peta daerah pemilihan; informasi tentang kalender pemilu; berbagai informasi pendidikan pemilih melalui rincian sesi tanya-jawab, dan; berbagai peraturan perundangan. Data yang tersedia di API Pemilu terus diperbaharui dan ditambah secara rutin, tidak hanya selama periode pemilu. Sumber utama data API Pemilu antara lain situs *web* KPU, yang terus memberikan informasi *up to date* sepanjang pileg dan pilpres.

Di API Pemilu, semua data pemilu dikumpulkan menjadi sebuah repositori pusat dan IT *programmer*. Pengembang perangkat lunak (*software*) lokal dapat menggunakan API dalam membangun alat, serta memfasilitasi umpan balik. Melalui perangkat teknologi ini, warga bisa berinteraksi secara langsung dengan pemerintah, berpartisipasi dalam programnya, maupun inisiasi program baru. API Pemilu juga berusaha memotivasi berbagai kalangan, terutama perancang piranti lunak dan pengembang komputer, untuk aktif dalam setiap proses tahapan dan hasil pemilu. Sehingga, API Pemilu bermanfaat untuk pendidikan pemilih.

Perludem memang menghajatkan API Pemilu sebagai jalan untuk untuk memberi alternatif lain penyediaan informasi kepada pemilih, mempromosikan akses informasi pemilu kepada publik, dan meningkatkan partisipasi pemilih. Perludem juga mendukung upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan menyediakan akses yang lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi digital.

1. HACKATHON API PEMILU

Saat masuk ke beranda <http://www.rumahpemilu.org>, silakan menengok jendela API Pemilu di bagian kanan bawah. Dengan sekali mengeklik jendela itu, kita akan langsung dibawa ke URL (alamat) <http://pemiluapps.org/>. Situs yang dikelola Perludem dan Rumah Pemilu ini menampilkan berbagai macam aplikasi pemilu. Ada 41 aplikasi pemilu yang bisa ditemukan di portal ini.

Aplikasi-aplikasi menarik ini dibuat oleh para pengembang aplikasi (*developer*). Mereka membuatnya dalam kompetisi membuat aplikasi berbasis pemilu, *Hackathon Application Programming Interface (API) Pemilu*. Perludem dua kali menggelar kompetisi ini, yaitu sebelum pileg dan sebelum pilpres.

Kompetisi pertama digelar di Bandung Digital Valley, Kota Bandung, Jawa Barat, pada 8 dan 9 Maret 2014, atau sebulan sebelum pemilu legislatif. Kegiatan bertajuk *Code for Vote* yang didukung The Asia Foundation ini menarik perhatian kalangan muda, khususnya perancang *website* dan pengembang piranti lunak. Itu terbukti dari jumlah peserta yang membludak di luar dugaan.

Kegiatan yang dihadiri anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, ini, diikuti 170 pengembang (*developer*) dari berbagai daerah. Selain dari Bandung, even ini juga dihadiri para jagoan *software* dan desain *web* dari Malang dan Yogyakarta.

Hackathon merupakan akronim dari *hack* dan *marathon*. Tentu *hack* atau *hacker*, dalam konteks ini tidak dalam konotasinya yang negatif, sebagai perusak di dunia maya, melainkan dalam pengertiannya yang positif. Sedangkan, *marathon* (maraton), meminjam istilah olahraga, dalam hal ini lari jarak jauh dalam cabang atletik. Namun, dalam pengertian ini, *marathon* bukan dibatasi oleh jarak, melainkan oleh waktu. Yaitu, sebuah lomba yang diselesaikan dalam waktu tertentu, seperti 15 jam, 24 jam, atau 48 jam.

Salah satu syarat untuk menyelenggarakan *Hackathon* adalah adanya data-data yang bisa dibaca mesin (*machine readable format*), sudah dibersihkan, dan mudah dimodifikasi atau digunakan kembali, sehingga para *programmer* dapat fokus pada logika dan sistematisasi penyusunan data serta visualisasinya. Salah satu wujud dari terpenuhinya syarat-syarat tersebut adalah adanya Application Programming Interface (API).

API adalah sebuah cara pada program komputer untuk saling berinteraksi melalui pengkodean tertentu, sehingga seseorang yang membuat program komputer ini dapat mengirimkan instruksi kepada program lain. Sedangkan, yang dimaksud *interface* atau antarmuka, adalah dua sistem yang bertemu dan berinteraksi. Alhasil, sebuah API adalah antarmuka yang digunakan pada sebuah aplikasi agar dapat berkomunikasi dengan aplikasi lain. Dan, API Pemilu 2014 merupakan aplikasi yang menggunakan antarmuka agar informasi tentang pemilu 2014 di Indonesia tersedia untuk aplikasi lain.

Dalam kegiatan *Hackathon* API Pemilu di Bandung, Perludem memberikan akses kepada *developer* untuk menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi dari *database* pemilu Perludem yang sudah cukup lengkap dan komprehensif. *Hackathon* ini kerap disebut sebagai kompetisi penggunaan data pemilu legislatif terbesar dan pertama kali di dunia.

GAMBAR 9.1. LOMBA HACKATHON DI BANDUNG.



Perludem mengumumkan hasil kompetisi *Hackathon* pertama pada 17 Maret, di Media Center KPU, Jakarta. Tiga pemenangnya adalah Appkitchen, The Ciheulang, dan Alexier. Pengumuman pemenang sekaligus peluncuran aplikasi-aplikasi peserta *Hackathon* secara resmi. Aplikasi ini antara lain dapat difungsikan dengan menggunakan telepon pintar berbasis Android dan diunduh melalui Google Play Store atau <http://pemiluapps.org>.

Aplikasi buatan Appkitchen diberi nama “Orang Baik”. Lewat aplikasi ini, pengguna Android dapat memeriksa kualitas caleg yang berlaga di daerah pilihannya masing-masing. Di aplikasi ini, pengguna Android lebih mudah melihat kualitas caleg, karena para caleg telah diberi nilai, dengan skala 10 sampai 100. Nilai tersebut berasal dari akumulasi bobot sang caleg, mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, tempat lahir caleg, hingga tempat tinggalnya.

The Ciheulang, sang pemenang kedua, memilih nama “Pemilu Hore” untuk aplikasi buatannya. Lewat aplikasi berbentuk permainan interaktif

ini, pengguna Android bisa mengukur sejauh mana pengetahuan mereka tentang pemilu. Seperti *games* pada umumnya, “Pemilu Hore” juga membuat permainan ini bertingkat. “Pemilu Hore” membaginya menjadi empat tingkat. Makin tinggi levelnya, makin sulit permainannya.

Adapun Alexier, yang digawangi sejumlah mahasiswa Singapura asal Indonesia, menyebut aplikasi buatannya dengan nama “Caleg Store”. Seperti namanya, aplikasi ini juga fokus pada informasi tentang caleg. Mereka mengajak para pengguna Android mengomentari para caleg.

“Salah satu yang paling membedakan Pemilu 2014 dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah semangat dan komitmen keterbukaan data kepemiluan yang lebih kuat dari penyelenggara pemilu. Namun, itu saja tidak cukup. Data kepemiluan perlu hadir dengan cara yang lebih sederhana, mudah digunakan, dan menarik, sehingga lebih banyak pemilih yang bisa dijangkau. Perlu dempercaya bahwa penggunaan teknologi bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut. Teknologi dan pemilu menjadi kombinasi menarik yang kemudian menghadirkan berbagai aplikasi kepemiluan berbasis platform website, Android, maupun iOS.” (Perludem & GDG 2014)

GAMBAR 9.2: LOMBA HACKATHON DI JAKARTA



Sukses dengan *Hackathon* pertama, menjelang Pilpres 2014, Perludem bersama Google Developer Group (GDG) Jakarta kembali menggelar even serupa. Kegiatan yang didukung Google, Asia Foundation, dan KPU, ini diselenggarakan di Jakarta. Kontes bertajuk *Code for Vote 2.0 Challenge* ini digelar di FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada 14 Juni 2014.

Seperti halnya kompetisi pertama, kompetisi kedua ini pun bermaksud menghasilkan aplikasi-aplikasi pemilu, seperti aplikasi yang berisi informasi tentang pilpres dan para kandidatnya, pendidikan pemilih, dan lain-lain. Dan, seperti *Hackathon* pertama, *Hackathon* kedua ini pun disambut antusias. Tercatat 334 *developer/programmer* komputer ambil bagian dalam kompetisi ini. Mereka tergabung dalam 107 tim.

Dibuka Ketua KPU, Husni Kamil Manik, acara ini menjadi kegiatan yang sukses mensinergikan tiga unsur, yakni pemerintah, masyarakat sipil, dan kalangan swasta. Kerja sama ini antara lain terlihat dari kelompok juri yang terdiri dari atas anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah; anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos; dan perwakilan masyarakat sipil seperti Perludem, Solidaritas Perempuan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, HIVOS, The Asia Foundation, dan Celup Kelingking. Sedangkan, dari pihak swasta antara lain dari Google, Google Developer Group (GDG) Jakarta, KIBAR, dan Walden Global Service.

Tantangan kepada para pengembang yang berkompetisi dalam *API Pemilu Challenge Code for Vote 2.0* antara lain adalah membuat aplikasi yang dapat menunjukkan hasil pemilu legislatif dan menginformasikan tentang pemilu presiden dalam desain yang menarik dan mudah digunakan.

Setelah melalui proses seleksi, Ice Burble (mahasiswa ITB) dengan aplikasi “Pemiluman” menjadi pemenang utama dan mendapatkan hadiah Rp 12 juta rupiah serta tur ke kantor Google di Singapura. Juara kedua disabet WOW, dengan aplikasi bernama “Pemimpin Kita”. Yang menjadi juara ketiga adalah Femmouse, dengan aplikasi bernama “Ayo Nyoblos”. Femmouse, tim yang semua anggotanya perempuan, sekaligus dinobatkan sebagai *Best All Female Team*. Juara keempat diraih oleh Lummachrome Developer, dengan aplikasi bernama “Pelita”. Sedangkan, juara kelima adalah IR24JAM dengan aplikasi “Analisis Pilpres 2014”.

“Kami percaya anak muda Indonesia memiliki potensi, kemauan, dan kemampuan untuk berkontribusi positif bagi perubahan di Indonesia. Melalui kompetisi ini, Google Developer Group (GDG) Jakarta sangat berbangga

turut membawa dampak besar kepada banyak orang melalui teknologi. Hal ini terbukti dengan antusiasme peserta yang begitu besar dalam waktu yang terbilang singkat,” kata Putri Izzati, GDG Jakarta Chapter Manager. (Perludem & GDG: 2014)

2. APLIKASI “DPR KITA”

Setelah selesainya pesta demokrasi, masih ada persoalan yang perlu dijawab, yaitu soal hubungan wakil rakyat dengan rakyat/konstituennya yang kerap renggang pascapemilu, bahkan terputus. Untuk mengatasi persoalan klasik tersebut, Perludem bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat sipil seperti PSHK, IPC, Public Virtue, Kontras, ICT Watch, I-Lab, dan Selasar.Com, mengagas pemanfaatan teknologi informasi, yang kemudian mewujudkan dalam bentuk aplikasi “DPR Kita”.

Aplikasi “DPR Kita” diluncurkan di Hotel Santika, Jakarta, Barat, pada Selasa, 24 Februari 2015. Aplikasi berbasis Android ini bisa diunduh secara gratis lewat Google Play Store.

Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengenal lebih jauh anggota DPR dari daerah pemilihannya. Mereka bisa mengakses informasi mulai dari biodata hingga *update* informasi kegiatan-kegiatan para wakilnya di parlemen. Di aplikasi “DPR Kita”, anggota DPR memang diberi keleluasaan memublikasikan berbagai informasi kegiatannya, sehingga bisa diketahui oleh konstituennya. Mulai dari kegiatan persidangan, program kerja, hingga kinerja dan prestasi-prestasi sang anggota Dewan, yang boleh jadi tidak terpublikasi di media.

Lewat aplikasi “DPR Kita”, masyarakat pun bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada wakilnya. Sehingga, selain bermanfaat bagi pada konstituen karena aspirasinya bisa tersalur ke alamat yang tepat, aplikasi ini pun bermanfaat bagi anggota DPR karena mereka bisa mendapatkan informasi yang *up to date* dari warga di distrik pemilihannya.

Ketua Perludem, Didik Supriyanto, mengatakan aplikasi DPR Kita memberi kontribusi bagi kemajuan politik di Indonesia. Sebab, aplikasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan langsung aspirasinya kepada wakil rakyat dari daerah pemilihannya, dan mendapatkan tanggapan langsung pula dari sang wakil rakyat. Lewat aplikasi ini pun, anggota Dewan bisa menyampaikan apa saja yang dikerjakannya kepada konstituennya.

Selama ini, kendala masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, antara lain, adalah karena tidak didukung sarana yang baik. Komunikasi antara Dewan

dengan masyarakat lebih sering difasilitasi media massa, yang pesannya bisa saja telah terdistorsi (menyimpang). Karena itu, melalui aplikasi ini, persoalan komunikasi tersebut diharapkan teratasi, sehingga rakyat dan wakil rakyat bisa saling memahami.

GAMBAR 9.3: BERITA PELUNCURAN APLIKASI “DPR KITA”

TEKNOLOGI INFORMASI

Aplikasi “DPR Kita” Diluncurkan

JAKARTA, KOMPAS – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi meluncurkan aplikasi “DPR Kita”. Aplikasi berbasis teknologi dan informasi dengan media telepon pintar ini dibuat untuk lebih memudahkan interaksi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan konstituen atau masyarakat di daerah pemilihannya.

“Semangatnya adalah tidak memutus hubungan antara anggota DPR dan masyarakat yang diwakilinya,” ujar Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto saat peluncuran aplikasi DPR Kita di Hotel Santika Jakarta, Selasa (24/2).

“

Semangatnya adalah tidak memutus hubungan antara anggota DPR dan masyarakat yang diwakilinya.

Didik Supriyanto

media sosial sehingga pemikiran-pemikiran para anggota Dewan bisa diketahui publik.

“Karena pemilih saya ada di berbagai media sosial, mereka juga memberikan pertanyaan atau masukan yang berbeda-beda. Tentu akan menyulitkan jika harus menjawab satu per satu,” kata Ledia.

Oleh karena itu, dia berharap ketika para anggota Dewan menuliskan pikirannya atau menjawab pertanyaan melalui aplikasi DPR Kita, hal tersebut bisa terkoneksi ke Facebook, Twitter, atau media sosial lain.

Viva juga berharap aplikasi tersebut bisa diterima semua anggota Dewan sehingga bisa di-

sukan, kritik, atau berkeluh kesah terhadap berbagai persoalan, termasuk menagih janji-janji kampanye.

Selain karena keterbatasan anggota DPR menjangkau masyarakat di daerah pemilihannya, aplikasi “DPR Kita” dibuat dengan pertimbangan data pengguna telepon pintar di Indonesia sudah sangat besar, yang kini jumlahnya telah mencapai 100 juta orang. Ini merupakan peluang besar. Didik Supriyanto mengatakan pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial, yang cenderung mudah digunakan masyarakat, merupakan salah satu solusi (*Kompas*, Rabu 25 Februari 2015: *Aplikasi “DPR Kita” Diluncurkan*).

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, juga menegaskan bahwa partisipasi politik masyarakat tak harus berakhir bersama berakhirnya pemilu. Sebab, partisipasi politik tidak semata memberikan suara di TPS, melainkan juga terlibat aktif dalam menyuarakan aspirasi kepada wakil rakyat yang telah dipilihnya, terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Meski pemilu telah berakhir, masyarakat tetap memiliki hak untuk berinteraksi secara langsung dengan para wakilnya di parlemen. Mulai dari menagih janji-janji yang disampaikan para wakilnya saat kampanye, hingga berkeluh kesah tentang berbagai persoalan di daerah pemilihan, dan berbagai *uneg-uneg* lainnya.

Selama ini, pascapemilu, masyarakat kerap abai, sementara anggota DPR pun tidak sedikit yang melupakan fungsi representasinya, sebagai penyalur aspirasi masyarakat, yang mestinya berlangsung terus-menerus. Inilah fenomena *broken linkage* atau keterputusan hubungan antara rakyat dengan wakil rakyat.

GAMBAR 9.4: APLIKASI “DPR KITA”



Tapi, fenomena *broken linkage* itu bukan semata karena keengganan masyarakat menyampaikan aspirasinya, tapi juga karena ketidaktahuan bagaimana menyampaikan aspirasi itu kepada wakil rakyat yang telah dipilihnya. Selain itu, wakil rakyat pun memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh masyarakat di daerah pemilihannya. Inilah yang coba diatasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, terutama yang mudah digunakan, seperti aplikasi “DPR Kita”.

Aplikasi “DPR Kita” dapat diunduh melalui Google Play Store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.gits.dprkita>) secara gratis. Aplikasi ini berformat API, sehingga memungkinkan bagi *developer* lain untuk mengembangkan aplikasi serupa, atau melakukan modifikasi dengan informasi-informasi lainnya.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, mengatakan pemanfaatan teknologi akan banyak membantu. Sebab, teknologi akan mempercepat penyampaian informasi dari konstituen kepada wakil rakyat, dan sebaliknya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi, DPR tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran untuk mengatur pertemuan formal antara anggota DPR dengan konstituennya. Anggota DPR pun bisa melakukan pendidikan politik dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

Pemanfaatan teknologi ini juga akan mendorong reformasi kelembagaan pemerintah, agar lebih peka terhadap teknologi. Apalagi, variasi saluran penyampaian aspirasi di era digital semakin banyak. “Sekarang tinggal bagaimana DPR peka menangkap gejolak di masyarakat melalui saluran yang ada.” (*Rumah Pemilu*, 25 Februari 2015: *Pemanfaatan Teknologi Informasi Mendukung Demokrasi Berkualitas*).

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi DPR, Indra Pahlevi, mengakui sampai saat ini DPR masih menggunakan cara lama dalam menampung aspirasi masyarakat. Yaitu, rakyat datang langsung ke DPR, menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi, atau berkirim surat. Karena itu, dia menilai kemajuan teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk mendukung kinerja DPR. Dia berharap aplikasi seperti “DPR Kita” akan banyak membantu, karena teknologi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan langsung aspirasinya kepada wakil rakyat. (*Rumah Pemilu*, 25 Februari 2015: *Pemanfaatan Teknologi Informasi Mendukung Demokrasi Berkualitas*).

Ledia Hanafi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, menilai aplikasi “DPR Kita” merupakan sebuah terobosan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Dia berharap aplikasi ini terus disosialisasikan, terutama kepada anggota DPR. Sebab, aplikasi ini memberi kesempatan kepada para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta melakukan edukasi atau pendidikan politik. (*Republika*, Selasa 24 Februari 2015: *Aplikasi “DPR Kita” untuk Menata Demokrasi*).

Aplikasi ini pun dinilai Ledia Hanafi bisa menjadi sarana bagi anggota DPR untuk menyampaikan klarifikasi kepada para konstituennya, terutama terkait

pemberitaan-pemberitaan yang kurang tepat soal kinerja DPR. Ledia berharap, aplikasi ini bisa tersambung dengan akun-akun media sosial yang telah lebih dulu dimiliki oleh anggota DPR, seperti Twitter dan Facebook.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, juga menilai kemajuan teknologi informasi dapat menopang peningkatan kualitas demokrasi. Salah satunya lewat aplikasi yang memudahkan masyarakat menyalurkan aspirasi langsung kepada anggota DPR. “Kehadiran aplikasi “DPR Kita” akan memberikan dorongan positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Hadirnya aplikasi ini bisa meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat. Aspek edukasi ini terlihat dalam salah satu konten di aplikasi tersebut, yaitu adanya penjelasan tentang komisi-komisi dan alat kelengkapan (AKD) DPR. (*Republika*, Selasa 24 Februari 2015: “DPR Kita” Aplikasi Pendongkrak Demokrasi).

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan aplikasi “DPR Kita” yang bisa dioperasikan dengan telepon pintar, pas di tangan dan mudah digunakan. Dia berpendapat aplikasi tersebut dapat diintegrasikan dengan upaya DPR menuju parlemen modern. Sebab, aplikasi ini memungkinkan kegiatan anggota Dewan di-*update*, termasuk dalam masa reses. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan anggota Dewan. “DPR saat ini sedang berupaya agar semua anggota Dewan bisa memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan kegiatan atau menampung aspirasi masyarakat. Salah satunya dengan memiliki situs *web*. Aplikasi “DPR Kita” sejalan dengan misi tersebut.” (*Rumah Pemilu*, Sabtu 7 Maret 2015: *DPR Ingin Adopsi Aplikasi DPR Kita dan DPR Segera Proses Integrasi Aktivitas dengan Aplikasi DPR Kita*).

DPR sendiri saat ini sedang melakukan pembaruan *website* DPR dan membuatkan *website* resmi masing-masing anggota untuk menginformasikan biodata anggota DPR berikut aktivitas anggota DPR, serta memuat kanal interaksi langsung dengan masyarakat.

Animo pengguna aplikasi DPR Kita, sejauh ini cukup besar, sehingga perlu ada respons dari anggota DPR.

Aplikasi DPR KITA: Inovasi untuk Menyalurkan Aspirasi

Pemilu 2014 disinyalir adalah Pemilu yang paling inovatif dalam sejarah Republik Indonesia. Beragam inovasi berbasis teknologi mewarnai proses setiap tahapan Pemilu. Inisiatif ini muncul baik dari publik, stakeholder Pemilu seperti KPU, organisasi masyarakat sipil, dan juga para kandidat legislatif maupun presiden.

Sebagai contoh, inovasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan scan C1 yang dilakukan KPU merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan di dunia. Terdapat pula inovasi dari organisasi masyarakat sipil seperti kegiatan pembuatan database berbasis *application programming interface* (API) yang dilakukan Perludem melalui API Pemilu dan Kawal Pemilu dengan rekapitulasi online. Hal ini merupakan terobosan dan meningkatkan partisipasi.

Teknologi-teknologi yang semakin maju dan berkembang di abad 21 memungkinkan berbagai data dan informasi yang disebarluaskan oleh pemerintah dapat dibagikan ke publik dengan cara yang mudah, praktis, dan memantik terjadinya kolaborasi dan partisipasi yang lebih besar.

Dalam konteks Pemilu, beragam inovasi-inovasi pemilu tersebut berkontribusi kepada peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi paling nyata dapat dilihat dari jumlah *voter turnout* yang dihasilkan pada Pemilu legislatif 2014 yang meningkat dari sebelumnya 70,9% pada Pemilu 2009 menjadi 75,11% pada pemilu legislatif.

Partisipasi ini bukan hanya pada hari H pemungutan suara, tetapi juga sebelum dan setelah Pemilu melalui berbagai aktifitas online dan offline. Aktivitas ini menariknya, melibatkan kalangan profesi tertentu seperti IT *programmer/developer*.

Kini apa yang terjadi setelah Pemilu? Tanpa disangka partisipasi masyarakat terhadap berbagai isu politik masih cukup tinggi. Berbagai kasus politik dan ekonomi mulai dari meningkatnya harga BBM, Revisi UU Pilkada, penunjukan KAPOLRI, hingga kasus hukuman mati yang ditetapkan kepada warga negara asing dari Australia mendapatkan respon dan animo tinggi dari masyarakat.

Hubungan yang terputus (*broken linkage*) antara masyarakat dan wakil-wakil yang telah terpilih dikarenakan berbagai faktor, terutama ketidaktahuan masyarakat bagaimana cara menyampaikan aspirasi tersebut. Melalui teknologi informasi tampaknya aspirasi dapat terjembatani.

Adalah sebuah kemajuan dan inovasi ketika masyarakat dapat terus berpartisipasi mengawal demokrasi, dan memastikan terpenuhinya janji-janji kampanye para wakil rakyat, baik di legislatif maupun eksekutif. Terlebih lagi jika merujuk pada kriteria *good governance*, maka transparansi, inovasi, dan partisipasi menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik.

Dalam konteks hubungan dengan anggota dewan misalnya, sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu legislatif mengamanatkan kedekatan masyarakat dengan anggota DPR yang tidak terbatas pada saat Pemilu semata.

Hal ini selain karena kewajiban untuk mengemban amanat rakyat juga sebagai investasi para anggota dewan di dalam pemilu berikutnya. Sebab, kemampuannya untuk meraih hati

rakyat melalui kinerja dan kemampuan menciptakan kebijakan, serta memenuhi semua janji dan kontrak sosial di DPR sejatinya akan menentukan apakah anggota dewan ini akan terpilih kembali atau tidak.

Berangkat dari hal tersebut, dengan memanfaatkan teknologi informasi, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama dengan berbagai unsur dari masyarakat sipil lainnya (PSHK, IPC, Public Virtue, Contrast, ICT Watch, dan selasar.com) memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat aplikasi DPR KITA. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi *platform* atau wadah untuk menyalurkan aspirasi.

GAMBAR 9.5: MENGUNDUH APLIKASI "DPR KITA"



Selain menggunakan Android, aplikasi ini nantinya akan dibuat dengan platform IOS dan web. Tujuan aplikasi ini sebagai sarana komunikasi dan penyampaian aspirasi langsung kepada wakil-wakil rakyat di DPR RI. Sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan data dan informasi aplikasi DPR KITA juga menyajikan biodata anggota DPR terpilih serta *timeline* status mereka terkait dengan kinerjanya.

Aplikasi DPR KITA menyajikan data-data infografis, serta berita dari *website partner*. Karena itu, siapa saja yang menginstal aplikasi ini mendapatkan data *background* dan beberapa berita, serta jadwal rapat dari anggota DPR.

Aplikasi DPR KITA memungkinkan masyarakat mengikuti berbagai *up-date* dari kinerja wakil rakyat di DPR dan juga berpartisipasi memberikan ide dan gagasan untuk Indonesia yang lebih baik. Setidaknya akan ada dua jenis kontribusi yang dapat dilakukan publik atau *digital democracy activist* melalui aplikasi ini, yakni:

1. *User* dapat memberikan aspirasi kepada setiap komisi terkait berbagai isu yang ada di masyarakat.
2. Pada laman anggota DPR *user* dapat memberikan aspirasi dan melaporkan berbagai aspirasi atau berita terbaru dari dapil masing-masing kepada anggota dewan terkait.

Aplikasi ini menggunakan sistem berbasis lokasi (*location based system*) sehingga memungkinkan masyarakat untuk langsung melihat Anggota DPR dari dapil secara *realtime* berdasarkan tempat dibukanya aplikasi. Dengan diluncurkannya aplikasi ini diharapkan masyarakat dan anggota DPR dapat berkomunikasi langsung dengan para wakilnya dengan mudah.

Keuntungan (*benefit*) dan kemudahan tidak hanya didapatkan oleh masyarakat semata, tapi juga anggota DPR. Pertama, anggota dewan dapat mempublikasikan kegiatan dan program kerja kepada masyarakat sehingga setiap orang yang mengunduh aplikasi ini, terutama yang mendukung anggota dewan tersebut akan mendapatkan notifikasi rutin setiap kali anggota dewan tersebut membuat *posting* di podium.

Kedua, aplikasi ini menampilkan sikap politik sesungguhnya dari anggota dewan, tanpa khawatir akan berbagai kepentingan. Selain itu, para wakil rakyat dapat dengan mudah menjangkau konstituen dari daerah asal pemilihannya, kapan pun tanpa terpaku oleh jadwal masa reses serta mendapatkan *update* dari masyarakat di daerah pemilihannya secara *real time*.

Seluruh data yang dimasukkan dalam aplikasi ini dapat dikembangkan lagi oleh developer lain. Perludem membuka *application programming interfacenya* (API) sehingga memungkinkan developer yang ingin mengembangkan aplikasi serupa atau memodifikasi dengan informasi-informasi lainnya.

Dengan platform terbuka seperti ini setiap data memiliki potensi untuk digunakan dan ditransformasi ke dalam bentuk digital. Dengan format semacam ini, berbagai data kepemiluan yang dikumpulkan oleh Perludem dari berbagai sumber telah diolah sedikitnya 480 aplikasi, 44 sudah dipublikasi melalui *platform Android* maupun IOS.

Sebagaimana pepatah latin mengatakan "*Vox Populi, Vox Dei*" artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, semoga dengan inovasi ini pembuat kebijakan, khususnya DPR, dapat mengusulkan atau membuat *data driven policy* atau kebijakan yang lebih baik.

Sampai saat ini API Pemilu masih terus berinovasi dengan data pemilu dan parlemen, serta melakukan pengembangan dan memotivasi berbagai elemen— termasuk KPU— untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan data. Salah satu kegiatan yang digagas untuk mendukung upaya tersebut adalah pelatihan kepada organisasi masyarakat sipil dan KPU di berbagai daerah. Pelatihan yang sudah dilakukan berlokasi di Jakarta, Gorontalo, Bali, dan Jawa Timur, melibatkan peserta dari 50-an kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan pelatih dari lembaga nonprofit internasional, Open Knowledge Foundation, melalui program mereka, *School of Data*.

Banyak tindak lanjut yang dihasilkan dari program ini. Salah satunya penerbitan buku *Pemilu Gorontalo 1955-2014* yang ditulis Verrianto Madjowa, anggota KPU Provinsi Gorontalo. Buku ini menggambarkan data pemilu di Minahasa tahun 1951 dan Makassar tahun 1952. Selain itu, Perludem juga menyampaikan rekomendasi keterbukaan data dan informasi kepada KPU.

GAMBAR 9.6: PELATIHAN DATA DI JAKARTA



API Pemilu berusaha menjaga komitmen lebih lanjut dari Perludem untuk mendukung Pemerintah Indonesia yang lebih terbuka, sesuai inisiatif *Open Government Partnership*. Upaya Perludem mendukung pemerintahan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, melawan korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru.

BAGIAN SEPULUH

Partisipasi Masyarakat dan Generasi Digital

SALAH satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah keterlibatan masyarakat. Partisipasi orang banyak akan berpengaruh pada kualitas demokrasi. Pileg dan Pilpres 2014 tercatat sebagai momen balik, sekaligus tonggak meningkatnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu bukan hanya berupa kehadiran mereka di TPS untuk memberikan suaranya, melainkan banyak juga yang mewujud dalam pemanfaatan teknologi informasi, seperti sosial media, untuk mendiskusikan dan mengenal lebih dekat para calon wakil rakyat.

Pileg dan Pilpres 2014 adalah perhelatan yang paling kompetitif, menarik, dan inovatif sepanjang sejarah Indonesia. Sebuah cerita yang layak dibanggakan. Belum pernah terjadi sebelumnya di negara lain dengan jumlah penduduk sebesar dan seberagam Indonesia, dengan manajemen pemilu yang paling kompleks di dunia, berhasil dihelat sebuah pemilu damai dan kreatif. Pemilu 2014 melibatkan begitu banyak komponen masyarakat sebagai relawan dan pegiat demokrasi digital, yang menggunakan teknologi untuk berbagi informasi, ide, dan memantau proses pesta demokrasi.

Pascareformasi, pada Pemilu 1999, yang tidak menggunakan hak pilih tercatat 10,40 persen dari daftar pemilih tetap (DPT). Pada Pemilu 2004, yang tidak menggunakan hak pilih naik menjadi 23,34 persen dari total DPT. Sedangkan, pada Pemilu 2009, yang tidak menggunakan hak pilih kembali naik menjadi 29,01 persen. Alhasil, tingkat partisipasi masyarakat sejak Pemilu 1999 hingga 2009 telah menurun hingga 19 poin (*percentage point*).

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan demokrasi yang sesungguhnya adalah diberikannya ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan adanya penegakan hukum. Karena itu, keterbukaan informasi, khususnya seputar penyelenggaraan pemilu, sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Semua itu akan berujung pada upaya menyejahterakan rakyat melalui wakil-wakil dan pemimpin yang dipilih melalui pemilu.

Husni Kamil Manik menambahkan, keterbukaan informasi akan membawa dampak positif bagi meningkatnya partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pemilu. Pemberian akses informasi yang utuh dan transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, akan memberikan efek positif bagi seluruh tahapan. Mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat legitimasi hasil pemilu.

A. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

Partisipasi pemilih dalam Pileg 2014 mencapai 75,11 persen, atau meningkat dibanding Pileg 2009 yang tingkat partisipasinya 71 persen. Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan angka partisipasi pemilih sebesar 75 persen. Untuk Pemilu 2019 mendatang RPJMN 2015-2019 mamatok target partisipasi sebesar 77,5 persen.

Sementara, partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 sebesar 70,59 persen, atau sedikit menurun dibanding Pilpres 2009 yang tingkat partisipasinya 71,7 persen. Meski demikian, keterlibatan aktif dan gotong-royong masyarakat pada Pileg 2014, dan terutama Pilpres 2014, sangat menonjol.

Dalam kajiannya, Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal paling menonjol dalam Pilpres 2014. Partisipasi berbagai unsur masyarakat pemilih, di dalam maupun luar negeri, relawan, seniman, lembaga survei, dan media massa, sangat besar, dan diliputi semangat kesukarelaan. Itu antara lain terlihat pada antusiasme masyarakat untuk mengampanyekan kandidat pilihannya.

Penasihat Senior Kemitraan yang membidangi kepemiluan, Prof Ramlan Surbakti, mengatakan rendahnya persentase pemilih Pilpres 2014 dibandingkan Pileg 2014, bukanlah fenomena baru. Sebab, hal serupa pernah terjadi juga pada Pemilu 2004. Meski kuantitas partisipasi dalam pilpres lebih rendah ketimbang pileg, namun Ramlan Surbakti menyebut kualitas partisipasi pilpres lebih tinggi.

Salah satu penjelasan mengapa partisipasi pemilih dalam pileg lebih tinggi dibanding pilpres adalah karena jumlah caleg yang bertarung dalam pileg sangat banyak, mencapai ratusan ribu orang. Mereka pun telah menyapa calon pemilihnya jauh-jauh hari, umumnya sejak setahun sebelum pemilu.

Di Provinsi Gorontalo, tingkat partisipasi dalam pileg dan pilpres berjarak hingga 6,86 poin persen. Partisipasi pileg tercatat sebesar 81,97 persen,

sedangkan partisipasi pilpres hanya 75,11 persen. Potret yang sama terjadi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Di Kabupaten Gorontalo, jaraknya 5,74 persen; Boalemo (6,12 persen); Kota Gorontalo (6,18 persen), Bone Bolango (7,01 persen), Kabupaten Gorontalo Utara (7,78 persen) dan Pohuwato (10,89 persen).

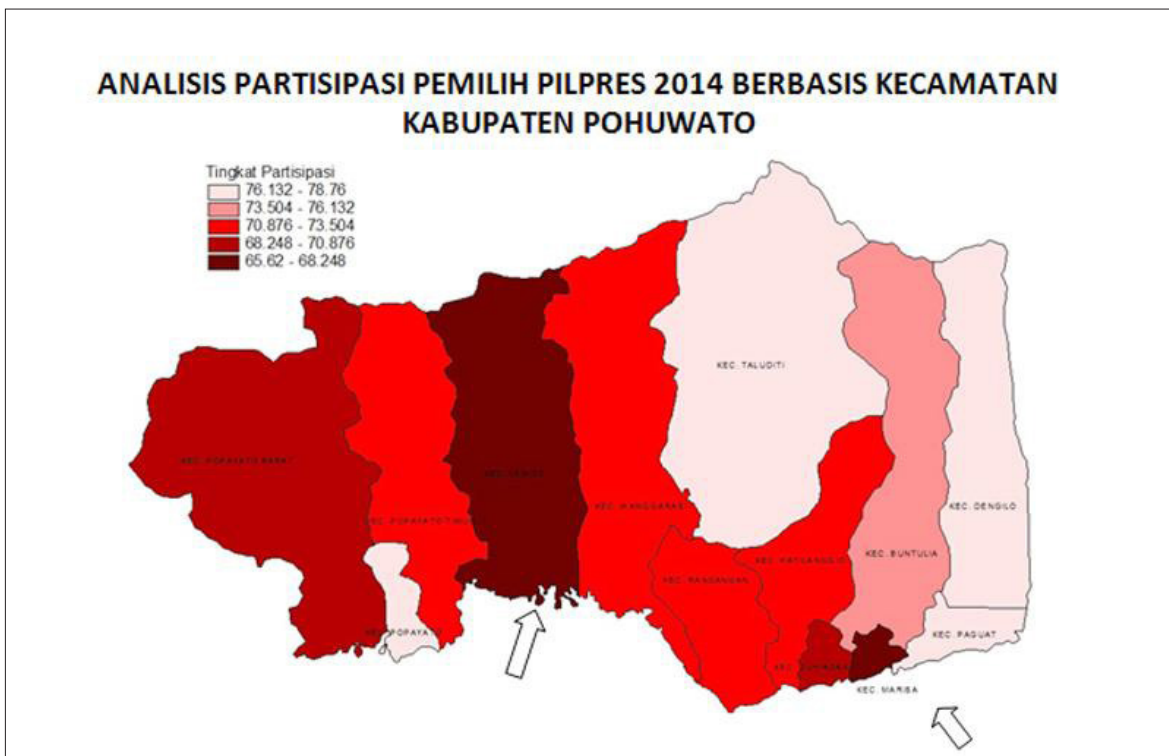
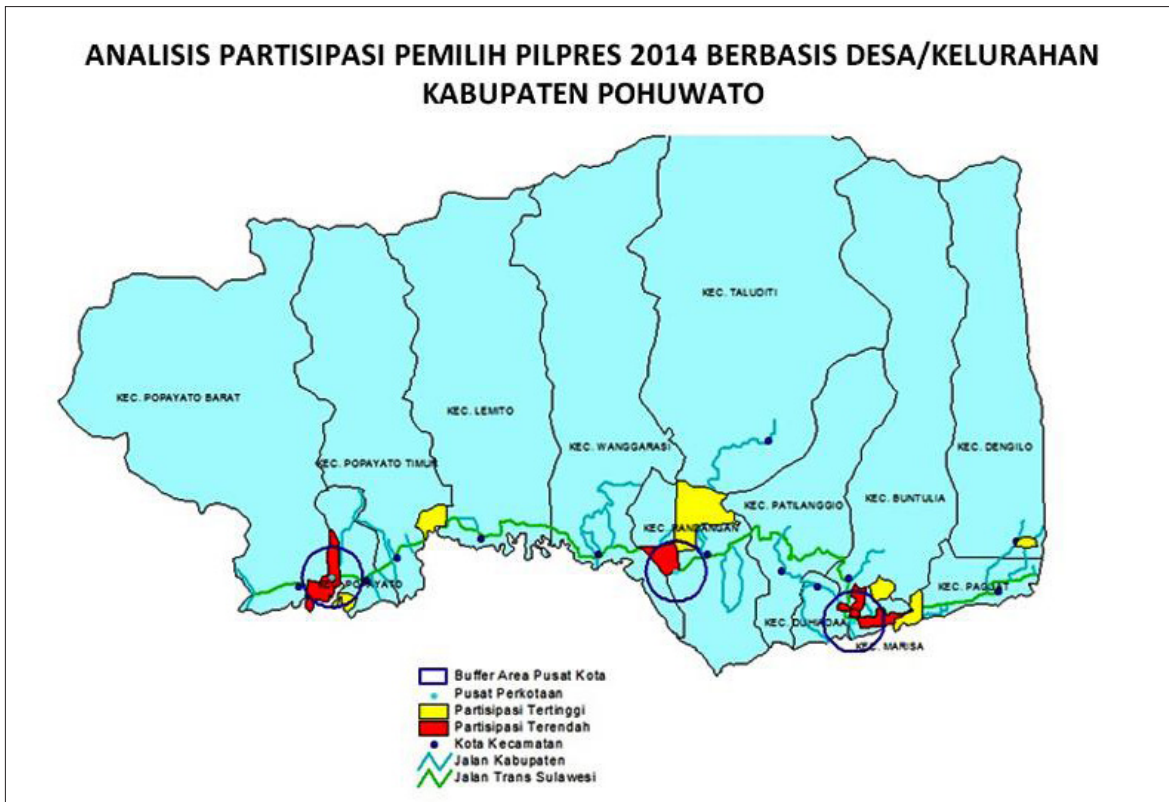
TABEL 10.1: PARTISIPASI PEMILIH PILEG DAN PILPRES 2014 DI PROVINSI GORONTALO

KABUPATEN / KOTA	DATA PILEG			DATA PILPRES		
	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE (%)	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE (%)
KABUPATEN GORONTALO	284.464	227.790	80,08	280.357	208.397	74,33
KABUPATEN BOALEMO	99.305	83.963	84,55	97.902	76.787	78,43
KABUPATEN BONE BOLANGO	106.842	93.769	87,76	106.654	86.124	80,75
KABUPATEN POHUWATO	97.805	81.529	83,36	97.147	70.403	72,47
KABUPATEN GORONTALO UTARA	83.454	67.362	80,72	83.337	60.784	72,94
KOTA GORONTALO	137.724	109.212	79,30	138.068	100.953	73,12
TOTAL	809.594	663.625	81,97	803.465	603.448	75,11

Analisis menggunakan sistem informasi geografis yang dipadukan dengan wawancara lapangan yang dilakukan KPU Pohuwato mendapati para pemilih yang berada di pedesaan cenderung lebih peduli terhadap pemilu ketimbang pemilih di kawasan perkotaan. Pemilih berlatar belakang petani dan nelayan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dibanding pegawai negeri sipil atau karyawan. Ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat partisipasi pemilih di desa/kelurahan yang memiliki banyak kompleks perumahan, kawasan perkantoran, dan perniagaan.

Berbeda dengan Pohuwato, di Kabupaten Bone Bolango dan Boalemo, warga yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan penambang emas, lebih memilih bekerja ketimbang ke TPS untuk memilih presiden. Tidak adanya pasangan yang diminati/diinginkan dan maraknya kampanye hitam yang disebar melalui berbagai media, juga berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih, seperti terjadi di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Selain itu, jarak ke TPS pilpres yang lebih jauh dibanding jarak ke TPS pileg, juga menjadi penyebab berkurangnya jumlah pemilih pilpres.

GAMBAR 10.1 DAN 10.2: ANALISIS PARTISIPASI PEMILIH BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

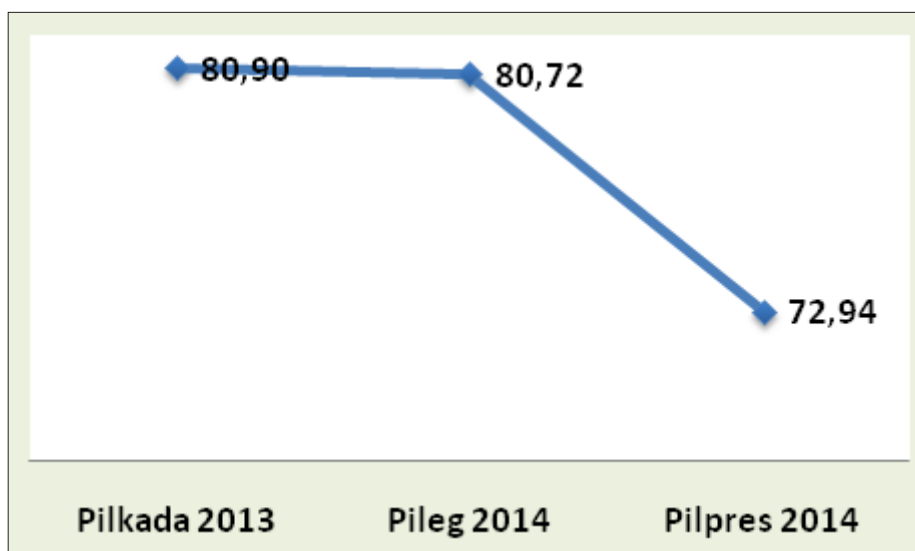


Tapi, menurut Anggota KPU, Sigit Pamungkas, target partisipasi tak semata terpaku pada kuantitas yang tinggi, tapi juga pada kualitas pemahaman demokrasi para pemilih. Seperti, bagaimana masyarakat meminimalisasi politik uang, bangkitnya semangat *volunterisme* dalam pemilu, serta keterlibatan warga dalam kegiatan politik (*political engagement*).

Survei KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada 28 November hingga 1 Desember 2014 mendapati penurunan partisipasi pemilih dalam tiga pemilihan yang berdekatan di Kabupaten Gorontalo Utara, sejak Pilkada 2013 hingga Pemilu 2014. Survei ini digelar untuk memperoleh informasi objektif mengenai beberapa isu signifikan terkait pemilu. Riset melibatkan 30 penyurvei yang menemui 1.509 responden yang tersebar di 11 kecamatan dan 123 desa.

Hasil survei menemukan 91 persen responden menyalurkan aspirasi politiknya. Meski demikian, partisipasi pemilih Pilkada 2013, Pileg 2014, dan Pilpres 2014 mengalami penurunan. Pada Pileg 2009, partisipasi pemilih di sana tercatat 85 persen, sedangkan pada Pileg 2014 turun menjadi 80,72 persen. Saat Pilkada 2013, partisipasi pemilih tercatat 80,90 persen, sedangkan Pilpres 72,94 persen, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

GAMBAR 10.3: GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH 2013 DAN 2014 DI KABUPATEN GORONTALO UTARA



Terkait dengan politik uang di masyarakat, hasil survei mendapatkan jawaban bahwa sebagian besar responden menyadari bahwa praktik tersebut mencederai demokrasi (77 persen). Kendati demikian, tingginya penolakan

terhadap politik uang oleh 77 persen responden tersebut belum diikuti tindakan nyata untuk mencegahnya.

Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah, “Tindakan apa yang akan dilakukan jika melihat/menyaksikan pemberian sejumlah uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih?” Hasilnya, 40 persen responden menyatakan cukup menyaksikan saja; 29 persen tak peduli, dan; hanya 20 persen yang menyatakan akan mengambil inisiatif menegur dan melaporkannya kepada petugas.

Alhasil, survei KPU Gorontalo Utara yang menemukan tingginya ekspektasi/harapan pemilih terhadap caleg dan partai yang tidak melakukan korupsi, tidak simetris dengan kesadaran pemilih untuk menolak politik uang. Toleransi pemilih atas politik uang merupakan awal dari praktik korupsi. Sebab, tak sedikit caleg terpilih yang lebih mementingkan upaya pengembalian modal politiknya ketimbang memenuhi kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Tingginya biaya politik akibat politik uang justru akan memicu perilaku koruptif.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA

Bila tak ada aral melintang, akhir 2015 adalah untuk pertama kalinya pilkada serentak dilaksanakan. Akhir 2015 adalah gelombang pertama pilkada serentak, yang digelar di 272 daerah. Dari 272 daerah tersebut, beberapa di antaranya adalah daerah otonom baru. Pilkada serentak gelombang kedua direncanakan berlangsung Februari 2017, sedangkan gelombang ketiga dijadwalkan dihelat pada Juni 2018. Adapun pemilu serentak akan digelar pada 2019.

Sejak pilkada langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan pada Juni 2005, partisipasi pemilih pesta demokrasi tingkat lokal mengalami pasang surut. Namun, akhir-akhir ini, di sejumlah daerah kerap muncul angka partisipasi yang rendah. Ada yang tinggal 60 persen, bahkan ada pula yang telah di bawah 50 persen. Bagaimana dengan partisipasi publik dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018?

Pada 2012 lalu, saat masih menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, pernah mengungkapkan bahwa berbagai penelitian telah mendapati kecenderungan menurunnya antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil pilkada. Padahal, semakin rendah partisipasi masyarakat dalam pilkada, semakin rendah pula kualitas pilkada.

Menurut Mahfud MD, ada empat penyebabnya. Pertama, masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena apatis.

Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat, turut berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula sudah berniat untuk berpartisipasi. Ketiga, masyarakat lebih condong mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja, berladang, merantau, sekolah, ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Keempat, partisipasi pemilih dalam pilkada didorong semangat pragmatisme masyarakat. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan, mereka mau berpartisipasi. Kalau tidak, mereka tidak merasa perlu berpartisipasi.

Momen pesta demokrasi dalam pilkada pun segera bergeser menjadi fenomena politik yang selalu diwarnai persoalan. Ketua Perludem, Didik Supriyanto, mengingatkan bahwa dalam momen pilkada potensi konflik cenderung tinggi. Ini disebabkan pihak-pihak yang akan bertarung dalam pilkada adalah para tokoh politik lokal. Sehingga, perebutan kekuasaan di daerah akan terjadi dengan menggunakan kekuatan masing-masing, yang di dalamnya terdapat sentimen etnis, agama, maupun klan. Sentimen-sentimen ini yang dapat memicu konflik.

Untuk menghindari konflik, perlu wadah yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi. Dan, demokrasi telah menyediakan ruang bagi rakyat untuk ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pilkada. Salah satunya dengan keterbukaan informasi. Keterbatasan informasi tidak memungkinkan rakyat terlibat aktif.

Partisipasi masyarakat memang tidak hanya diukur dengan jumlah pemilih yang datang dan mencoblos di bilik suara. Karena itu, penting untuk menumbuhkan dan memberikan ruang bagi masyarakat agar secara aktif terlibat dalam setiap tahapan hingga pelantikan calon terpilih.

C. GENERASI DIGITAL

Anggota KPU, Sigit Pamungkas, menyebut kualitas partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 mengalami peningkatan. Hal itu tampak dari keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu. Banyak relawan yang tidak terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, terlibat dalam proses mengawal hasil Pilpres 2014.

Salah satu kegiatan positif yang telah dilakukan KPU dalam proses tahapan pemilu adalah membuka data dan informasi sehingga mudah diakses, memungkinkan tumbuhnya relawan, dan memperluas partisipasi publik. Media sosial pun telah memberi peluang dan ruang bagi banyak orang untuk

berkontribusi dalam pemilu.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperluas partisipasi publik. Salah satu cara yang efektif adalah memanfaatkan aplikasi digital. Ini telah dilakukan KPU dengan keterbukaan informasi dan *open data*, antara lain melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Cara-cara pendidikan pemilih melalui aplikasi digital juga sudah dilakukan Perludem, yang aplikasi dan sistemnya telah menggaet banyak kalangan.

Untuk menumbuhkan keikutsertaan masyarakat, memang tidak cukup lagi dengan cara-cara sosialisasi konservatif dan tradisional seperti ceramah, tatap muka, dan peragaan yang lebih banyak bersifat mobilisasi. Sebab, yang diperlukan adalah bagaimana rakyat benar-benar berperan dengan sukarela, bukan karena pengerahan dan paksaan.

Para pegiat demokrasi digital telah memberikan contoh. Tanpa kenal lelah mereka mengedukasi pemilih dan mengawasi setiap tahapan pemilu. Mulai dari proses pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, pengawasan kampanye, penghitungan suara di TPS, dan pengawalan hasil rekapitulasi suara, bahkan hingga pengawasan kinerja anggota Dewan terpilih. Secara gotong royong (*crowdsourcing*), para pegiat demokrasi digital ini memperluas pendidikan pemilih dan pemantauan tahapan pemilu melalui beragam aplikasi.

Salah satu yang melakukan pemantauan dan pengawasan menggunakan aplikasi digital adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bekerja sama dengan I-Lab, dalam proyek bersama yang diberi nama *MataMassa*. AJI Jakarta adalah organisasi profesi jurnalis yang menaruh perhatian pada isu kebebasan pers, kebebasan berekspresi, keterbukaan, dan transparansi informasi. Sedangkan, I-Lab adalah organisasi nonprofit yang bergerak di bidang pengembangan dan riset teknologi untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial, mendukung transparansi sebagai penguatan hak akses pada informasi, dan memberikan dukungan teknis terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan untuk perubahan sosial.

Aplikasi “MataMassa” dapat diunduh menggunakan telepon selular berbasis iOS maupun Android. MataMassa juga hadir dalam bentuk Short Message Service (SMS) Gateway. “MataMassa” adalah aplikasi pemantauan Pileg dan Pilpres 2014 di seluruh wilayah Indonesia, dengan konsentrasi di tujuh kota, yaitu Jakarta, Aceh, Semarang, Surabaya, Makassar, Padang, Yogyakarta, dan Ambon. Siapa pun diperbolehkan mengunduh aplikasi “MataMassa”, dan dapat langsung

melaporkan temuan pelanggaran pemilu di lapangan melalui aplikasi tersebut. Tim verifikator MataMassa kelak akan menindaklanjuti temuan tersebut dan kemudian mengunggah laporannya di situs *matamassa.org*.

GAMBAR 10.4: HASIL PEMANTAUAN MATAMASSA PADA PEMILU 2014.



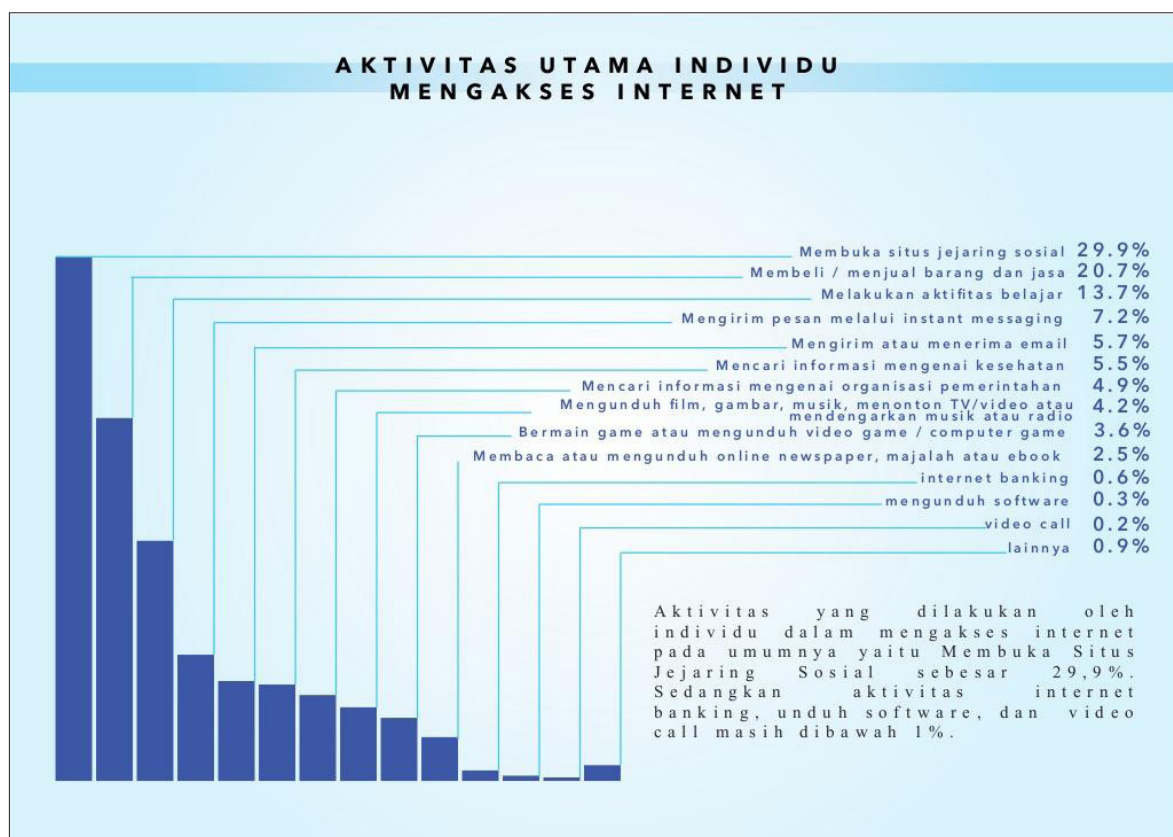
GAMBAR 10.5: STATISTIK LAPORAN MATAMASSA.



Berbeda dengan pemilu sebelumnya, aplikasi Facebook buatan Zuckerberg, Twitter ciptaan Dorsey, dan WhatsApp karya Koum, telah mengikat gerakan orang banyak, terutama pada Pilpres 2014 (*Tempo*, 15-21 Desember 2014: *Relawan*). Aplikasi ciptaan mereka telah menghubungkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang, untuk bergerak bersama. Perangkat media sosial itulah

yang banyak mengubah pemilik suara, umumnya “generasi digital”, dari *silent majority* menjadi orang-orang yang lantang menyuarakan pendapatnya. Banyak orang bergerak bersama hampir tanpa komando, dengan mengandalkan jari-jari tangan mereka. Mereka adalah yang kemudian kita kenal sebagai “relawan”. Tumbuhnya “relawan”, baik yang bergerak sendiri maupun berkelompok, membedakan Pilpres 2014 dengan hajatan yang sama tahun-tahun sebelumnya.

GAMBAR 10.6: HASIL SURVEI AKSES DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2014



Tulisan *Tempo* tersebut sejalan dengan hasil penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pada 2014, Kementerian Kominfo mengadakan Survei Akses dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor rumah tangga di 33 provinsi, yang meliputi 140 kabupaten/kota, dengan sampel 9000 rumah tangga. Hasilnya, aktivitas utama individu terhubung dengan internet untuk membuka situs jaringan sosial mencapai 29,9 persen; membeli/menjual barang/jasa (20,7 persen),

dan; melakukan aktivitas belajar (13,7 persen).

Sebaran individu terhadap akses internet berdasarkan lokasi, untuk rentang usia 16-25 tahun (32 persen), dan usia 26-35 tahun (29 persen), lebih banyak mengakses internet melalui telepon genggam di lokasi mana saja yang terhubung dengan jaringan. Sedangkan, untuk usia 36 hingga 65 tahun, mereka didapati lebih banyak mengakses internet di rumah (*fixed*).

Pengguna internet tertinggi, menurut survei tersebut, adalah mereka yang berusia 16-25 tahun, dengan jumlah 38,91 persen. Sedangkan, untuk rentang usia 26-35 tahun, jumlahnya 26,80 persen.

Disigi berdasarkan dengan pekerjaan, pengguna internet paling tinggi adalah PNS/TNI/Polri sebesar 58,6 persen; pelajar/mahasiswa 42,6 persen, dan; karyawan swasta 42,3 persen. Dari survei ini, petani, buruh, nelayan, pedagang, tukang, dan ibu rumah tangga juga telah didapati sebagai pengguna internet.

Untuk pengguna telepon genggam, yang paling paling banyak adalah usia 16–25 tahun, yaitu 84,82 persen. Mereka disusul oleh usia 26-35 tahun, dengan jumlah pengguna telepon genggam sebanyak 82,59 persen.

Untuk sebaran kepemilikan telepon genggam tertinggi pada usia 16-25 tahun, 85,9 persen laki-laki dan 83,9 persen perempuan. Sedangkan, untuk usia 26–35 tahun, laki-laki mencapai 84,3 persen dan perempuan 81,0 persen.

Adapun kepemilikan perangkat untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi, telepon genggam mencapai 83,20 persen dan televisi 87,2 persen.

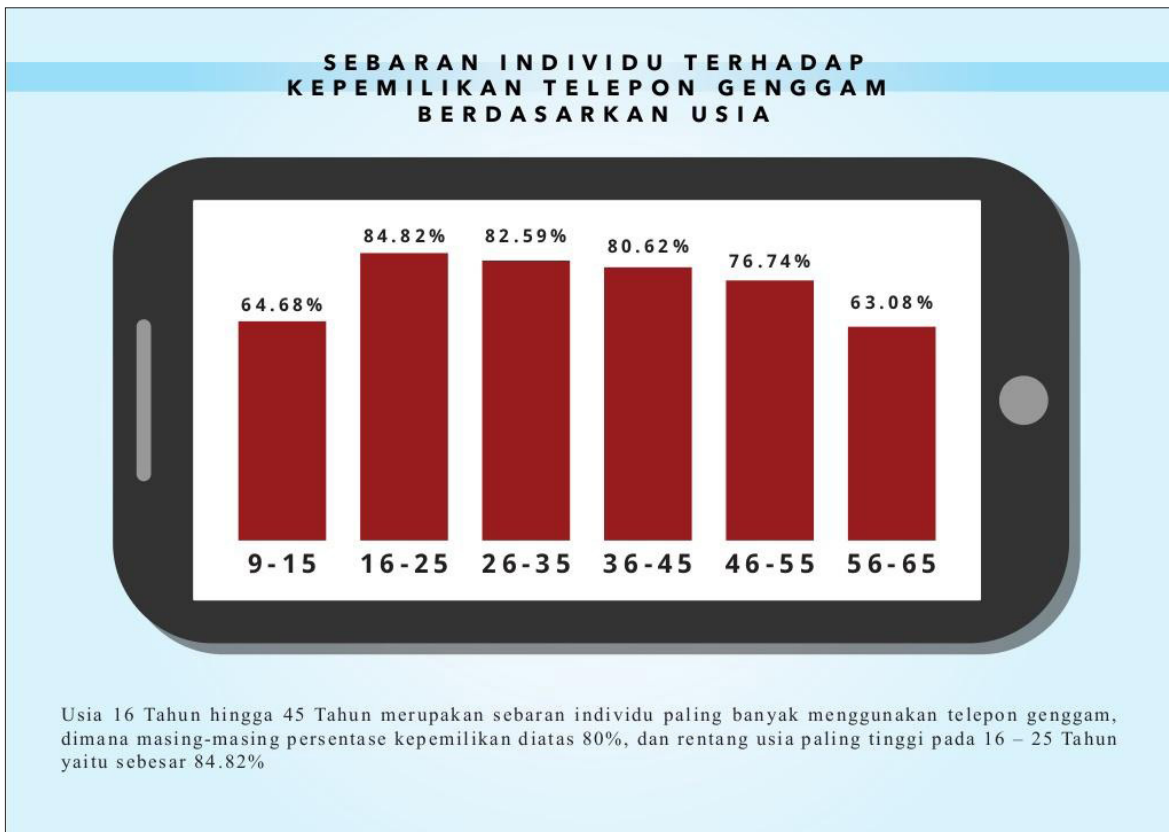
Media sosial telah berkembang jauh dari fungsi awalnya yang hanya dimaksudkan untuk menghubungkan orang. Banyak yang telah memanfaatkan sarana ini untuk misi sosial, dengan menggerakkan masyarakat luas. Ini merupakan dampak dari arus informasi di dunia digital yang semakin masif dan mudah didapatkan.

Antusiasme pengguna media sosial di Indonesia tampak dari perhelatan *Social Media Week (SMW) 2015*, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Pacific Place Jakarta, 23 sampai 27 Februari 2015. SMW tahun ini juga diadakan simultan di enam kota di dunia, yakni New York, Milan, Lagos, Copenhagen, Hamburg, dan Bangalore. Jakarta dipilih sebagai tuan rumah karena masyarakat Indonesia aktif bersosial media, dengan jumlah pengguna internet mencapai 72 juta jiwa.

Jumlah *mobile subscription* yang aktif di Indonesia juga telah mencapai

282 jutaan, di mana 74 persen di antaranya digunakan masyarakat untuk mengakses media sosial. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara.

GAMBAR 10.7: HASIL SURVEI AKSES DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2014



Fenomena masyarakat yang aktif di sosial media ini didukung oleh kultur orang Indonesia yang senang berkumpul. Melalui media sosial, banyak cara untuk menampilkan karya, menyelamatkan hidup manusia, mengubah opini dan kebijakan, dan lain-lain. Aktivitas SMW di Jakarta ini dapat disimak melalui <http://socialmediaweek.org/jakarta/>.

Pada SMW di Jakarta disampaikan bahwa 93 persen pengguna internet di Indonesia aktif mengakses Facebook, bahkan Jakarta menjadi pengguna Twitter terbanyak. Facebook masih berada di posisi terdepan penggunaan media sosial, selanjutnya Twitter, Instagram, Path, dan sebagainya. Facebook masih menjadi pilihan karena pertukaran informasi di laman ini lebih lengkap dan bisa menjangkau ruang lingkup yang lebih luas.

Saat ini, seribu lebih desa di Indonesia juga sudah memiliki situs *web* sendiri. *Website* desa tersebut menggunakan nama domain *desa.id*, bukan sub-domain atau tidak menumpang di domain milik pemerintah kabupaten/kota atau lembaga lain. Menurut Irman Meilandi, salah satu anggota Dewan Pakar Gerakan Desa Membangun, situs *web* ini dikelola secara mandiri atas nama desa, dan merupakan milik desa itu sendiri. *Website* desa digagas oleh Gerakan Desa Membangun dan pelbagai elemen pegiat pemberdayaan desa di Indonesia.

Keterbukaan informasi memberikan akses bagi publik untuk menjadikannya sebagai ruang inovasi dan kreasi baru. Penyediaan data dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, seperti peminat data, para aktivis, politisi, pengembang, jurnalis dan masyarakat umumnya. Data terbuka akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan lembaga/badan publik, serta menciptakan produk dan pengetahuan baru.

Mengacu dari perhelatan Pemilu 2014, ke depan, perlu upaya terus-menerus untuk mengembangkan dan memperkaya sistem informasi dan aplikasi digital. Kreativitas dalam menghadirkan informasi yang mudah diakses publik akan menumbuhkan berbagai inovasi dan kreasi yang berdampak positif pada pelibatan masyarakat.

EPILOG

Bukan Sekadar Jargon Keterbukaan

SETIAP penyelenggara pemilu berkewajiban memedomani dan melaksanakan setiap butir dari asas penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Salah satu asas yang menjadi landasan kerja penyelenggara pemilu adalah keterbukaan.

Pembuat undang-undang menjadikan keterbukaan sebagai asas penyelenggara pemilu, tentu bukan tanpa sebab. Pembuat undang-undang, dalam penjelasannya, menyebutkan bahwa pemilu yang luber dan jurdil hanya dapat terwujud bila penyelenggara pemilu mempunyai integritas tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara.

Keterbukaan penyelenggara atas kerja dan kinerjanya akan membantu warga negara lebih mudah memahami dan berpartisipasi dalam pemilu. Bukan sekadar tahu, tapi keterbukaan akan membantu pemilih paham dan bisa berpartisipasi baik secara prosedural maupun substansial. Tak sekadar datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tapi bisa cerdas dan kritis menilai proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri, termasuk bagaimana memastikan orang-orang baiklah yang akan terpilih melalui proses pemilu.

Selain itu, keterbukaan bukanlah prinsip yang berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan 11 prinsip penyelenggara pemilu yang lain, baik soal kemandirian, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan seterusnya. Atas dasar itulah penyelenggara pemilu diharap memberikan yang terbaik dalam melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Keterbukaan menjadi suatu keniscayaan, tanpa diminta sekalipun.

Dalam interaksi kami dengan beberapa penyelenggara pemilu, masih dijumpai keraguan, bahkan keengganan untuk menerapkan asas keterbukaan. Keterbukaan dianggap sebagai sebuah beban: tambahan pekerjaan yang akan merepotkan penyelenggara di tengah kompleksitas penyelenggaraan tahapan pemilu. Belum lagi kenyataan bahwa pemilu Indonesia secara administrasi

adalah pemilu yang paling rumit di dunia. Keterbukaan dianggap sebagai sebuah kerja ekstra yang akan lebih melelahkan penyelenggara. Beratnya lagi, keterbukaan dianggap mahal serta memerlukan biaya dan anggaran tambahan dalam merealisasikannya.

Padahal, kalau keterbukaan data dan informasi pemilu diterapkan dengan benar, justru akan berdampak sebaliknya. Keterbukaan akan lebih memudahkan penyelenggara, mendorong inovasi dan kreativitas partisipasi, mengurangi dan melokalisasi konflik, dan lain-lain. Semua itu, pada akhirnya, bisa berdampak pada menguatnya kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu, tanpa penyelenggara susah-susah membangun pencitraan yang jauh lebih menghabiskan tenaga maupun biaya.

Hal tersebut sudah dibuktikan antara lain oleh KPU pada penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu. Keterbukaan KPU dalam membuat sistem daftar pemilih *online* (Sidalih), mengekspose daftar riwayat hidup caleg, mengumumkan laporan dana kampanye, sampai mengunggah *scanning* hasil penghitungan suara di TPS (Formulir C-1), berdampak pada lahirnya ratusan inovasi dan kreativitas publik untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal proses pemilu. Alih-alih sibuk *ngrasani* atau mencari-cari celah kesalahan penyelenggara, pemilih, masyarakat, dan pemangku kepentingan fokus memantau, mencermati, dan mengawasi kandidat, peserta pemilu, dan proses di seputar itu. Akhirnya, secara kelembagaan, penyelenggara menjadi sangat terbantu, karena bisa lebih fokus menyelenggarakan tahapan pemilu, ketimbang merespons 'keusilan' para pihak yang banyak terjadi, karena minimnya akses dan informasi soal penyelenggaraan pemilu yang bisa mereka dapatkan.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu pun lebih istimewa, karena kaya ragam inovasi dan kreativitas. Misalnya, meski daftar riwayat hidup caleg yang diunggah KPU tidak familiar dengan format *open data* (dapat diakses, dapat digunakan kembali, dan dapat digunakan siapa saja), tapi ratusan aplikasi dan kreasi partisipasi menyambutnya. Misalnya saja, apa yang dilakukan Perludem dengan program API Pemilu. API Pemilu berhasil membantu *developer* dan *programmer* komputer membuat puluhan aplikasi berbasis *smartphone* (Android dan iOS) dan *website*, yang bisa membuat pemilih mengenali dan menelusuri latar belakang dan rekam jejak caleg dan partai politik peserta pemilu.

Bisa dibayangkan kerumitan yang dihadapi pemilih kita, karena ada ratusan caleg yang harus dikenali di setiap daerah pemilihan (dapil). Di Dapil Banten

3, tempat saya memilih, ada 300 lebih kandidat di daftar calon tetap (DCT). Bagaimana saya bisa memilih dengan cerdas dan rasional, kalau calegnya sebanyak itu? Nah, adanya aplikasi yang memudahkan mengidentifikasi para caleg, merupakan pertolongan luar biasa dan berharga.

Keterbukaan KPU pada Pemilu 2014 lalu juga melahirkan gerakan kesukarelawanan yang luar biasa. Jari Ungu, *platform* berbasis *website* yang menyajikan rekam jejak para caleg terpilih, yang dibuat sejumlah relawan, bahkan terpilih sebagai salah satu *volunteer of the year* edisi khusus akhir tahun 2014 *Majalah Tempo*. Belum lagi kalau bicara gerakan relawan *kawalpemilu.org*, yang berhasil menggalang 700-an relawan untuk bergabung menghitung hasil pemilu dari scan Formulir C-1 yang diunggah oleh KPU. Inisiatif tersebut telah membantu publik mengetahui hasil pemilu lebih cepat, sembari menunggu hasil rekapitulasi penghitungan manual KPU.

Siapa sangka, kerja sukarela *kawalpemilu.org* bisa menghitung lebih dari 450 ribu hasil penghitungan suara dalam bentuk *scanning* Formulir-C1 yang diformat dalam bentuk JPEG. Ternyata, keterbukaan melahirkan sesuatu yang semula dianggap tak mungkin, menjadi sangat mungkin dan masuk akal.

Keterbukaan akan menemukan manfaat dan makna sesungguhnya jika ia bukan sekadar teks-teks indah di atas kertas. Keterbukaan harus direalisasikan bukan hanya sebagai sebuah kebijakan, tapi juga rancangan program dan aktivitas kerja yang dilaksanakan dan dipastikan capaiannya. Sebab, ketika keterbukaan menjadi jargon belaka, akan sama halnya dengan mengharapkan pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis, namun hanya didiskusikan dari satu forum diskusi ke forum diskusi lainnya. Ia hanya menjadi omong kosong!

Karenanya, keterbukaan bukanlah jargon semata. Ia adalah kepercayaan, komitmen, dan kerja nyata. Keterbukaan dalam bentuk *open data* harus terus mewarnai dan menjadi ciri khas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu Indonesia. Kita yakin dan percaya.

Titi Anggraini Mashudi

Direktur Eksekutif Perludem

DAFTAR ISTILAH

API Application Programming Interface atau Antarmuka Pemrograman Aplikasi, adalah sebuah cara program komputer saling berbicara dengan yang lainnya, yang dapat dipahami dalam hal bagaimana seorang pemrogram mengirimkan instruksi antar program.

Attribution License Sebuah lisensi yang mewajibkan sumber orisinal dari material berlisensi tersebut untuk dikutipkan (diatribusikan).

Basisdata Seperti layanan *web*, basisdata menyediakan akses langsung ke data secara dinamis. Basisdata mempunyai kelebihan, yakni penggunaanya dapat menyimpan secara bersama hanya dengan mengekstraksi apa yang mereka butuhkan.

Connectivity Konektivitas berhubungan dengan kemampuan komunitas untuk terhubung ke internet, khususnya *world wide web*.

Copyright Sebuah hak untuk para pencipta karya kreatif guna membatasi penggunaan lain dari karya-karyanya. Seorang pemilik hak cipta berhak untuk menentukan bagaimana orang lain dapat menggunakan karya tersebut.

Creative Commons Sebuah standar lisensi untuk penggunaan data.

Datum Bentuk tunggal dari kata data.

Data Kumpulan nilai yang diberikan untuk mendeskripsikan suatu benda. Pengertian “benda” ini dapat berupa material fisik (*cth.* sekolah, puskesmas, jalan raya) atau konsep abstrak (*cth.* nilai inflasi, anggaran belanja, populasi penduduk).

Data Access Protocol Sebuah sistem yang memperkenankan pihak luar diberikan izin akses ke basisdata tanpa mengganggu sistem mereka.

Database rights Sebuah hak untuk mencegah orang lain dari ekstraksi dan penggunaan ulang konten dari basisdata. Hal ini dapat ditemui terutama di wilayah yurisdiksi Eropa.

Dataset Kumpulan data yang disusun secara tematis oleh perseorangan atau instansi.

Distribusi Data Wujud nyata penyebaran data. Bentuk-bentuk distribusi data terbuka antara lain: berkas CSV, kode API, atau acuan RSS.

Dokumen Teks Dokumen klasik dalam format seperti Word, ODF, OOXML, atau PDF yang mungkin cukup untuk menunjukkan jenis data tertentu.

Format CSV (Comma Separated Value) Format penyimpanan data, di mana antarnilai pada data dipisahkan oleh tanda koma (,).

Format File Terbuka Format terbuka adalah salah satu spesifikasi perangkat lunak yang disediakan untuk siapapun dan gratis. Siapa saja dapat menggunakan spesifikasi perangkat lunak, tanpa ada pembatasan. Jika format sebuah file “tertutup”, kemungkinan karena file tersebut dibuat dalam format hak milik dengan spesifikasi tidak tersedia untuk umum dan penggunaannya terbatas.

HTML Saat ini sudah tersedia banyak data dalam format HTML di berbagai situs. Format HTML mungkin akan mencukupi jika data tersebut sudah sangat stabil dan dalam lingkup terbatas. Dalam beberapa kasus, dapat menjadi lebih baik untuk memiliki data dalam bentuk yang mudah diunduh. Format HTML bisa menjadi titik awal yang baik dalam menampilkan data. Biasanya, akan sangat tepat untuk menggunakan tabel dalam dokumen HTML untuk menyimpan data, serta menjadi hal yang penting pula untuk menampilkan *field* data yang beragam dan masing-masing diberikan ID yang dapat membuatnya lebih mudah untuk menemukan dan mengerjakan data tersebut. Yahoo telah mengembangkan sebuah perangkat (<http://developer.yahoo.com/yql/>) yang dapat mengekstrak informasi terstruktur dari sebuah situs *web*.

Information Asset Register IAR adalah register khusus yang dibentuk untuk menangkap dan mengatur metadata tentang sejumlah informasi yang dimiliki oleh departemen dan lembaga pemerintah. Sebuah IAR komprehensif mencakup basisdata, kumpulan file lama, file elektronik terbaru, koleksi statistik, penelitian dan sebagainya.

Intellectual Property Rights Monopoli diberikan kepada individu untuk kreasi-kreasi intelektual.

IP Rights Lihat: hak kekayaan intelektual.

JSON Format file sederhana yang sangat mudah bagi setiap bahasa pemrograman untuk membacanya. Kesederhanaannya mempunyai arti

bahwa secara umum memudahkan komputer untuk memprosesnya dibandingkan yang lain, seperti XML.

Layanan Web Data yang berubah secara berkala. Terdapat beberapa cara untuk membuat layanan *web*, tapi yang paling sering digunakan adalah SOAP dan REST. Umumnya, SOAP melampaui REST, namun layanan REST lebih mudah untuk dikembangkan dan digunakan, sehingga menjadi standar yang banyak digunakan.

Lisensi Creative Commons Attribution v.4 Lisensi ini memperbolehkan penggunaan, pendistribusian, serta pengolahan data oleh pengguna, baik untuk kepentingan komersial dan nonkomersial.

Machine-readable Format yang dapat dibaca oleh mesin yang mampu memiliki data hasil ekstraksi dengan mudah oleh program komputer. Dokumen PDF tidak mudah dibaca mesin. Komputer dapat menampilkan teks dengan baik, tetapi memiliki kesulitan besar dalam memahami konteks.

Metadata Informasi suatu data dalam format dan struktur yang distandardisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi data yang bersangkutan.

Open Data Data terbuka mampu digunakan untuk segala kebutuhan.

Open Government Data Data terbuka yang diproduksi oleh pemerintah. Data terbuka pemerintah adalah sebuah kumpulan data dari Informasi Sektor Publik, yang lingkungannya lebih luas.

Open Refine Tools yang dapat mencari baris/kolom apa saja yang kosong pada data, serta mampu mencari isian dalam baris/kolom yang salah ketik.

Open Source Sumber terbuka adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source-code*) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet). Pola pengembangan ini mengambil model ala bazaar, sehingga pola *open source* ini memiliki ciri bagi komunitasnya, yaitu adanya dorongan yang bersumber dari budaya memberi. Artinya ketika suatu komunitas menggunakan sebuah program *open source* dan telah menerima sebuah manfaat, akan termotivasi untuk menimbulkan sebuah pertanyaan apa yang bisa pengguna berikan balik kepada orang banyak.

Pola *open source* lahir karena kebebasan berkarya, tanpa intervensi berpikir dan mengungkapkan apa yang diinginkan, dengan menggunakan pengetahuan dan produk yang cocok. Kebebasan menjadi pertimbangan utama ketika dilepas ke publik. Komunitas yang lain mendapat kebebasan untuk belajar, mengutak-atik, merevisi ulang, membenarkan ataupun bahkan menyalahkan. Tapi, kebebasan ini juga datang bersama dengan tanggung jawab, bukan bebas tanpa tanggung jawab.

Open Standards Umumnya dipahami sebagai standar teknis yang bebas dari pembatasan lisensi. Bisa juga diartikan standar yang dikembangkan dalam koridor vendor yang netral.

Outlier Data yang muncul di luar distribusi normal.

Piktochart Situs *web* yang bersifat *freemium*, dengan beberapa layanan gratis dan berbayar.

Plain Text Dokumen teks biasa (.txt) sangat mudah dibaca komputer. Pada umumnya mengesampingkan struktur metadata dalam dokumen. Namun, hal ini menuntut pengembang membuat *parser* yang dapat menafsirkan setiap dokumen sebagaimana tampilannya. Beberapa masalah dapat disebabkan oleh peralihan file plain text antarsistem operasi. MS Windows, Mac OS X dan varian Unix lainnya memiliki cara tersendiri untuk memberitahu komputer bahwa mereka telah mencapai akhir baris dari file.

Public domain Tidak ada hak cipta. Tidak ada dalam semua yurisdiksi.

Public Sector Information Informasi dikoleksi atau dikendalikan oleh sektor publik.

RDF Data RDF dapat disimpan dalam XML dan JSON. RDF mendorong penggunaan URL sebagai pengidentifikasi, yang menyediakan cara mudah untuk interkoneksi secara langsung dengan inisiatif *data terbuka* yang telah ada di web. RDF masih belum secara luas digunakan, tapi telah menjadi tren di kalangan pemerintah yang mengembangkan data terbuka.

Re-use Penggunaan konten di luar tujuan aslinya.

Share-alike License Sebuah lisensi yang mewajibkan para pengguna produknya untuk menyediakan konten yang berada di bawah naungan yang sama atau mirip kondisinya dengan yang aslinya.

SMW Social Media Week

Tab-separated values Tab-separated values (TSV) adalah format teks yang sangat umum digunakan untuk data tabular yang bisa berbagi. Formatnya sangat sederhana dan sangat dapat dibaca oleh mesin.

Tabula *Tool* untuk mengkonversi data tabular dari PDF yang tidak dikunci dan tidak ditulis tangan dan mengubahnya menjadi CSV. Tabula bisa diunduh via alamat *web* <http://tabula.technology>

Tabular Bentuk terstruktur pengaturan data menggunakan konsep skema baris dan kolom. Rentang kolom merepresentasikan jenis pengukuran, dan satuan baris merepresentasikan nilai-nilai pengukuran. Istilah tabular sering dipertukarkan bebas dengan istilah “tabel”.

Tipe Data Bentuk pengklasifikasian nilai data yang menentukan keabsahan penulisan dan jenis operasi yang dapat diterapkan. Contoh tipe data antara lain: teks, angka, tanggal, waktu dan sebagainya.

XML Format yang digunakan secara luas untuk pertukaran data karena memberikan peluang yang baik dalam guna menjaga struktur dalam data dan file, serta memungkinkan pengembang menulis bagian dari dokumentasi dengan data tanpa mengganggu pembacaan mereka.

Web API Sebuah API yang didesain untuk bekerja melalui Internet.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “*Survei Indikator Akses dan Penggunaan TIK pada rumah Tangga Tahun 2014.*”

KPU. “*Kompilasi Regulasi Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik.*”

————— (2011) “*Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Politik: Salah Satu Kunci Peningkatan Partisipasi Masyarakat,*” Suara KPU Edisi September 2011.

————— (2014), “*Penyelenggaraan Pilpres Telah Sesuai Prinsip-prinsip Demokratis.*” kpu.go.id.

————— (2014), “*Evaluasi Pemilu untuk Tata Kelola yang Lebih Baik.*” kpu.go.id. KPU Gorontalo Utara. “*Survei Evaluasi Publik Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014*”, 28 November–1 Desember 2014.

Mahfud MD, Moh. “*Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*”, dalam buku *Demokrasi Lokal*. Penerbit Konpress, 2012.

Majalah *Tempo*, “*Relawan*”, 15-21 Desember 2014.

Manurung, Ruli. (2014), “*Mengapa Hasil kawalpemilu.org (dan sejenisnya) Dapat Dipercaya*”. <https://staff.blog.ui.ac.id>.

————— (2014), “*Open election data + mass interaction = Indonesian public as watchdog*”. <http://theconversation.com>

Rajagukguk, Jan Peter Alexander (2014), “*Gotong Royong dan Data Terbuka Contoh Kasus Pemilu 2014*”. <https://staff.blog.ui.ac.id>.

Rakhmanda, Endiyan dkk (2014). “*Pedoman Umum Data Terbuka: Panduan Penyusunan Data Terbuka Pemerintah DKI Jakarta.*”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

URL / SITUS WEB

- <http://kominfo.go.id/>
- <http://www.kompas.com/>
- <http://kpu.go.id/>

- <http://www.matamassa.org/>
- <http://opendatahandbook.org/id/> dan <http://opendatahandbook.org/id/why-open-data/index.html>
- <http://www.republika.co.id/>
- <http://www.rumahpemilu.org/in>
- <https://www.selasar.com/>
- <http://socialmediaweek.org/jakarta/>
- <http://theconversation.com/open-election-data-mass-interaction-indonesian-public-as-watchdog-29450>
- <https://staff.blog.ui.ac.id/maruli/2014/07/17/mengapa-hasil-kawalpemilu-org-dan-inisiatif-sejenisnya-dapat-dipercaya/>
- <https://staff.blog.ui.ac.id/jp/2014/07/17/gotong-royong-dan-data-terbuka-contoh-kasus-pemilu-2014/>
- <http://www.tempo.co>

PROFIL PENULIS

Verrianto Madjowa (Anggota KPU Provinsi Gorontalo)



Verrianto Madjowa adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo (2008-2013 dan 2013–sekarang). Pernah menjadi staf redaksi *Majalah Inovasi* Universitas Sam Ratulangi (1990), wartawan *Manado Post* (1991-1993) dan *Wibawa* (1993), koresponden *Majalah D&R* (1997-1998) dan *Tempo* (1998-2009), serta Pemimpin Redaksi *Koran Gorontalo* (2005).

Sering menulis di sejumlah harian lokal dan nasional, seperti *Cahaya Siang*, Manado; *Fajar*, Makassar; *Republika*; serta sejumlah majalah antara lain *Prospek* dan *Pancaroba*, Jakarta. Juga menulis di *Jurnal Perempuan* (2006), *National Geographic Traveler* (2010), dan *Jurnal Dewan Pers* (2011).

Selain sebagai jurnalis, aktif di beberapa organisasi nonpemerintah, serta menulis buku. Buku yang sudah diterbitkan adalah *Kemelut Tambang Emas Minahasa, Rekonstruksi Kasus 1986-2001* (LBH Manado-YLBHI, 2002), *Bunaken* (2007), *Pemilu Gorontalo 1955-2014* (Banana dan Perludem, 2015), dan *Kisah Orang Gorontalo* (Banana, 2015).

Diah Setiawaty (Program Officer API Pemilu)



Diah Setiawaty adalah Program Officer API (Application Programming Interface) Pemilu, program *database* pemilu Perludem. API Pemilu bertujuan memberikan informasi yang lebih baik kepada pemilih, meningkatkan akses publik terhadap informasi pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih melalui penggunaan teknologi. Program API Pemilu terus mendukung upaya Komisi Pemilihan

Umum dalam menyediakan akses yang lebih mudah untuk membuka data, terutama data pemilu.

Diah Setiawaty juga aktif dalam advokasi terbuka gerakan data di Indonesia, dan salah satu pendiri Open Data Club. Selain itu, Diah terlibat dalam program-program pendidikan pemilih di Perludem.

Ramda Yanurzha (Portal Data Indonesia: data.go.id)



Ramda Yanurzha adalah *Ambassador School of Data*, sebuah program Open Knowledge Foundation, dan tergabung dalam Portal Data Indonesia. Saat ini, melalui <http://data.go.id>, dia mendukung inisiatif data terbuka pemerintah Indonesia, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ramda memberikan bantuan teknis untuk data terbuka di Portal Data Indonesia. Ramda juga aktif mendorong gerakan *open data* bekerja sama dengan para akademisi, masyarakat IT, media, dan LSM. Tujuannya, untuk membangun sebuah ekosistem data yang terbuka, inovatif, dan berkelanjutan.

Yuandra Ismiraldi (Fellow School of Data)



Yuandra Ismiraldi, saat ini sedang melanjutkan studipascasarjana untuk yang kedua kali di Melbourne University, Australia. Sebelumnya telah menjadi *fellow School of Data* dan membantu beberapa organisasi dalam penyelenggaraan pelatihan *open data*. Yuandra aktif menggerakkan *developer* dan *civil society* dalam bekerja sama di proyek-proyek *Civic Tech* dan ICT untuk pembangunan. Selain itu, sebagai aktivis *open data*, Yuandra telah banyak membantu organisasi nonpemerintah (NGO) untuk melakukan advokasi digital. Yuandra juga salah seorang developer IOS dan aktif mengikuti berbagai kegiatan *open data*. Yuanda adalah pemenang *Hack Jack* yang diselenggarakan Pemerintah DKI Jakarta dengan aplikasi pelaporan masyarakat.